

PANDANGAN STRATEGIS
PRABOWO SUBLIANTO

PARADOKS INDONESIA

NEGARA KAYA RAYA, TETAPI MASIH BANYAK RAKYAT HIDUP MISKIN



INDONESIA memiliki kekayaan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang sangat besar. Namun, jika dulu kekayaan Indonesia hanya dinikmati oleh penjajah, sekarang kekayaan Indonesia hanya dinikmati oleh segelintir orang saja. Kita juga terancam selamanya hanya jadi negara berpenghasilan menengah karena strategi ekonomi kita saat ini gagal mengatasi *middle income trap* atau perangkap pendapatan menengah.

Buku ini mengungkap fakta-fakta yang harus diketahui oleh seluruh warga negara Indonesia. Fakta bagaimana, di tahun 2016 hampir setengah kekayaan dikuasai oleh 1% populasi terkaya. Bagaimana ada Rp. 11.000 triliun milik orang dan perusahaan Indonesia, jumlah yang 5x lebih banyak dari anggaran negara, parkir di luar negeri. Bagaimana 40% dari angkatan kerja hanya lulusan SD, dan 1 dari 3 anak Indonesia mengalami gagal tumbuh atau *stunting*. Juga mengapa ekonomi kita harus segera tumbuh 2x lebih cepat, atau *double digit* (di atas 10%) selama 12 tahun berturut-turut untuk mengejar kemajuan bangsa lain.

Demi mengatasi **Paradoks Indonesia** dan mencegah Tragedi Indonesia, buku ini juga menjelaskan bagaimana setiap WNI dapat turut berperan menjawab tantangan sejarah, menjadikan Indonesia bangsa yang kuat, terhormat, adil dan makmur. Bangsa kelas atas yang disegani, bukan bangsa menengah apalagi kelas bawah yang seringkali dianggap remeh.

Paradoks Indonesia

Pandangan Strategis Prabowo Subianto

Penulis	:	Prabowo Subianto
Editor	:	Badan Kajian Kebijakan Strategis (BKKS) Partai Gerindra Yusuf A. Rawis Dirgayuza Setiawan, Frans BMD, Prasetyo Hadi & Rachmat Pambudy
Fotografer	:	Angga R. Prabowo, Bachren Lukskardinul, Sudarsono & Setyoko
Desain	:	Dirgayuza Setiawan & Zulkarnaen
Penerbit	:	Koperasi Garudayaksa Nusantara
Redaksi	:	Jl. Harsono RM No. 54 Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550 Telp. (021) 782 8080, Faksimili (021) 789 2377 Email: kgn@koperasi-garudayaksa.com

Cetakan pertama, Februari 2017

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

Perpustakaan Nasional RI. Data Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Subianto, Prabowo

Paradoks Indonesia/Prabowo Subianto; editor, Dirgayuza Setiawan; -cet. 1-
Jakarta: Koperasi Garudayaksa Nusantara, 2017

132 hlm.; 21x29,7 cm

ISBN 978-602-61076-0-2

1. Sosial politik
2. Ekonomi

Kecuali dikatakan lain, asumsi nilai tukar Rupiah terhadap Dollar AS yang digunakan dalam buku ini adalah Rp. 13.000 per US\$ 1. Sebagian besar hitungan dibulatkan ke titik desimal terdekat.

Apabila Anda menemukan kesalahan cetak dan atau kekeliruan informasi pada buku ini, harap menghubungi e-mail penerbit atau info@gerindra.id.

Daftar Isi

1. Membangun Kesadaran Nasional	5
a. Membangun Kesadaran Bersama	8
b. Setelah 70 Tahun Lebih Merdeka, Kita Menuju Negara Gagal	13
c. Sekarang Waktunya Sadarkan Kader Bangsa	22
2. Tantangan Besar # 1:	
Kekayaan Indonesia Mengalir ke Luar	29
a. Kekayaan Kita Mengalir ke Luar	30
b. Hanya 1% Orang Indonesia Menikmati Kemerdekaan	53
3. Tantangan Besar # 2:	
Demokrasi Indonesia dikuasai Pemodal Besar	61
a. Demokrasi Kita dikuasai Pemodal Besar	62
b. Kadang Pemimpin Bisa Dibeli Karena Uang Berkuasa di Pemilihan	64
c. Partai, Survei, Pemilih, dan Media Kadang Bisa Dibeli dan dikuasai	71
4. Strategi Kita:	
Mencegah Tragedi Indonesia	77
a. Ini Potensi Negara Kita	79
b. Mewujudkan Ekonomi Konstitusi	83
c. Mewujudkan Demokrasi Rakyat	111
5. Menjawab Tantangan Sejarah	119

Pengantar:

Membangun Kesadaran Nasional



Ekonomi

1% Menguasai
49% Kekayaan



Angka rasio gini Indonesia menurut Credit Suisse adalah 0,49. Artinya 1% orang terkaya (hanya 2,5 juta orang) menguasai 49% kekayaan Indonesia*.

* Credit Suisse Global Wealth Report, 2016

29 Juta
Hidup Miskin

29 juta orang Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan yang ditetapkan pemerintah. Ini mencakup 8,3% penduduk kota dan 14,2% penduduk desa*.

* Badan Pusat Statistik (SUSENAS), 2015



Milik Siapa?

68 Juta
Orang Indonesia
Terancam Miskin

26,9% atau 68 juta orang Indonesia hidup kurang dari 50% di atas garis kemiskinan nasional (PPP US\$ 1,30). Jika mereka mengalami masalah ekonomi, mereka bisa jatuh miskin dengan mudah.

* Bank Dunia, 2015



72% dikuasai 1% (2,5 juta orang)

28% dikuasai 99%

1% Menguasai
72% Tanah Kita

Rasio ketimpangan kepemilikan dan penguasaan tanah saat ini: 0.72, artinya 72% tanah dikuasai sekitar 2,5 juta orang saja.

* Sumber: Konsorsium Pembaruan Agraria, 2014

Membangun Kesadaran Bersama

Kita harus sadarkan sebanyak-banyaknya warga negara Indonesia, bahwa jika dikelola dengan tepat, kita punya modal sumber daya alam dan sumber daya manusia yang cukup untuk jadi bangsa yang kuat dan terhormat. Bangsa yang rakyatnya hidup sejahtera.

Memilih Untuk Jadi Pejuang Politik

Keputusan saya untuk masuk ke dunia politik berangkat dari sebuah kesadaran. Sebuah kesadaran yang saya dapatkan dari mempelajari sejarah bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa lain. Dari diskusi saya dengan ratusan pakar ekonomi, pelaku usaha, dan negarawan dari Indonesia dan mancanegara. Juga dari pengalaman saya puluhan tahun mengabdikan sebagai prajurit dan sebagai pengusaha.

Kesadaran yang saya maksud, **pertama**, adalah kesadaran bahwa sistem ekonomi dan politik yang dipilih oleh para Pendiri Bangsa kita, yaitu sistem ekonomi dan demokrasi Pancasila, sistem ekonomi konstitusi, sebenarnya adalah pilihan yang terbaik untuk membangun Indonesia.

Kedua, bahwa sistem ekonomi yang sekarang dijalankan oleh negara kita sudah jauh menyimpang dari apa yang digariskan dalam UUD 1945 yang asli. UUD 1945 versi 18 Agustus 1945.

Ketiga, bahwa tidak mungkin saya bisa berhasil mengembalikan haluan ekonomi negara tanpa perjuangan politik. Oleh karena itu, 9 tahun yang lalu, pada tahun 2008 saya mendirikan Partai Gerakan Indonesia Raya. Partai GERINDRA.

Pada tahun 2012, saya mendapatkan mandat dari Partai GERINDRA untuk maju jadi Calon Presiden Republik Indonesia di Pemilu 2014. Walaupun tidak dinyatakan sebagai pemenang,

kesempatan bagi setiap warga untuk berwirausaha, baik secara kolektif atau berkoperasi ataupun secara sendiri-sendiri.

Adalah benar, kita perlu mengejar kemajuan infrastruktur negara lain. Kita juga perlu mengejar keberhasilan negara lain dalam menyejahterakan rakyat, dan dalam memperbaiki ketimpangan pendapatan. Kalau negara harus menentukan prioritas pembangunan, mewujudkan kesejahteraan rakyat dan memperbaiki ketimpangan haruslah menjadi program kerja utama, yang diikuti dengan mengejar kemajuan infrastruktur.

Sebaik apapun niatnya, sebuah perjuangan politik tidak akan berhasil jika tidak dilakukan secara kolektif. Perjuangan yang dilakukan secara bersama dengan orang-orang yang sama-sama sadar, dan satu perjuangan, jauh lebih baik dari berjuang sendiri-sendiri. Karena itu saya menulis buku ini. Saya ingin ada lebih banyak warga negara Indonesia yang mengetahui, dimana Indonesia sebagai negara dan sebagai bangsa saat ini berada.

Apakah kita saat ini berada di jalan yang benar? Tadi sudah saya katakan, tidak. Kita sekarang berada di jalan yang keliru. Namun belum seluruh warga negara Indonesia yang mengetahui hal ini. Itulah sebabnya diperlukan pendidikan politik. Hanya dengan pendidikan politik dapat terwujud suatu kesadaran bersama. Dengan kesadaran bersama, kita dapat turut serta dalam perjuangan besar mewujudkan cita-cita kemerdekaan Indonesia: Bangsa yang adil dan makmur.

Saudara-saudara sekalian. Perjuangan kita untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan bukanlah suatu perjuangan yang mudah. Dalam perjalanan, kita harus melawan neo-kolonialisme, melawan sistim kapitalisme global dan para bonekanya. Kita harus melawan mereka-mereka yang ingin Indonesia selalu lemah, selalu tergantung barang dan jasa yang mereka hasilkan. Kita harus melawan mereka-mereka yang melemahkan pertanian kita, dan juga industri pengolahan dan industri dasar kita.

Padepokan Garudayaksa

Kalau kita pelajari sejarah bangsa-bangsa, kita dapat mengambil kesimpulan, bahwa tidak ada perubahan besar yang terjadi tanpa didorong oleh perjuangan politik. Sebuah perjuangan politik tidak akan bisa besar, berkelanjutan dan berhasil tanpa pendidikan politik yang dilakukan secara terus menerus.

Karena itulah, dalam perjalanan perjuangan politik saya, saya memutuskan untuk membangun Padepokan Garudayaksa di Hambalang. Sebuah kawah Candradimuka yang terbuka untuk semua warga negara Indonesia kader Partai GERINDRA yang terpenggil untuk berjuang mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur.

Sejak tahun 2011 sampai dengan awal tahun 2017, sudah puluhan ribu kader bangsa yang mengikuti pelatihan kebangsaan bersama saya di Padepokan Garudayaksa. Namun untuk membangun kesadaran bangsa, menjalankan pelatihan di Hambalang saja tidak cukup. Karena itu, melalui buku ini saya sekarang menuliskan pemahaman-pemahaman dan gagasan-gagasan saya, serta membagikan data-data yang ada soal negara kita.

Besar harapan saya melalui buku Paradoks Indonesia ini, kita dapat membangun kesadaran bersama untuk memperkuat perjuangan besar kita membangun Indonesia yang kuat, terhormat dan sejahtera.

Perkembangan PDB Nominal 1985 ke 2015

Tiongkok
naik **35,5x**

Angka PDB 1985: \$ 309,4 miliar
PDB 2015: \$ 11.008 miliar

Singapura
naik
15,3x

Angka PDB 1985: \$ 19,1 miliar
PDB 2015: \$ 292,7 miliar



Indonesia
naik
10,1x

Angka PDB 1985: \$ 85,2 miliar
PDB 2015: \$ 861,9 miliar



* Angka Produk Domestik Bruto (PDB) nonimal dari Bank Dunia, 2016
Perbandingan 1985 & 2015 dihitung editor

Setelah 70 Tahun Lebih Merdeka, Kita Menuju Negara Gagal

Indonesia kaya akan sumber daya alam dan sumber daya manusia, tetapi rakyat Indonesia saat ini hidup dalam ketimpangan dan kemiskinan. Kondisi inilah yang saya sebut sebagai Paradoks Indonesia.

Ekonomi Kita Sakit Karena Salah Urus

Kalau kita mau tahu apakah pencapaian ekonomi kita selama 30 tahun terakhir sudah baik atau belum, kita harus bandingkan dengan pencapaian ekonomi negara lain. Misalkan, kita bisa bandingkan pencapaian kita dengan Tiongkok, dan negara tetangga kita Singapura.

Perbedaan besar ekonomi atau pendapatan domestik bruto (PDB) Tiongkok, pada periode 30 tahun sejak 1985 sampai 2015, adalah 35 kali lipat. Pada tahun 1985, PDB Tiongkok adalah \$ 309 miliar – angka ini naik ke \$ 11.008 di tahun 2015. Sebagai perbandingan, dalam periode yang sama, besar ekonomi Singapura tumbuh 15 kali lipat. Besar ekonomi Indonesia hanya tumbuh 10 kali lipat.

Bagaimanakah caranya, ekonomi Tiongkok yang pada tahun 1985 hanya 3,6 kali lebih besar dari ekonomi Indonesia, tumbuh begitu pesat sehingga 30 tahun kemudian ekonomi Tiongkok bisa 12,7 kali lebih besar dari ekonomi Indonesia?

Menurut kajian banyak ahli ekonomi, pertumbuhan ekonomi Tiongkok bisa begitu cepat karena Tiongkok secara sungguh-sungguh mengimplementasikan prinsip-prinsip *state capitalism*, atau kapitalisme negara. Artinya, seluruh cabang produksi penting yang menguasai hajat hidup orang banyak, dan seluruh sumber daya alam dikuasai oleh negara.

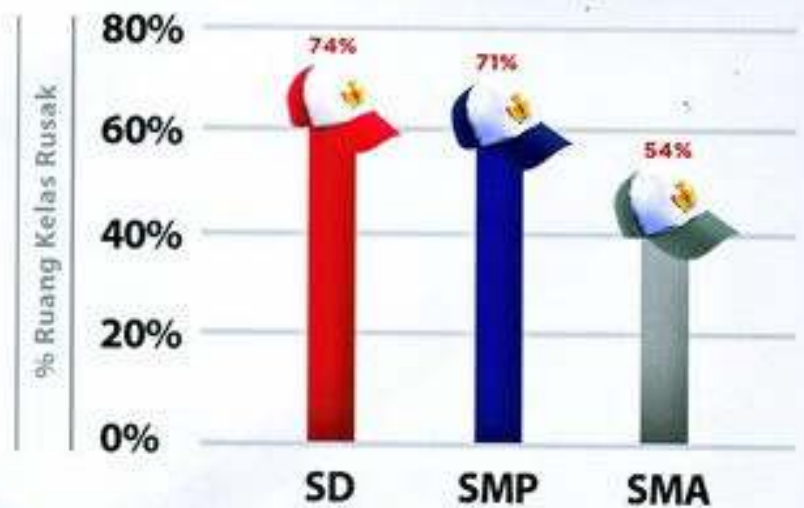


2 dari 3 Ruang Kelas RUSAK



74% ruang kelas SD, 71% ruang kelas SMP, dan 54% ruang kelas SMA dalam kondisi rusak*. Kondisi rusak menghambat kegiatan belajar mengajar dan prestasi pelajar kita.

* Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2016



Pendidikan

Kualitas Pendidikan

No. 65
dari 73

Kemampuan membaca, matematika dan sains anak Indonesia ranking 65 dari 73 negara di survei PISA* tahun 2015.

Survei PISA adalah indikator kualitas pendidikan di negara maju. Saat ini pelajar Indonesia 'under-perform' di kemampuan berbahasa, matematika dan sains.

'Underperform' dalam berbahasa artinya pelajar tidak mampu menemukan gagasan utama dalam teks. Dalam sains, artinya pelajar tidak menguasai teori-teori dasar dan tidak mampu menjelaskan hasil kalkulasinya. Dalam sains, artinya pemahaman ilmu pengetahuan yang dimiliki pelajar terbatas sehingga hanya dapat diaplikasikan di situasi yang familiar atau telah diketahui.

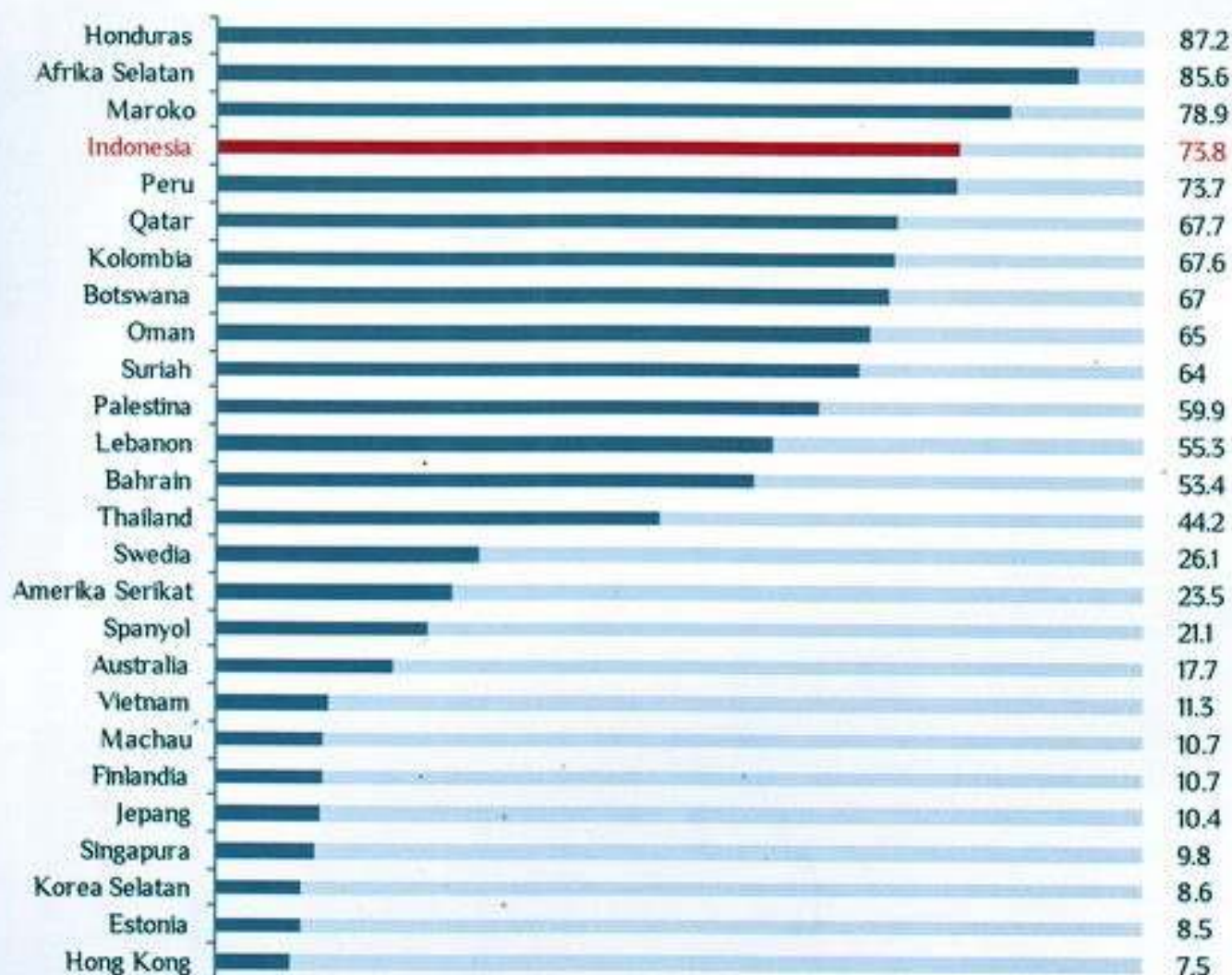
* Programme for International Student Assessment



Indonesia

Termasuk yang Terburuk Nilai Matematika dan Sains

Persentase anak 15 tahun dengan nilai tes matematika dan sains International PISA di bawah kemampuan standar.



73.8% anak Indonesia berusia 15 tahun mendapatkan nilai di bawah kemampuan standar dalam tes matematika dan sains internasional PISA. Peringkat kelima terburuk dari 82 negara yang mengikuti tes.

Di Tiongkok, pengelolaan cabang-cabang produksi penting dan sumber daya alam dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan seluruh BUMN Tiongkok dikuasai penuh oleh negara. Tiongkok menjadikan BUMN sebagai ujung tombak pembangunan ekonomi negaranya. Sebagai contoh, pada tahun 1984 Tiongkok mendirikan Industrial and Commercial Bank of China (ICBC). 33 tahun kemudian, ICBC adalah bank terbesar di dunia dan 100% dimiliki oleh Pemerintah Tiongkok.

Sementara itu, kita, walaupun bunyi dari Pasal 33 UUD 1945 hampir sama dengan prinsip kapitalisme negara ala Tiongkok, dalam mengelola cabang-cabang produksi penting yang menguasai hajat hidup orang banyak dan sumber daya alam, kita malah banyak menyerahkan pengelolaan ekonomi kita ke mekanisme pasar. Dengan kata lain, kita tidak secara sungguh-sungguh menjalankan Pasal 33 UUD 1945, sementara Tiongkok menjalankannya.

Inilah sebabnya saya mengatakan, ekonomi kita sakit. Sakitnya adalah karena kita telah salah urus. Pengelolaan ekonomi Indonesia saat ini tidak sesuai dengan amanat sistim ekonomi Pasal 33. Malah, saat ini kita terperangkap dalam sistim ekonomi oligarki – baik di tingkat nasional dan juga di banyak tingkat daerah.

Dalam sistim oligarki, perekonomian negara dikuasai oleh segelintir orang-orang super kaya. Mereka sering juga disebut sebagai 'para oligark'. Dengan uang, mereka memiliki kekuasaan yang berlebihan. Kekuasaan yang menentukan kehidupan ekonomi dan politik dari bangsa kita. Mereka bisa menentukan siapa-siapa saja yang boleh impor gula, daging, beras, jagung dan komoditas lainnya. Mereka juga bisa menentukan siapa-siapa saja yang jadi pemimpin karena mereka punya kemampuan untuk jadi penyandang dana utama dalam kampanye politik. Ekonomi diatur oleh beberapa orang super kaya, bukan oleh negara.

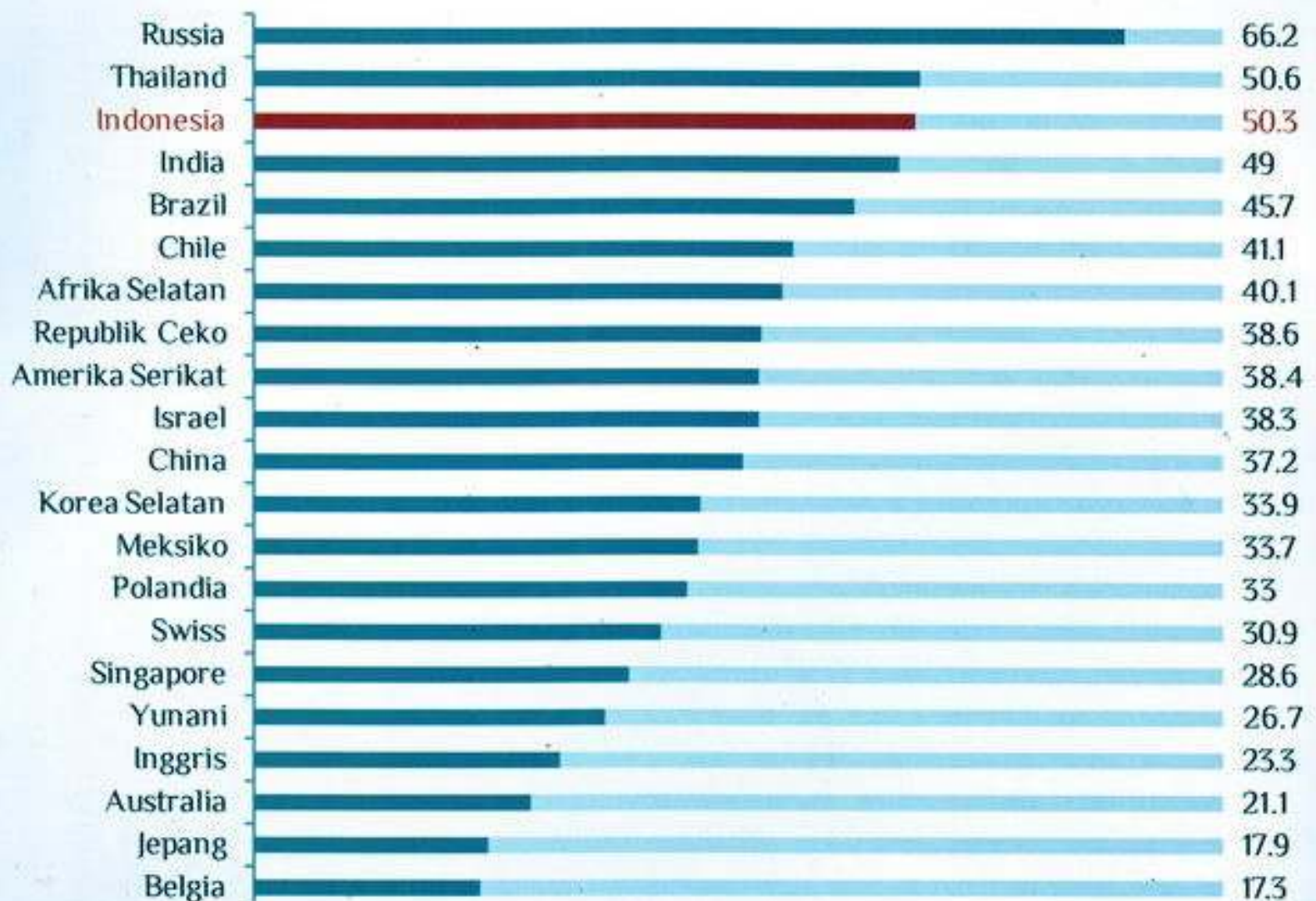
Ketimpangan kesejahteraan di Indonesia sangat luar biasa. 10% orang terkaya Indonesia menguasai sekitar 77% dari seluruh kekayaan nasional. 1% yang terkaya bahkan menguasai 50,3% kekayaan. Dalam hal ini Indonesia menempati peringkat ketiga di dunia, setara dengan Thailand (50,6%) dan hanya Rusia (66,2%) yang lebih tinggi tingkat ketimpangannya. Jika masalah ketimpangan ini dapat diatasi, tidak butuh waktu lama untuk memperbaiki masalah-masalah seperti yang ada sekarang ini dan melahirkan rakyat yang adil dan sejahtera.

Tingkat Ketimpangan

Indonesia

Termasuk yang Tertinggi di Dunia

Tingkat Distribusi Kekayaan Berbagai Negara (persen kekayaan nasional yang dikuasai oleh 1% penduduk terkaya)



Keputusan Politik Jadikan Indonesia Kaya atau Miskin

Negara kita kaya akan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Kita sebenarnya bisa menjadi negara kelas atas. Seluruh rakyat Indonesia bisa hidup sejahtera, bebas dari kemiskinan, kelaparan dan kebodohan. Sesungguhnya, inilah tujuan kita merdeka. Inilah tujuan kita bernegara. Untuk menjadi negara sejahtera.

Namun untuk mencapai tujuan itu, kita perlu mengelola kekayaan negara kita dengan baik.

Pengelolaan kekayaan negara adalah keputusan politik, baik itu di tingkat daerah atau di tingkat nasional. Keputusan-keputusan politik yang keliru akan membuat rakyat kita semakin miskin. Sebaliknya, keputusan-keputusan politik yang tepat akan membuat rakyat kita semakin sejahtera.

Karena inilah saya mau di politik. Kalau saya anggap negara kita sudah tidak ada potensi lagi, sudah tidak ada harapan untuk menjadi sejahtera, mungkin saya tidak berpolitik.

Sejak pensiun dari tentara, saya semacam geregetan. Saya melihat Indonesia begitu kaya, Indonesia begitu banyak potensi. Tinggal punya strategi yang benar, manajemen yang baik, pemerintahan yang bersih, negara kita bisa cepat bangkit dan mencapai cita-cita kemerdekaan.

Bagi saya Paradoks Indonesia adalah masalah kepemimpinan, masalah kearifan, masalah kehendak untuk mengambil keputusan-keputusan politik yang tepat.

Saya sangat optimistis, jika elit Indonesia yang mendapatkan kepercayaan untuk memimpin melalui proses demokrasi punya jiwa kepemimpinan, kearifan, dan kehendak, maka tidak butuh waktu yang lama untuk menjadikan Paradoks Indonesia bagian sejarah bangsa kita.

Situasi Utang



Jumlah Utang Luar Negeri Indonesia
Dari 7 Negara Kreditor Terbesar
(dalam Miliar \$)



Utang luar negeri lebih dari
Rp. 4.000
Triliun

Total utang luar negeri kita tahun 2016* (swasta dan pemerintah) sudah lebih dari angka \$ 323 miliar atau Rp. 4.000 triliun.

Angka ini, jika dibagi jumlah penduduk, adalah Rp. 16 juta per orang Indonesia. Singapura adalah kreditor terbesar, disusul Jepang.

* Statistik Utang Luar Negeri Indonesia (SULNI) Bank Indonesia, Agustus 2016



Utang Baru untuk
Bayar Bunga
Utang

Sejak tahun 2012, Negara harus membuat utang baru untuk membayar bunga utang yang sudah jatuh tempo karena keseimbangan primer kita defisit.

Keseimbangan primer adalah selisih dari total pendapatan negara dikurangi belanja negara di luar pembayaran bunga utang.

Keseimbangan Primer Indonesia *

Tahun	Surplus/Defisit
2010	Rp. 41,5 triliun
2011	Rp. 8,8 triliun
2012	(Rp. 52,7 triliun)
2013	(Rp. 98,6 triliun)
2014	(Rp. 93,2 triliun)
2015	(Rp. 52,7 triliun)
2016	(Rp. 105,5 triliun)
2017 **	(Rp. 109 triliun)

* Kementerian Keuangan, 2017

** Angka 2017 adalah dari APBN 2017

Sekarang Waktunya Sadarkan Kader Bangsa

Kita tidak boleh diam dan menerima dicap sebagai bangsa pengalah. Kita harus jadi bangsa pemenang. Kita tidak boleh hanya puas dikenal sebagai bangsa pembeli. Kita harus jadi bangsa pembuat. Sudah waktunya bangsa Indonesia tidak lagi dilihat sebagai bangsa yang lemah, tetapi bangsa yang kuat, bangsa yang terhormat.

Namun, dalam perjuangan 'menyembuhkan' Paradoks Indonesia, kita harus hati-hati. Kita harus bijak, dan harus arif. Saya, dan saudara semua yang seperjuangan dengan saya, tidak boleh umbar janji ke rakyat dengan rumus-rumus yang terlalu sederhana.

Saya punya sikap dasar. Setiap masalah harus saya kaji dengan lengkap, saya teliti dengan baik, dan saya nilai dari segi kepentingan nasional bangsa Indonesia.

Inilah yang saudara akan temukan di buku ini.

Lalu, saya punya prinsip, saya tidak mau mencari kesalahan orang lain.

Penting saya utarakan sekarang, sebelum saudara mulai membaca apa-apa saja yang menjadi pokok buku ini. Biarkanlah yang lalu, berlalu.

Buku ini utamanya adalah tentang masa depan kita. Masa depan bangsa Indonesia. Buku ini bukan tentang masa lalu kita. Perjuangan kita bukanlah untuk menyalahkan mereka yang sekarang bertugas, dan mereka yang sudah purnatugas.

Pertumbuhan Ekonomi Harus Dua Digit

Saudara, kalau saudara hanya bisa mengambil satu hal dari buku ini, berikut adalah hal tersebut. Kita sebagai bangsa harus segera capai pertumbuhan ekonomi dua digit, atau pertumbuhan di atas angka 10% secara berkelanjutan. Kenapa? Karena hanya dengan pertumbuhan dua digit selama 10 tahun berturut-turut, yang diawali dengan pertumbuhan rata-rata 7% selama 5 tahun, Indonesia bisa keluar dari suatu kondisi yang dinamakan *middle income trap*.

Middle income trap, atau perangkap negara menengah adalah kondisi dimana suatu negara menengah akan terus menjadi negara menengah. Ini dilihat dari angka produk domestik bruto dibagi dengan jumlah populasi, atau PDB per kapita. Saat ini angka PDB per kapita kita adalah \$ 3.346². Untuk 'naik kelas' jadi negara berpenghasilan atas, PDB per kapita kita harus mencapai angka \$ 13.000.

Artinya, jika pertumbuhan ekonomi kita hanya di kisaran 4% atau 5%, kita sebenarnya mengalami kegagalan. Ibarat badan, jika pertumbuhan kita tidak di atas angka 10% artinya kita gagal tumbuh menjadi orang dewasa yang kuat dan dapat bersaing dengan bangsa-bangsa maju.

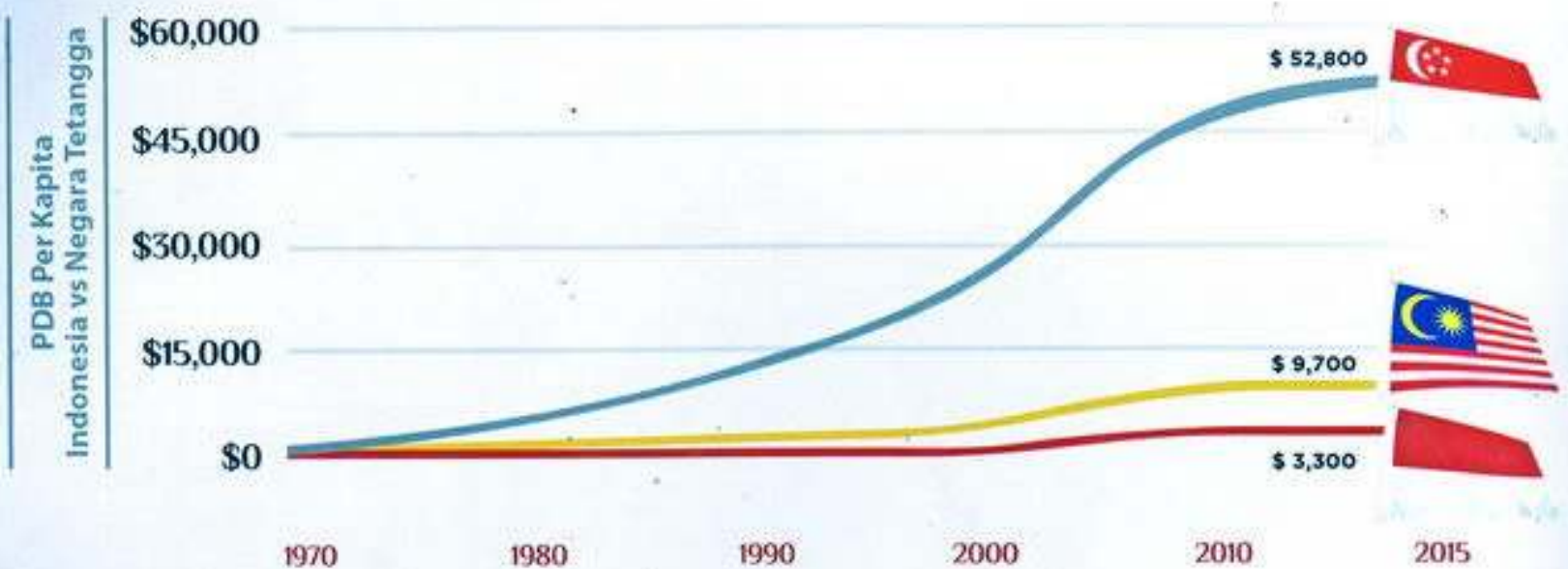
Ini adalah persoalan pokok yang harus kita sadari sebagai bangsa. Pertumbuhan ekonomi di bawah 10% adalah kegagalan karena sama saja kita berjalan di tempat. Tidak bisa kita berbangga jika negara kita tidak keluar dari perangkap negara menengah, dari *middle income trap*.

Negara lain yang sudah maju boleh saja tumbuh di bawah 5%. Indonesia tidak bisa. Kita masih punya pekerjaan besar: Kita harus segera lepas landas mengejar kemajuan. Kita tidak boleh berpuas diri berjalan di tempat.

² Bank Dunia, 2015

Harus Tumbuh 2X Lipat

PDB per Kapita Kita
1/3 Malaysia



Pendapatan Domestik Bruto (PDB) per kapita kita saat ini ada di angka \$ 3.300. Malaysia ada di angka \$ 9.700, dan Singapura ada di angka \$ 52.800.

Artinya, PDB orang Malaysia 3x di atas kita. PDB orang Singapura 15x di atas kita.*

* Bank Dunia, 2016

kita harus segera tumbuh rata-rata 7% dalam 5 tahun 'pertama'

Untuk Jadi Negara Berpenghasilan Atas

PDB per Kapita
Kita Harus Mencapai
\$13.000
per Tahun

Untuk naik kelas jadi “negara berpenghasilan atas”, PDB per kapita kita harus lebih tinggi dari \$13.000.

Untuk mencapai ini, ekonomi kita harus segera tumbuh rata-rata 7% dalam 5 tahun, dan setelahnya tumbuh dua digit (minimal 10%) per tahun selama 10 tahun.*

* Hitungan Badan Kajian Kebijakan Strategis Partai Gerindra, 2017



setelahnya minimal ekonomi kita harus tumbuh 10%

Untuk Jadi Negara Maju Kita Harus Selesaikan Dua Tantangan Besar

Angka PDB per kapita kita saat ini 1/3 dari Malaysia. 1/15 Singapura. Ya, saat ini orang Malaysia rata-rata 3 kali lebih sejahtera dari orang kita. Orang Singapura 15 kali lebih sejahtera dari orang Indonesia.

Kalah dari Malaysia dan Singapura bukan takdir kita. Kita harus mengejar kemajuan Malaysia. Kita harus mengejar kesejahteraan Singapura. Hanya dengan tumbuh di atas 10% setiap tahun selama beberapa tahun, negara kita bisa lepas landas menuju tujuan kita bernegara: Indonesia yang rakyatnya sejahtera.

Jika kita tidak bisa tumbuh di atas 10% dan melepaskan diri dari *middle income trap*, kita harus mengakui kenyataan pahit bahwa kita gagal dalam bernegara.

Saudara mungkin bertanya, sebenarnya apakah bisa kita tumbuh dua kali lebih cepat dari apa yang kita alami sekarang (rata-rata pertumbuhan 5%)? Apakah negara kita punya modal dasar untuk tumbuh di atas 10% selama 10 tahun berturut-turut?

Saya percaya jawabnya bisa.

Kuncinya, untuk bisa mencapai pertumbuhan dan kesejahteraan yang kita harapkan di mana bangsa kita masih lemah, pemerintah tidak boleh ragu-ragu untuk turun tangan dan membantu pertumbuhan ekonomi.

Bukan ekonomi diserahkan ke negara, bukan.

Kalau ada yang sudah kuat, ya silakan. Tapi, ada beberapa hal di ekonomi kita yang tidak bisa diserahkan ke swasta.

Sampai sekarang saja, di beberapa negara ada hal-hal yang tetap akan dikuasai oleh, atau minimal diatur ketat oleh pemerintah. Negara sebagai pelopor ekonomi. Pemerintah yang

pelopor, pemerintah yang membuka jalan, pemerintah yang berpihak, pemerintah yang memberdayakan.

Hanya dengan demikian, kita bisa mencapai pertumbuhan ekonomi di atas 10% secara berkelanjutan. Hanya dengan demikian, kita bisa wujudkan negara yang dicita-citakan oleh pendiri-pendiri bangsa kita.

Seperti apa cita-cita mereka?

Founding fathers kita membayangkan dan memiliki mimpi, Indonesia yang merdeka adalah Indonesia yang rakyatnya sejahtera. Yang rakyatnya, dari mana pun ia berasal, warna apa pun kulitnya, agama apa pun yang ia anut, suku mana pun asalnya, dan kondisi bagaimana pun yang ia harus menerima secara fisik, tidak hidup tertinggal, tidak hidup telantar, dan punya kesempatan untuk hidup dengan layak.

Namun, agar negara kita bisa menjadi pelopor ekonomi, agar ekonomi tumbuh double digit, demi mewujudkan cita-cita bung Karno dan bung Hatta, kita harus menyelesaikan terlebih dahulu dua masalah besar.

Pertama, kita harus hentikan aliran kekayaan negara kita yang ke luar negeri karena kebijakan ekonomi yang tidak tepat. Jika kita terus biarkan, maka negara kita tidak akan pernah punya modal untuk jadi pelopor ekonomi.

Kedua, kita harus pastikan demokrasi kita tidak lagi dikuasai oleh pemodal besar. Jika tidak, tidak mungkin kita memiliki lapis kepemimpinan yang dapat berdiri tegak dan mengambil keputusan-keputusan politik yang tepat.

Bukan Mau atau Tidak, Tapi Harus

Mengalirnya kekayaan kita ke luar negeri, dan demokrasi kita yang dikuasai oleh pemodal besar adalah dua masalah besar, dua *grand challenges* yang harus bisa kita selesaikan. Kedua hal ini adalah tantangan generasi kita.

Niscaya, pada waktunya sejarah akan menilai generasi kita dari kemampuan kita, usaha kita dalam menyelesaikan kedua tantangan ini. Jika kita benar ingin mewujudkan Indonesia yang sejahtera, mau tidak mau kita harus hadapi dan selesaikan kedua *grand challenges* ini.

Untuk menghadapi kedua *grand challenges* ini, kita tidak boleh minder. *Minderwaardigheids*, cerita orang Belanda, *inferiority complex*. Kita harus berani, harus percaya diri, harus memiliki mental tidak mudah menyerah.

Sebagai contoh, ingatlah, bagaimana bisa Malaysia punya mobil nasional, sedangkan kita tidak punya mobil nasional? Malaysia negara 25 juta orang, Indonesia 250 juta orang. Mereka berani bikin mobil nasional, kok kita tidak?

Mungkin kita dididik untuk takut. Kita dididik untuk tidak berani. Ketika ada orang kita yang berani, elite kita malah mempertanyakan, yakin benar mampu atau tidak?

Menurut saya, kita harus mampu! Ingat bagaimana kita dulu mampu bikin Borobudur? Bagaimana dulu kita mampu mengusir penjajah? Rakyat Surabaya dengan senjata seadanya mampu mengusir Inggris. Pemenang Perang Dunia kedua dilawan oleh arek-arek Suroboyo, kalah mereka. Janganlah kita bertanya-tanya, "Mampu? Apa mampu? Bisa tidak dilaksanakan?" Lho, kok tanya bisa? Ini bukan masalah bisa atau tidak bisa, ini masalah harus kita laksanakan. Kita harus hadapi dan selesaikan dua masalah besar yang ada di hadapan kita. Dan dengan segera.

Tantangan Besar # 1:

Kekayaan Indonesia Mengalir ke Luar

Kekayaan Kita Mengalir ke Luar

Penyakit terparah dari tubuh ekonomi Indonesia saat ini adalah mengalir ke luarnya kekayaan nasional dari wilayah Indonesia.

Uang bagi suatu negara, kekayaan bagi suatu bangsa, adalah sama dengan darah. Saat ini tubuh bangsa Indonesia berdarah, dan ternyata berdarahnya sudah puluhan tahun. Jika kita hitung sejak zaman penjajahan, maka sudah ratusan tahun.

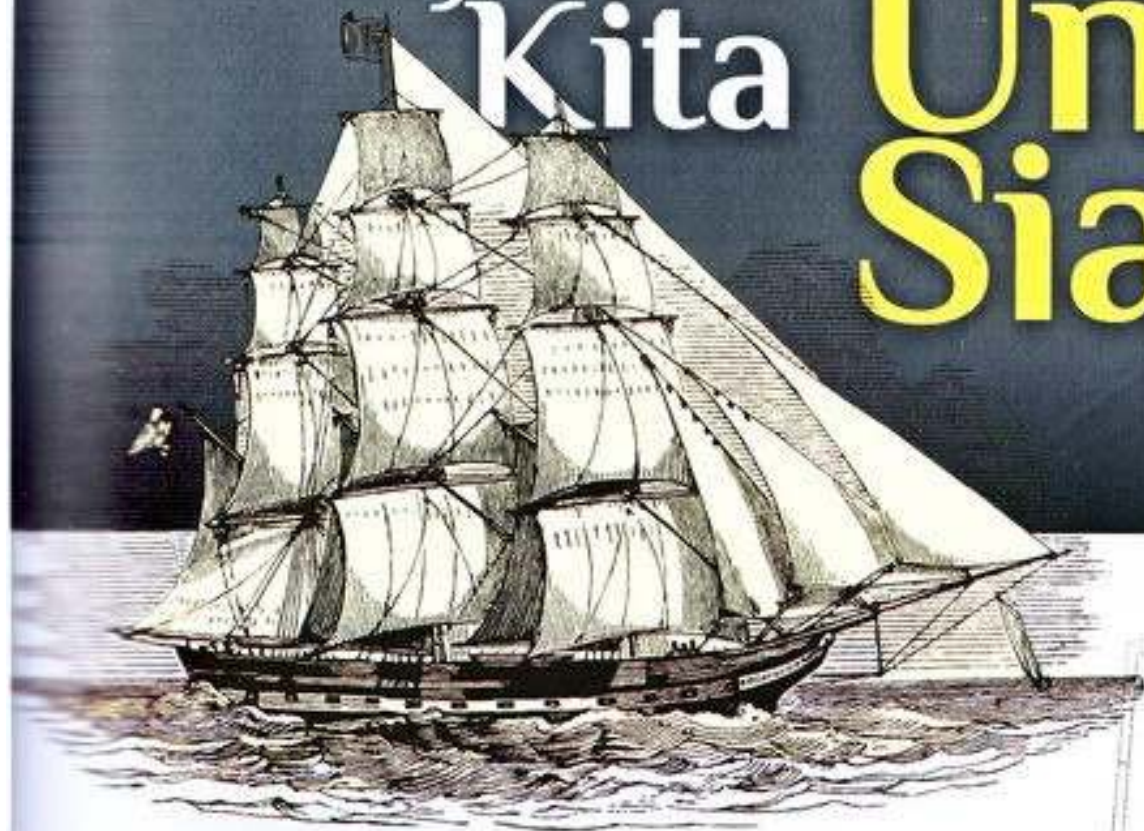
Saudara yang mengikuti pemikiran saya sejak lama tentu mengetahui bahwa sudah bertahun-tahun saya sampaikan, kekayaan Indonesia tiap tahun mengalir ke luar Indonesia. Kekayaan Indonesia tidak tinggal di Indonesia.

Ini artinya, kita semua, seluruh bangsa Indonesia, saat ini sedang kerja rodi. Kita sedang kerja bakti untuk orang lain. Kita bekerja keras, di Indonesia, untuk memperkaya bangsa lain. Kita seperti indekos di rumah sendiri.

Parahnya, banyak dari kita tidak menyadari hal ini. Bagi sedikit yang mengetahui, mereka diam atau menyerah pada keadaan. Sebagian lagi menjadi penyalur kekayaan kita yang mengalir ke luar.

Ada beberapa indikator ekonomi yang dapat kita jadikan acuan untuk melihat bagaimana kekayaan Indonesia mengalir ke luar negeri. Yang pertama, adalah neraca perdagangan negara kita, terutama kepemilikan dari perusahaan-perusahaan yang melakukan ekspor. Yang kedua, adalah data simpanan di bank-bank luar negeri yang merupakan milik pengusaha dan perusahaan Indonesia, serta perusahaan asing yang mengambil untung di Indonesia.

Kekayaan Kita Untuk Siapa?



Taksiran Keuntungan Belanda
Dari Menjajah Indonesia
Periode 1878-1941 (63 tahun):

**54 Miliar Gulden, atau Rp. 5.174 triliun
Sampai Dengan Rp. 66.599 triliun**

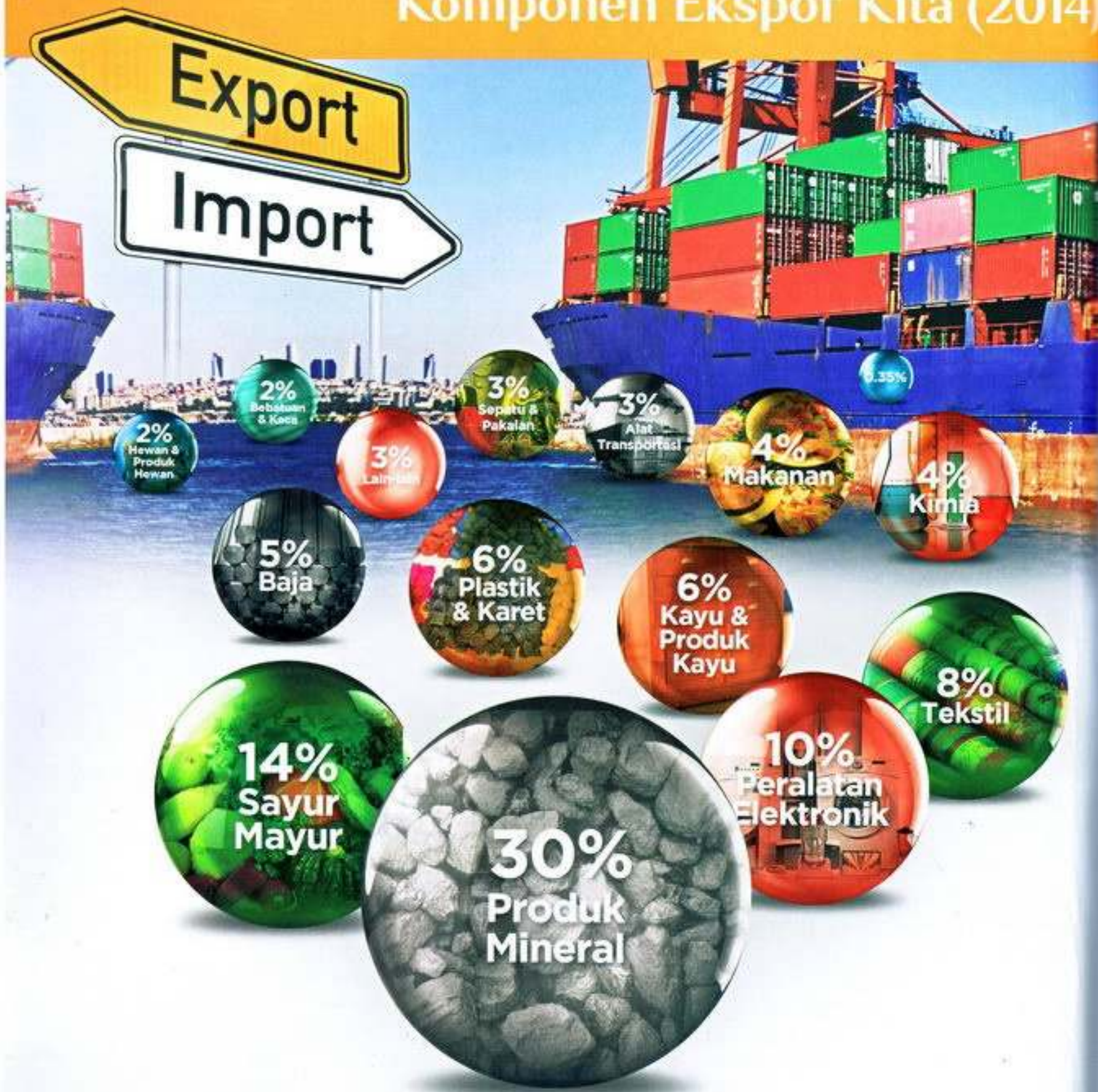
Ketika kita membuka buku sejarah Indonesia, kita sering membaca “kekayaan Indonesia diambil penjajah”. Tetapi, jarang kita membaca ulasan berapa banyak kekayaan Indonesia yang diambil oleh bangsa penjajah.

Peneliti dari Chulalongkorn University menaksir, dengan membuka catatan resmi Pemerintah Belanda tahun 1878 sampai 1941 soal keuntungan ekspor dari Indonesia, tabungan orang Belanda di Indonesia serta anggaran Belanda untuk menjajah Indonesia, keuntungan Belanda pada periode 1878-1941 adalah 54 miliar Gulden. Pada waktu itu, jumlah ini setara dengan \$ 22 miliar.

Tergantung cara konversi yang digunakan, \$ 22 miliar pada waktu itu setara dengan \$ 398 miliar atau Rp. 5.174 triliun sampai \$ 5.123 miliar atau Rp. 66.599 triliun uang sekarang. Walau jumlah ini besar, angka sebenarnya pasti lebih tinggi karena banyak perdagangan yang tidak tercatat oleh Pemerintah Belanda. Angka ini juga belum menghitung mengalir keluarnya kekayaan Indonesia di periode penjajahan sebelum tahun 1878.



Komponen Ekspor Kita (2014)



30% Nilai Ekspor Kita Produk Mineral

* Harvard University: Atlas of Economic Complexity, 2014 (HS4 low detail)

Komponen Impor Kita (2014)



Perdagangan Indonesia

Saya mulai menyimak tabel neraca ekspor-impor Indonesia dari tahun 1997. Pada saat itu saya sedang berada di Yordania, dan saya ingin mengetahui bagaimana sebenarnya situasi ekonomi kita. Ternyata, sekarang, kalau kita lihat neraca ekspor-impor Indonesia³ dari tahun 1997 ke tahun 2014, selama 17 tahun, total nilai ekspor kita mencapai angka \$ 1.900 miliar. Kurang lebih Rp. 24.700 triliun jika menggunakan kurs Rp. 13.000. Ini jumlah yang cukup besar.

Namun perlu kita ingat, ini adalah angka yang tercatat dalam dokumen ekspor. Belum tentu sama nilai ekspor yang sebenarnya. Berdasarkan pengalaman banyak pelaku ekspor yang berdiskusi dengan saya, dan hasil penelitian lembaga riset kredibel⁴, angka ini bisa keliru 20%, bisa 30%, bahkan bisa 40%.

Setelah saya selidiki, banyak uang hasil keuntungan kita tidak tinggal di dalam negeri. Karena itu, saya tidak begitu kaget ketika Menteri Keuangan mengatakan, pada Agustus 2016 bahwa ada Rp. 11.400 triliun uang milik pengusaha dan perusahaan Indonesia yang parkir di luar negeri⁵. Jumlah yang 5x lebih besar dari APBN kita saat ini, dan kurang lebih sama dengan pendapatan domestik bruto (PDB) kita.

Selain adanya ekspor yang tidak dilaporkan oleh pengusaha kita, sebagian besar keuntungan ekspor Indonesia masuk ke perusahaan-perusahaan asing. Ini terjadi karena sebagian besar dari nilai ekspor kita dikuasai oleh perusahaan-perusahaan asing⁶. Sekarang 94% transportasi barang untuk ekspor dan impor dikuasai oleh armada asing⁷.

Perusahaan-perusahaan ini menjual hasil alam Indonesia. Mereka menggunakan jalan, pelabuhan, dan keringat orang Indonesia. Tetapi ketika mereka mendapatkan untung, mereka tidak menyimpan keuntungan mereka di Indonesia. Selain itu, ada juga pengusaha-pengusaha Indonesia yang melakukan

³ Badan Pusat Statistik, 2017

⁴ Global Financial Integrity, 2015

⁵ Kementerian Keuangan, 2016

⁶ Indonesia for Global Justice, 2013

⁷ Lembaga Penjamin Simpanan, 2015

usaha ekspor, dan melakukan usaha di Indonesia, yang setelah untung, malah memindahkan sebagian keuntungan mereka ke luar negeri.

Ini masalah besar untuk bangsa kita. Jika uang ini tidak tinggal di Indonesia, maka tidak dapat digunakan untuk membangun Indonesia. Bank-bank tidak punya cukup uang untuk memberikan kredit yang bisa membangkitkan ekonomi kita. Tidak ada *multiplier effect* yang bisa membangkitkan gairah ekonomi Indonesia.

Apakah ini masalah yang baru? Jika kita lihat mundur ke belakang, ternyata mengalirnya kekayaan Indonesia ke luar negeri telah terjadi selama ratusan tahun. Ini adalah masalah sistemik yang perlu kita ketahui dan hadapi.

Dari tahun 1960. Kalau kita mundur ke belakang, tahun 1950, kecuali di tengah pergolakan-pergolakan, ekspor-impor Indonesia tetap untung. Tapi untungnya untuk siapa? Kalau kita buka pidato Bung Karno, "Indonesia Menggugat", dan kita pelajari, beliau bicara persis sama. Hanya kalau saya pakai angka dolar AS dan Rupiah, beliau pakai angka Gulden. Intinya adalah mengalirnya kekayaan kita ke luar negeri.

Kemarin saya baca sebuah penelitian yang membuka catatan resmi Pemerintah Belanda tahun 1878 sampai 1941 soal keuntungan ekspor Indonesia, tabungan orang Belanda di Indonesia serta anggaran Belanda untuk menjajah Indonesia. Penelitian ini menemukan keuntungan Belanda selama 63 tahun adalah 54 miliar Gulden. Jumlah ini, pada waktu itu sama dengan \$ 22 miliar. \$ 22 miliar waktu itu, jika disetarakan dengan uang sekarang, sama dengan \$ 398 miliar, atau sampai \$ 5.123 miliar. \$ 5.123 miliar itu artinya Rp. 66.599 triliun⁸.

Mengalirnya kekayaan kita ke luar negeri atau *capital outflow* inilah yang dipermasalahkan oleh Bung Karno. Saya, Prabowo Subianto, yang bukan sarjana ekonomi, menyebut fenomena ini "*net outflow of national wealth*". Mengalir ke luarnya kekayaan nasional dalam jumlah yang keterlaluan.

⁸ Chulalongkorn University, 2012



“Net Outflow of National Wealth”

**(Mengalir Keluarnya
Kekayaan Nasional)**

Negara-Negara Tujuan Ekspor Kita (2015)



25% Ekspor Kita Ke Jepang & RRT

* MIT Atlas of Economic Complexity, 2016

Negara-Negara Asal Impor Kita (2015)



14% Impor Kita dari Singapura

* MIT Atlas of Economic Complexity, 2016

Uang Kita Ada di Mana?



Tahun	Ekspor (Milliar \$)	Impor (Milliar \$)	Neraca (Milliar \$)
1997	53	41	12
1998	48	27	21
1999	48	24	24
2000	62	33	29
2001	56	30	26
2002	57	31	26
2003	61	32	29
2004	71	46	25
2005	84	56	28
2006	100	61	39
2007	114	74	40
2008	137	129	8
2009	116	96	20
2010	157	135	22
2011	203	177	26
2012	190	191	-1
2013	182	186	-4
2014	176	178	-2

Rp. 11.000.000.000.000.000.000 Ada di Luar Negeri

Di tahun 2016, Kementerian Keuangan mengungkapkan bahwa ada lebih Rp 11.000 triliun uang milik pengusaha dan perusahaan Indonesia yang disimpan di luar negeri. Jumlah ini 5x lebih besar dari APBN kita tahun 2016.

Padahal, seharusnya uang ini disimpan di Indonesia, agar dapat menjadi modal nasional pembangunan Indonesia.

* Kementerian Keuangan, 2016

“Jumlah ini (Rp. 11.000 triliun) adalah akumulasi dari uang yang diinapkan di luar negeri sejak 1970.”

* Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, 2016



Banyak Uang Kita Ada di Bank-Bank Asing

Indikator lain yang menunjukkan mengalirnya kekayaan kita ke luar negeri adalah jumlah simpanan di bank-bank luar negeri yang milik orang Indonesia.

Jumlahnya dalam persentase memang relatif sedikit, hanya sekian persen dari uang yang dikelola oleh perusahaan-perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia. Namun jumlahnya dalam angka riil cukup besar, dan data ini telah kita ketahui karena telah diungkap oleh Pemerintah.

Menurut Pemerintah, pada akhir 2016 ada Rp. 11.000 triliun kekayaan orang Indonesia yang disimpan di bank-bank di luar negeri. Mengingat APBN atau anggaran belanja negara kita saat ini hanya Rp. 2.000 triliun, jumlah ini lebih dari 5 kali APBN kita.

Padahal, jumlah yang lebih dari 5 kali lipat anggaran negara kita ada di luar negeri ini, jika ada di dalam negeri, bisa disalurkan oleh bank-bank Indonesia untuk membiayai usaha-usaha Indonesia. Bisa disalurkan untuk membangun infrastruktur, dan menjadikan BUMN-BUMN Indonesia perusahaan-perusahaan kelas dunia.

Indikator lain yang cukup miris bagi saya, adalah besarnya aset bank-bank di negeri tetangga, sebagai contoh di Singapura, dibandingkan dengan bank-bank terbesar Indonesia.

Jumlah penduduk Singapura 50 kali lebih sedikit dari kita. Besar ekonomi Singapura yang hanya \$ 300 miliar juga 3 kali lebih kecil dari ekonomi kita. Namun bank terbesar mereka bisa 5 kali lebih besar dari bank terbesar di Indonesia, Bank Mandiri.

Selain itu, jumlah aset di tiga bank terbesar Singapura hampir 6 kali lebih besar dari apa yang dikuasai oleh tiga bank terbesar Indonesia. Apakah hal semacam ini logis?

Negara dengan jumlah penduduk hanya 5 juta orang, jumlah simpanan di bank-banknya 6 kali lebih besar dari jumlah

simpanan di bank-bank kita, negara dengan penduduk sebanyak 250 juta orang, jumlah penduduk terbesar keempat di dunia. Secara matematika, hal ini sebenarnya tidak mungkin. Kita patut bertanya, siapakah pemilik uang yang tersimpan di bank-bank Singapura itu? Dari mana asalnya uang simpanan itu?

Indikator ini, ditambah indikator neraca ekspor-impor kita dan cadangan devisa kita, mengindikasikan bahwa kekayaan kita tidak tinggal di Republik Indonesia.

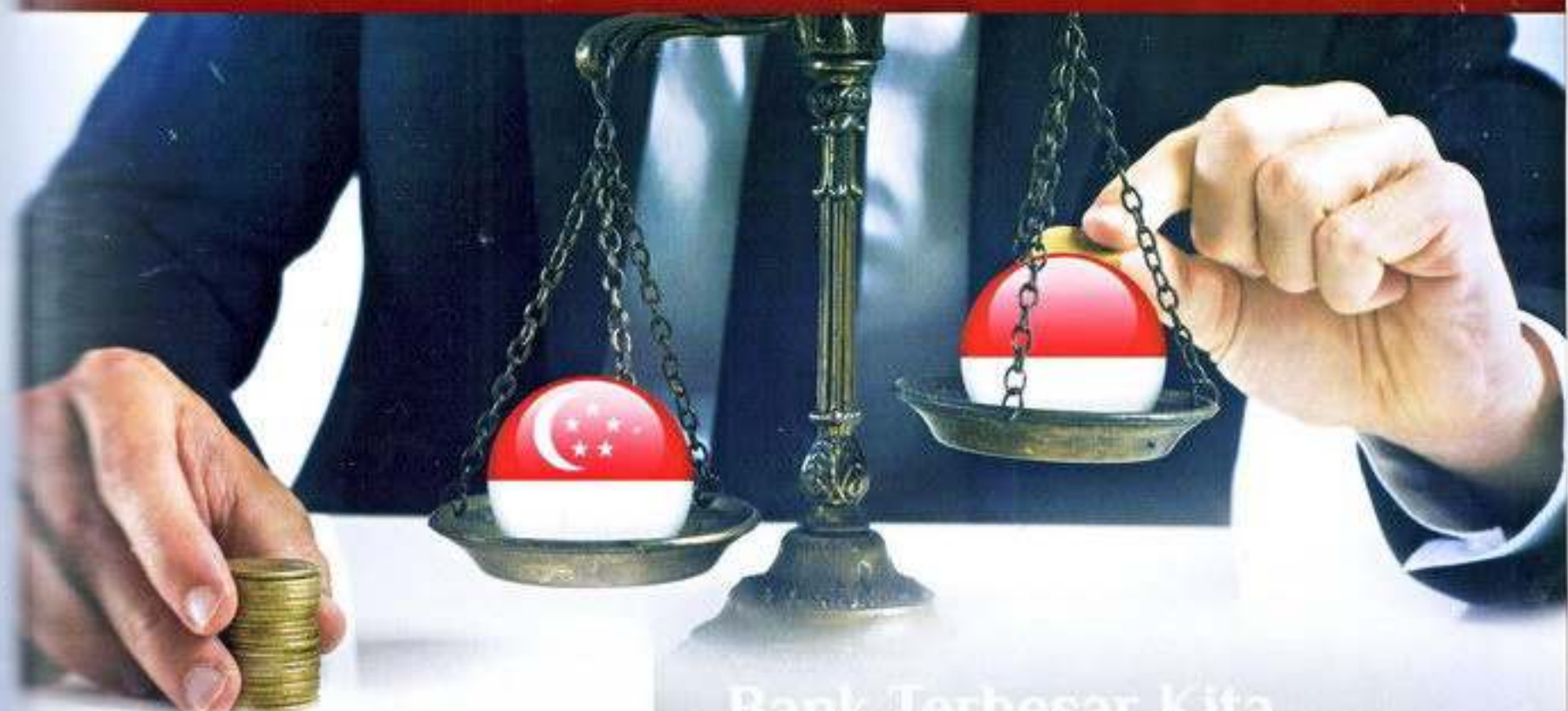
Apa artinya?

Artinya, kita sekarang hanya menjadi pesuruh bangsa lain. Kita hanya menjadi bangsa kacung.

Ini kita belum bicara mengenai uang yang dikuasai oleh perusahaan asing, warga negara asing, dari hasil berusaha di Indonesia yang disimpan di luar negeri. Dari produk-produk asing, yang kita impor dan yang setiap hari dibeli dan digunakan oleh ratusan juta rakyat Indonesia.

Mohon maaf, saya harus bicara keras. Menjadi bangsa kacung bukan cita-cita kita. Bukan juga cita-cita pendiri-pendiri bangsa kita. Untuk apa kita punya negara, kalau kita hanya jadi bangsa kacung orang lain? Hanya untuk memperkaya bangsa lain.?

Rp. 2.600 triliun di Singapura



Cadangan Devisa Kita 4/10 Singapura

Cadangan devisa kita pada akhir 2016 ada di angka \$ 105 miliar. Cadangan devisa Singapura \$ 251 miliar, Malaysia \$ 95 miliar. Artinya cadangan devisa Singapura 2,5x lebih besar dari cadangan kita.

**Bank Dunia, 2016



Bank Terbesar Kita 1/5 DBS Singapura



Menurut investigasi Reuters pasca terbitnya kebijakan Tax Amnesty, \$ 200 miliar dari \$ 470 miliar yang ada di bank-bank swasta Singapura adalah milik orang atau perusahaan Indonesia*. \$ 200 miliar setara dengan Rp. 2.600 triliun atau lebih besar dari APBN 2016.

*Reuters, 2016

Elite Indonesia Terlalu Banyak Bohong

Saya pernah ditanya, bagaimana dengan mata uang Republik Indonesia yang lemah? Bagaimana harga-harga bahan pokok yang tidak menentu? Jawabannya sebetulnya sangat sederhana, tapi mungkin banyak elite Indonesia dan banyak pakar ekonomi Indonesia tidak mau jujur kepada rakyat.

Saya sudah katakan berkali-kali bahwa kekayaan Indonesia tidak tinggal di Indonesia. Kita tidak memiliki kekayaan.

Kita justru mengizinkan kekayaan kita mengalir ke luar negara kita. Bagaimana bisa ekonomi kita kuat? Bagaimana bisa harga-harga cukup memadai untuk rakyat kita, kalau kekayaan kita mengalir ke luar?

Maaf kalau Prabowo Subianto bicara agak seperti ini. Ada yang bilang pada Prabowo, "Pak Prabowo, mbok bicara yang baik-baik saja." Ada yang mengatakan, "Pak Prabowo, jangan bicara terlalu keras. Bicara yang halus-halus saja."

Selama 10 tahun terakhir, setiap saya ada kesempatan untuk memaparkan data-data, saya tanyakan kepada mereka yang menyimak. "Kalian mau saya bicara baik-baik, atau saya bicara apa adanya? Kalian mau saya bicara halus, baik-baik, tapi kenyataannya tidak baik, atau saya bicara apa adanya, saudara-saudara sekalian?"

Mereka menjawab, "bicara apa adanya saja, pak Prabowo".

Menurut saya, sudah terlalu lama elite Indonesia berbohong. Bohong kepada rakyat, bohong kepada bangsa. Dan juga bohong kepada dirinya sendiri.

Kenapa orang kecil semakin terjepit? Kenapa di Indonesia, yang kaya tambah kaya, yang miskin tambah miskin? Kenapa petani tidak senyum kalau panen? Bagaimana bisa di negara yang sudah lebih dari 70 tahun merdeka, ada guru honorer yang hanya menerima Rp. 200.000 sebulan⁹?

⁹ Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), 2016

Bagaimana bisa?

Bagaimana bisa, sebagian besar hasil keuntungan kita sebagai bangsa mengalir ke luar negeri, tetapi elit diam saja? Belasan ribu triliun Rupiah uang yang seharusnya ada di Indonesia, parkir di luar negeri, dan elit Indonesia tidak berjuang keras untuk mengembalikannya ke dalam negeri?

Pahit memang, apa yang saya katakan. Tetapi kalau setiap tahun terus ada *net outflow* kekayaan nasional kita ke luar, saya kira kita sebagai negara tidak perlu punya rencana pembangunan jangka panjang. Kita tidak perlu rencana pembangunan karena rakyat kita juga tidak akan menikmati.

Uang ini adalah sangat-sangat vital bagi pembangunan masa depan bangsa kita. Bangsa kita tidak bisa lagi kehilangan kekayaan sebesar ini tiap tahun.

Jika kita biarkan kekayaan kita terus mengalir ke luar negeri, artinya kita menerima bahwa kita sebagai bangsa dipelihara sebagai pasar dan sebagai buruh oleh sistem kapitalisme global.

Bumi kita dipakai, air kita dipakai, rakyat kita dipakai sebagai buruh demi memperkaya bangsa lain. Kita diatur menjadi pasar, menjadi konsumen dari produk dan jasa yang dibuat oleh bangsa lain.

Kita penuh retorika. Rakyat kita, pemimpin kita bernyanyi "Indonesia Raya", "Maju Tak Gentar", tapi kesejahteraan kita jalan di tempat. Kita terus miskin. Kita terjerumus dalam *middle income trap*, perangkap negara menengah.

Kita hidup di tengah kekayaan sumber alam, tetapi kita miskin. Negara dengan tiga perempat laut tetapi mengimpor ikan asin, mengimpor ikan teri, mengimpor garam, mengimpor singkong. Dan mengimpor daging.

Yang saya heran, kenapa kalau kita bicara “mengimpor daging”, banyak orang yang tertawa? Saya tidak mengerti. Seharusnya kita menangis.

Tapi, kata orang, ambang penderitaan bangsa Indonesia tinggi sekali. Jadi, kalau kaki kita diinjak, orang Indonesia tidak teriak-teriak karena sifat bangsa Indonesia memang baik, nrimo. “Monggo, silakan injak kaki saya. Silakan perdaya saya dan ambil kekayaan saya.”

Karena inilah, menurut saya negara kita saat ini berada di persimpangan jalan yang sangat-sangat penting.

Darah kita sudah diambil puluhan tahun. Tubuh bangsa Indonesia ini sudah selayaknya masuk IGD. ‘Bocornya’ uang yang seharusnya dapat digunakan untuk membangun bangsa Indonesia, dari: kebocoran tabungan nasional dari perdagangan kita, kebocoran pendapatan pajak nasional dari *tax ratio* kita yang begitu rendah, dan kebocoran dari korupsi anggaran belanja nasional yang jika dijumlah sekarang melampaui angka Rp. 1.000 triliun setiap tahun menurut hitungan Badan Kajian Kebijakan Strategis Partai Gerindra, dan banyak hitungan kredibel lainnya harus segera kita hentikan.

Illicit Outflow of National Wealth

Mengalir Keluarnya Kekayaan Negara Secara Gelap

Penggelapan Uang ke Luar Indonesia 2004-2013
Estimasi Sangat Konservatif dari Global Financial Integrity



Dengan menganalisa kejanggalan dari angka-angka perdagangan resmi yang diterbitkan oleh IMF, Bank Dunia, PBB, Kemendag AS, dan Uni Eropa, lembaga riset pergerakan uang dunia Global Financial Integrity (GFI) yang bemarkas di Washington DC menyimpulkan setidaknya US\$ 180,71 miliar atau setara Rp.2.349 triliun telah mengalir keluar dari Indonesia secara gelap pada kurun waktu 2004-2013.



PERLU DICATAT:

GFI menekankan bahwa jumlah ini hanyalah sebagian kecil dari total kekayaan Indonesia yang keluar secara gelap karena hitungan di atas tidak mencakup:

- Uang yang mengalir keluar dari Indonesia secara tunai (cash), dalam mata uang Rupiah ataupun mata uang asing
- Angka-angka perdagangan jasa, lisensi, royalti dan non-barang lainnya yang mencakup ~25% nilai perdagangan dunia
- Manipulasi angka ekspor-impor yang dilakukan secara bersama oleh eksportir dan importir.

3 Modus Penggelapan Uang Keluar Indonesia

1 Korupsi
Penggelapan hasil korupsi oleh pejabat

2 Kriminal
Penggelapan hasil jual-beli narkoba, manusia, dan perdagangan terlarang lainnya

3 Komersial
Pemalsuan dokumen ekspor dan impor untuk menghindari pajak

Rasio Pajak Harus Naik

Tahun	PDB Indonesia	Rasio Pajak Indonesia	Tambahan Penerimaan Negara Jika Rasio Pajak 16%	Tambahan Penerimaan Negara Jika Rasio Pajak 20%
2008	\$ 510 miliar	13,3%	Rp. 178 triliun	Rp. 443 triliun
2009	\$ 539 miliar	11,1%	Rp. 346 triliun	Rp. 627 triliun
2010	\$ 755 miliar	10,5%	Rp. 536 triliun	Rp. 928 triliun
2011	\$ 892 miliar	11,2%	Rp. 562 triliun	Rp. 1.026 triliun
2012	\$ 917 miliar	11,4%	Rp. 551 triliun	Rp. 1.028 triliun
2013	\$ 912 miliar	11,3%	Rp. 559 triliun	Rp. 1.033 triliun
2014	\$ 861 miliar	10,8%	Rp. 597 triliun	Rp. 1.060 triliun

Jika Naik Setara Zambia, Indonesia Tidak Perlu Utang

Saat ini rasio pajak Indonesia, yaitu persentase penerimaan negara dibandingkan dengan besaran produk domestik bruto (PDB) berkisar di bawah 11%. Angka ini sangat rendah dibandingkan dengan rata-rata negara ASEAN, apalagi dibandingkan rata-rata negara OECD sebesar 34%.

Jika rasio pajak Indonesia naik ke 16%, atau setara dengan negara Zambia, maka penerimaan negara akan bertambah kurang lebih Rp. 500 triliun. Jumlah ini lebih besar dari defisit APBN 2017 - artinya negara tidak perlu cetak utang dari luar negeri.

* Angka PDB dan rasio pajak dari Bank Dunia. Kalkulasi penerimaan tambahan dilakukan oleh editor.

Perbandingan Rasio Pajak 4 Negara (2015)



Kita Dididik Menyerah Sebelum Berjuang?

Saat ini, kita juga kehilangan uang ke luar negeri dari membeli barang-barang produksi luar negeri, yang sebenarnya bisa diproduksi sendiri oleh putera puteri Indonesia. Bahkan, ada yang mengatakan kita sudah kecanduan barang impor.

Hal ini bisa kita lihat dari apa yang kita gunakan sehari-hari, dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi.

Produksi manakah air minum yang kita konsumsi? Sabun mandi yang kita gunakan? Nasi yang kita santap? Mobil yang kita kendarai? Handphone yang kita bawa? Semen yang digunakan untuk membangun rumah kita?

Produksi asing atau Indonesia? Jika produksinya di Indonesia, perusahaannya asing atau nasional?

Coba renungkan.

Sebagai contoh, pada tahun 2016 lalu, kita sebagai bangsa membeli kurang lebih 6 juta motor tiap tahun¹⁰. Kemudian, kita membeli kurang lebih 1 juta mobil setiap tahun¹¹. Dari semua mobil yang dibeli oleh bangsa Indonesia, tidak ada satupun merek buatan Indonesia. Ini artinya, kita “mengirim” uang ke negara lain setiap kali kita membeli mobil atau motor.

Benar, sebagian dari merek mobil dan motor yang kita beli di Indonesia memiliki pabrik di Indonesia. Benar, ongkos produksinya mungkin masih dinikmati oleh orang Indonesia yang menjadi buruh pabrik, tetapi keuntungannya tidak tinggal di Indonesia. Setelah membayar buruh pabrik kita, sales dan teknisi di ribuan toko yang juga orang kita, listrik kita, dan membayar pajak, sebagian besar keuntungan bersih penjualannya tetap mengalir ke luar negeri.

¹⁰ Asosiasi Industri Sepeda motor Indonesia (AISI), 2017

¹¹ Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), 2017

Situasi ini tercermin dari neraca pendapatan primer kita. Neraca pendapatan primer merekam besarnya aliran uang ke luar negeri hasil investasi asing, berupa pendapatan ekuitas, pendapatan bunga, dan pendapatan investasi lain. Saat ini neraca pendapatan primer kita defisit, dan sudah defisit lebih dari 10 tahun. Defisitnya cukup besar – pada tahun 2014 lalu mencapai \$ 30 miliar atau sekitar Rp. 390 triliun¹².

Malaysia, yang jumlah penduduknya sepersepuluh jumlah penduduk Indonesia, belasan tahun lalu sudah berani membikin mobil nasional. Sekarang kita sudah buka pasar kita. Kita telah menjadi bagian dari ASEAN Economic Community, masyarakat ekonomi ASEAN. Kita harus buka pelabuhan kita untuk kapal-kapal yang membawa produksi negara tetangga kita. Barang mereka telah dan akan terus masuk. Saya lihat beberapa rakyat kita sekarang sudah pakai mobil Proton buatan Malaysia.

Saya bukan mengatakan kita harus pada investasi anti asing, tidak.

Tapi kalau semua produksi di Indonesia bergantung pada investasi asing, kita akan celaka. Rupiah kita akan terus lemah. Seorang ekonom Indonesia baru-baru ini menemukan, setiap \$ 1 miliar investasi asing yang tertanam di Indonesia dalam satu tahun (2010 – 2014) mengakibatkan \$ 12 miliar mengalir ke luar negeri¹³.

Saya sering mendengar dan menyaksikan, kita selalu di-brainwash, dicuci otak. “Oh, produksi sendiri dengan merek sendiri tidak efisien.” Tapi kok, Korea Selatan yang jumlah penduduknya jauh lebih sedikit dari kita, bisa efisien, sedangkan kita tidak bisa efisien? Berarti apa? Saya menyimpulkan, berarti kita dididik oleh banyak pemimpin kita untuk menyerah sebelum berjuang.

Kita diprogram, otak kita di-brainwash, bahwa kita ini memang kalah dari bangsa lain. Kita semuanya, termasuk anak-anak kita, walaupun kita sering tidak mengakui, kita di bawah sadar merasa rendah diri. *Minderwaardigheids kompleks*. Begitu lihat

¹² Lembaga Penjamin Simpanan, 2015

¹³ Analisa Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, 2015

orang asing, kita hormat dan kagum. Begitu berhadapan dengan merek asing, menyerah.

Ini masalah Indonesia. Ini masalah kita. Menteri-menteri kita, dan banyak pemimpin kita dari dulu mengatakan, "oh, jangan, Indonesia tidak perlu bikin mobil sendiri." Padahal, per satu mobil kalau kita hitung, untungnya bisa lebih dari 2.000 dolar per mobil¹⁴. Katakanlah untung 1.000 dolar per mobil. Berarti kalau satu juta mobil setahun, kita kirim uang ke luar negeri \$ 1 miliar setahun.

Kalau motor, keuntungannya bisa 10% dari ongkos produksi per unit¹⁵. Katakanlah, untung 100 dollar per unit. 100 dollar dikalikan 6 juta unit, artinya \$ 600 juta. Artinya kita kirim setiap tahun \$ 1,6 miliar ke luar negeri. Bisa lebih dari Rp. 20 triliun kita kirim tiap tahun karena seluruhnya mobil dan motor yang kita beli di Indonesia adalah merek asing.

Sekali lagi saya tidak mengatakan kita perlu boikot barang asing, tidak.

Tetapi, yang saya harapkan adalah, kalau ada satu juta mobil yang dibeli oleh rakyat Indonesia setiap tahun, masa kita tidak mampu membuat dan merebut 10% saja dari pasar kita sendiri? Seratus ribu mobil. Masa tidak ada sih, pemimpin bangsa Indonesia, jika didukung pemerintah, yang berani mengatakan, "kita buat 100.000 mobil?"

Saya kira sebagian dari rakyat kita akan beli mobil Indonesia. Dan, kita katakan kepada sahabat asing kita, "*please*, jangan takut. Kami hanya minta izin, kami pakai pasar kami sendiri. Hanya 10%. Kamu boleh tetap menikmati 90% pasar kami."

Mengatakan ini saja saya belum tahu ada yang berani. Kita di-*brainwash* menerima bahwa kita tidak mampu. Ini adalah tantangan besar kita sekarang. Kita harus mengisi otak Indonesia dengan semangat dan kemampuan agar berani bersaing dengan bangsa lain.

¹⁴ Analisa keuangan Toyota, 2015

¹⁵ Analisa keuangan Yamaha, 2015

Potret Industri Otomotif



Untung Jual Mobil Rp.10 Triliun Ke Mana?

Orang Indonesia beli 1 juta mobil di tahun 2015*. Semuanya merek asing. Jika keuntungan per mobil Rp. 10 juta, artinya Rp. 10 trlun bisa mengalir ke luar negeri.

* Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia, 2016

Astra Dapat Rp.170 Triliun/Tahun

Saat ini Astra International adalah perusahaan dengan pendapatan terbesar di Indonesia: Rp. 170 triliun atau \$13,2 miliar per tahun*. Pernah milik negara, Astra sekarang milik perusahaan Inggris Jardine Matheson.

* Globe Asia 100 Top Groups List, 2016



Hanya 1% Orang Indonesia Menikmati Kemerdekaan

Berhubungan erat dengan tantangan besar utama yang dialami oleh ekonomi kita, yaitu mengalir keluarnya kekayaan Indonesia ke luar negeri, adalah satu keadaan yang kita dapat sebut sebagai ketidakadilan ekonomi.

Ketidakadilan ekonomi inilah yang menyebabkan rakyat kita terlalu banyak yang masih hidup dalam keadaan miskin, dan keadaan susah.

Menurut data BPS, *gini ratio* kita di tahun 2014 sudah 0,41. Bahkan, menurut riset lembaga keuangan Credit Suisse, di tahun 2016 angka *gini ratio* kita yang sebenarnya sudah mencapai 0,49¹⁶. 1% orang terkaya, menguasai 49% kekayaan di Republik Indonesia.

0,49 adalah ketimpangan yang luar biasa. Ketimpangan yang sangat berbahaya. Ketidakadilan ekonomi ini dapat memicu konflik sosial, huru hara dan perang saudara yang berkepanjangan.

¹⁶ Credit Suisse Global Wealth Databook, 2016

Ketidakadilan Ekonomi Sudah Terlalu Parah

Gini ratio, atau rasio gini adalah indikator utama kesenjangan kekayaan di suatu negara. Angka gini ratio 0,49 artinya adalah 1% dari populasi terkaya di Indonesia memiliki 49% kekayaan Indonesia.

Jika populasi Indonesia ada 250 juta jiwa, artinya hampir 50% kekayaan Indonesia dimiliki oleh 2,5 juta orang saja. Sisanya dibagi antara 247,5 juta jiwa. Bahkan, baru-baru ada yang menghitung, harta kekayaan dari empat orang terkaya di Indonesia ternyata lebih besar dari harta 100 juta orang termiskin di Indonesia¹⁷.

Angka gini ratio untuk kepemilikan tanah lebih mengkhawatirkan lagi. Lebih mengkhawatirkan, karena bagi saya kekayaan yang hakiki adalah kepemilikan tanah.

Data yang saya miliki, gini ratio kepemilikan tanah kita di tahun 2014 sudah mencapai 0,73. Artinya, 1% populasi terkaya di Indonesia, 2,5 juta orang, memiliki 73% tanah Indonesia. Angka sekarang pasti lebih tinggi.

Coba tanyakan ke keluarga dan kerabat saudara. Siapa diantara mereka yang memiliki tanah? Apakah saudara sendiri memiliki tanah? Ataukah saudara menyewa tanah tempat saudara saat ini tinggal? Apakah petani-petani kita masih memiliki tanah sendiri? Kalau iya, berapa rata-rata luas tanah yang mereka miliki? Apakah meningkat, atau menurun dibandingkan dengan 10, 20, 30 tahun yang lalu?

Data tahun 2015 dari BPS, ada 37 juta orang Indonesia yang berprofesi sebagai petani¹⁸. Namun lebih dari 75%, lebih dari 28 juta petani tidak punya lahan sendiri¹⁹. Yang memiliki lahan sendiri hanya 9 juta petani, itupun luasnya sungguh tidak seberapa.

¹⁷ OXFAM dan INFID, 2017

¹⁸ Badan Pusat Statistik, 2015

¹⁹ Konsorsium Pembaruan Agraria, 2016

Pemenuhan & Harga Pangan Indonesia



Harga Beras Bisa 2x Vietnam

Sejak tahun 2000, rata-rata harga beras di Indonesia 50% sampai 100% lebih mahal dari harga beras di Vietnam dan Thailand*.

* Badan Pangan PBB (FAO), 2016

46% Pengeluaran Orang Indonesia Untuk Makanan

46,45% pengeluaran rata-rata per kapita orang Indonesia adalah untuk membeli makanan. Kenaikan harga pangan dapat membuat banyak orang jatuh miskin. Karena itu menjaga kestabilan harga pangan harus jadi prioritas Pemerintah.

* Susenas - Badan Pusat Statistik (BPS), 2014



Ekonomi Indonesia Jakarta Sentris

Selain *gini ratio*, salah satu indikator kesenjangan ekonomi di Indonesia adalah data lokasi kegiatan ekonomi atau perputaran uang di dalam negeri.

Besar ekonomi Indonesia pada tahun 2015 lalu adalah \$ 860 miliar, atau sekitar Rp. 11.500 triliun jika menggunakan kurs satu dollar Rp. 13.000.

60% sampai 70% dari perputaran ekonomi sebesar Rp. 11.500 triliun berputar di Jakarta²⁰. Sebagian besar sisanya berputar di kota-kota besar lainnya seperti Surabaya, Medan, dan Semarang. Hanya segelintir saja yang beredar di desa-desa di seluruh Indonesia. Itupun banyak terkonsentrasi di pulau Jawa.

Konsentrasi ekonomi di Jakarta dan pulau Jawa ini berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat Indonesia. Infrastruktur seperti jalan raya, kereta dan listrik tidak tersedia dengan baik pedesaan dan di luar Jawa.

Bahkan, di kampung halaman saya, di Sulawesi Utara, mati listrik selama 6-12 jam sehari masih menjadi hal yang lumrah di tahun 2016 ini.

Yang patut menjadi perhatian kita semua, dan harus kita selesaikan dalam tempo cepat adalah soal gizi. Di NTT, dua dari tiga anak mengalami stunting atau gagal tumbuh akibat malnutrisi²¹. Malnutrisi adalah bahasa halus dari kelaparan.

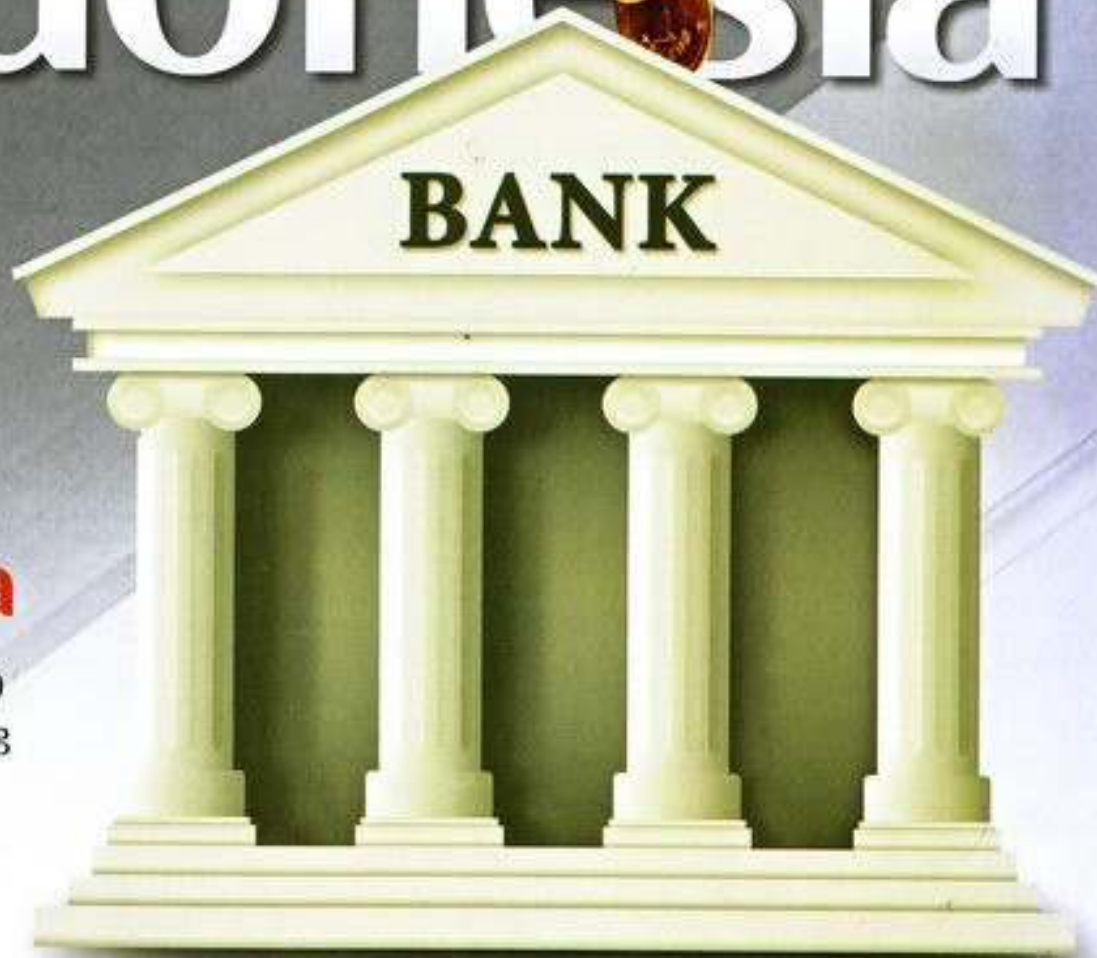
Di Jakarta, angka malnutrisi mencapai 1 dari 3 anak. Ini adalah fakta yang menyesakkan di tengah banyaknya gedung pencakar langit dan hotel-hotel mewah.

Ini berbahaya, karena artinya 1 dari 3 orang Indonesia tidak memiliki kesempatan bersaing yang sama. Anak yang kurang nutrisi akan sulit berprestasi di sekolah, dan setelah dewasa akan sulit mendapatkan pekerjaan yang berpenghasilan tinggi.

²⁰ Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, 2017

²¹ Bank Dunia *Indonesia Economic Quarterly October 2016*, 2016

Kelas Menengah Indonesia



98% Rekening < Rp.100 Juta

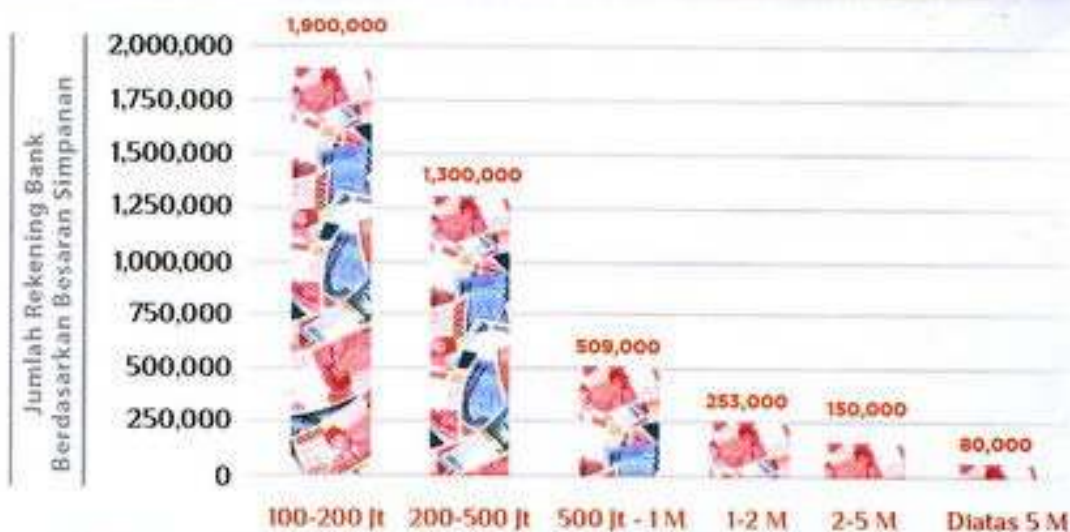
Jumlah simpanan di 183 juta (98%) rekening bank di Indonesia kurang dari Rp. 100 juta. Hanya 80 ribu rekening yang memiliki simpanan lebih dari Rp. 5 miliar*.

*Lembaga Penjamin Simpanan, 2016

Hanya 36 Dari 100 Orang Punya Rekening Bank

Hanya 36% orang dewasa Indonesia yang memiliki rekening bank. Jumlah ini lebih rendah dari rata-rata dunia sebesar 62%. Sebagai perbandingan, persentase kepemilikan rekening bank di Malaysia 81%, sedangkan Thailand 78%*.

*Financial Inclusion Index, 2014



Sejarah Mengajarkan, Ketimpangan Bisa Picu Konflik Sosial

Saat ini sudah lebih dari 50% populasi Indonesia memiliki akses ke Internet²². Karena banyak dari 1% populasi kaya Indonesia yang mengumbar kekayaan di media sosial, ini artinya lebih dari setengah populasi kita bisa melihat secara gamblang ketimpangan kekayaan yang terjadi di Indonesia.

Ketika masih banyak rakyat yang susah makan, susah hidup layak, bahkan digusur dari rumahnya sendiri, rakyat bisa dengan mudah melihat ada kelompok kecil di Indonesia yang hidup begitu mewah dan berlebih.

Berbicara tentang ketimpangan, saya ingin mengutip buku tulisan Niall Ferguson, judulnya *The Great Degeneration*. Dalam menulis buku ini, Niall mewawancara seribu pelaku ekonomi, CEO dari perusahaan-perusahaan besar di dunia. Kepada mereka, dia tanyakan, “menurut Anda, apa ancaman terhadap ekonomi dunia, terutama emerging market / negara berkembang?”

Mereka, seribu pelaku ekonomi, menjawab: inflasi, pecahnya investasi aset, korupsi, radikalisasi, dan sebagainya. Mereka juga mengatakan bencana alam, dan epidemi penyakit seperti SARS bisa menggoyahkan ekonomi dunia. Sebagai contoh, kita bisa lihat sekarang, dengan instabilitas politik, pertumbuhan ekonomi Thailand tersendat. Jika ada ketidakjelasan politik, sistem ekonomi tidak berjalan dengan baik.

Niall Ferguson ini seorang ahli sejarah. Selain menanyakan pandangan para pelaku ekonomi, dia juga menanyakan pandangan para ahli sejarah. Para ahli sejarah yang ia wawancara mengatakan, “Kalau semua yang dikatakan tadi ada, ditambah lagi kalau jumlah penduduk sebagian besar suatu negara adalah orang muda antara 18 sampai 30 tahun, dan jika harga pangan naik, ancamannya adalah revolusi, huru-hara, perang saudara.”

²² Asosiasi Penyelenggara Jaringan Internet Indonesia (APJII), 2016

Niall mencatat, "ini sedang terjadi di Timur Tengah." Menurutnya apa yang disebut sebagai *Arab Spring* itu terjadi karena ada hal-hal ini. Instabilitas terjadi di Timur Tengah adalah akibat daripada ada faktor-faktor itu semua.

Menurut saya, kita harus bertanya kepada diri kita: Faktor-faktor ini, elemen-elemen ini ada tidak di Republik Indonesia saat ini?

Sekarang, kalau saja di setiap desa ada 10 anak putus sekolah, yang usianya antara 15 sampai 22 tahun. Kalau ada 10 anak di satu desa, dan kita punya 80.000 desa. Sepuluh kali 80.000, artinya ada 800.000 pemuda yang tidak mengerti dia harus bikin apa. Dia kasihan melihat ibunya, bapaknya. Di beberapa tempat dia mencari kayu untuk hidup. Dia mungkin juga ngarit rumput untuk bantu ternak ibunya. Tetapi, penghasilannya sangat minim. Pada usia yang sangat produktif, mereka harus punya cita-cita, punya harapan. Kalau mereka hidup tanpa harapan, ini kan sesuatu yang rawan. Mereka bisa disalahgunakan oleh orang-orang yang punya maksud-maksud yang tidak baik.

Inilah sebabnya, mengapa saya katakan kita harus waspada.

Sejarah mengajarkan kepada kita bahwa jika suatu negara/masyarakat mengalami tujuh hal berikut:

1. Inflasi
2. harga pangan naik
3. ledakan penduduk
4. pengangguran meningkat
5. disparitas penghasilan
6. radikalisme ideologi, dan
7. korupsi.

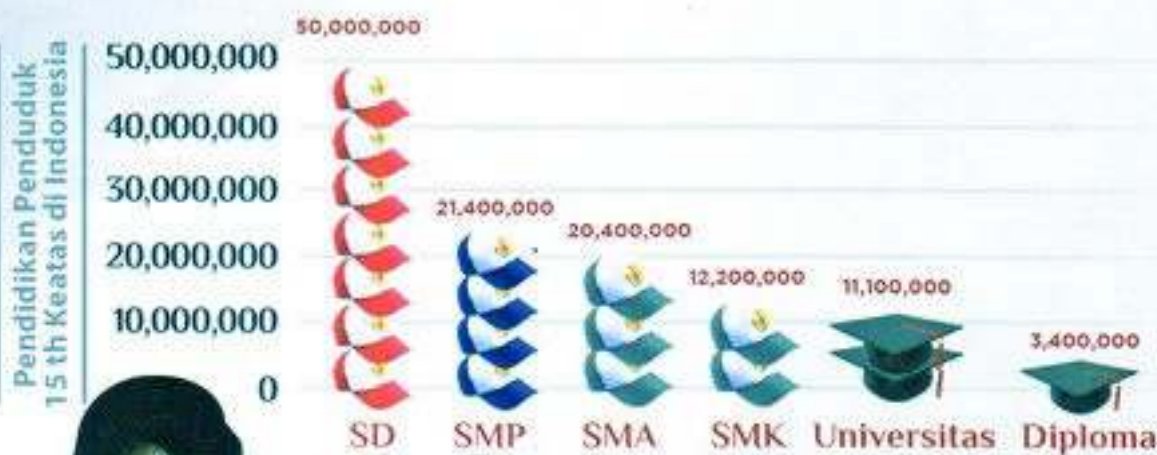
Dengan angka yang sangat tinggi (ekstrim), maka akan terjadi **Huru-Hara, Revolusi, dan Perang Saudara.**

Hampir semuanya sekarang ada di Republik Indonesia. Karena *gini ratio* kita sudah 0,49, jika ada pemantik yang tepat, Indonesia dapat terjerumus dalam huru-hara, revolusi dan perang saudara yang berkepanjangan. Kita harus waspada.

Kualitas SDM

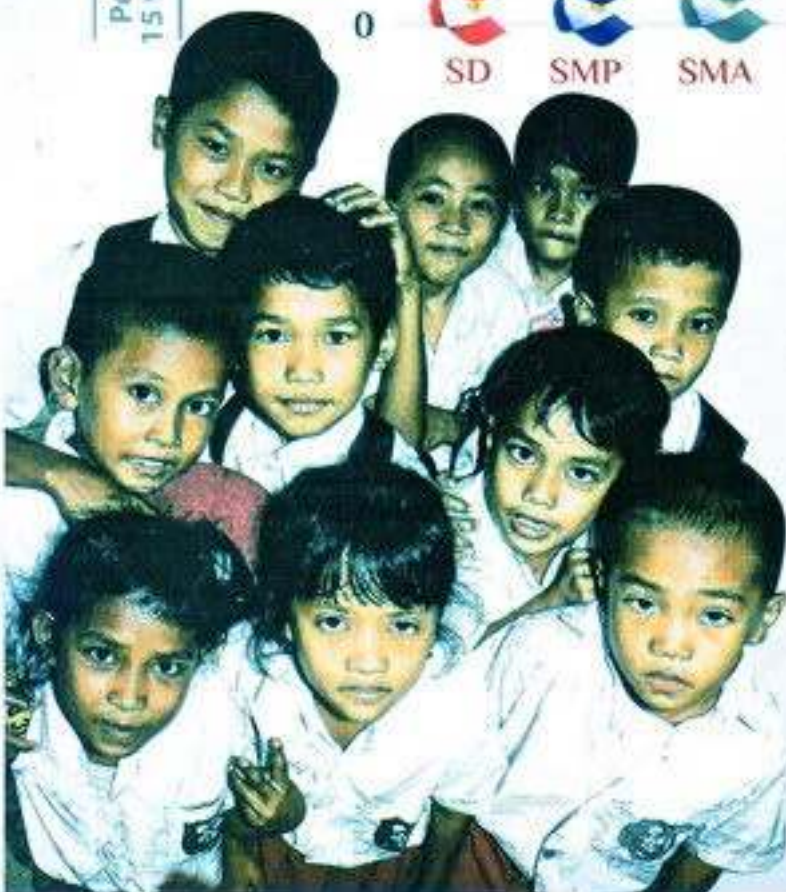


40% Angkatan Kerja Lulusan SD



50 juta orang atau hampir 40% angkatan kerja Indonesia (di atas 15 tahun) hanya menamatkan SD. 21 juta hanya menamatkan SMP. Hanya 11,1 juta angkatan kerja Indonesia yang telah menyelesaikan bangku kuliah*.

* Badan Pusat Statistik, 2016



60% Dari Lulusan SD Putus Sekolah

6 dari 10 lulusan SD tidak bisa melanjutkan ke SMP, diantaranya karena jumlah ruang kelas dan guru SMP kurang*.

* Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2016

Tantangan Besar # 2:

Demokrasi

Indonesia

Dikuasai

Pemodal

Besar

Demokrasi Kita Dikuasai Pemodal Besar

Sekarang Indonesia berada dalam keadaan yang sangat rawan. Terlalu banyak pemimpin kita yang bisa disogok, bisa dibeli. Akhirnya mereka tidak menjaga kepentingan rakyat, tidak mengamankan kepentingan rakyat, tetapi malah menjual negara kepada pemodal besar – bahkan kadang kepada bangsa lain.

Sepanjang hidup saya, saya sudah keliling ke semua kabupaten di Indonesia. Di tahun 2014 saja, saya berkesempatan berkeliling ke ratusan kota dan kabupaten.

Di mana-mana, rakyat sudah tidak tahan lagi. Terlalu banyak korupsi di Republik Indonesia ini. Semua proyek dikorupsi, semua orang disogok. Semua pemimpin kita mau dibeli dan mau disogok. Akhirnya tidak ada keadilan ekonomi bagi rakyat Indonesia. Tidak ada keadilan politik bagi bangsa Indonesia.

Indonesia, menurut pendapat saya, sekarang ini ada di persimpangan jalan. Apakah cita-cita demokrasi ini akan di-*hijack*, akan disandera oleh para Kurawa?

Inilah pertarungan kita saat ini. Perebutan antara Kurawa dan Pandawa. Mereka, para Kurawa, hidupnya didorong oleh keserakahan. Mereka sudah punya kekuasaan, sudah punya harta banyak, tetapi selalu ingin lebih.

“Persetan itu, jutaan orang yang tidak punya pekerjaan. Persetan itu, para pedagang kecil. Persetan mereka semua. Saya maunya hanya perjuangkan kepentingan saya. Kelompok saya, keluarga saya, dinasti saya.” Demikian cara berpikir para Kurawa.

Dalam setiap perjuangan, ada Kurawa, ada Pandawa. Pandawa, *the good guys*, orang-orang yang baik, ada di mana-mana di Indonesia. Tetapi, saat ini jumlahnya saat ini belum banyak.

Saya disini menghimbau agar kekuatan rakyatlah yang bicara. Para Pandawa di Republik Indonesia tidak didukung oleh uang modal besar. Para Kurawa tidak suka dengan program para Pandawa/ Kurawa tidak suka bahwa Pandawa ingin memberdayakan orang yang lemah, orang yang miskin.

Mereka, para pemodal besar, dari bangsa kita sendiri dan bangsa asing, tidak suka pada keinginan mereka-mereka yang hendak mengamankan dan menyelamatkan kekayaan negara. Mereka suka Indonesia yang lemah. Mereka suka Indonesia dipimpin oleh pemimpin yang lemah.

Mereka ingin suatu pemerintahan boneka. Mereka ingin mengendalikan bangsa ini. Mereka ingin Indonesia dipimpin oleh pemerintah yang korup, oleh pemimpin-pemimpin dan pejabat-pejabat yang korup. Pemimpin-pemimpin yang bisa diatur oleh para Kurawa.

Karena itu, saya percaya mereka takut dengan isi dari buku ini.

Saya percaya, mereka tidak ingin gagasan-gagasan yang disampaikan di buku ini dibaca luas oleh rakyat Indonesia. Mereka juga tidak ingin ada hadir di tengah rakyat Indonesia, pemimpin yang bicara apa adanya, dan memperjuangkan kemandirian negara Republik Indonesia. Mereka takut munculnya pemerintah yang bersih dan kuat di negara kita ini.

Kadang Pemimpin Bisa Dibeli Karena Uang Berkuasa di Pemilihan

Sesungguhnya, taruhan kita sangat besar. Sekarang kita merasakan bahwa masyarakat kita, bangsa kita sedang mengalami suatu penyakit yang mendalam. Setiap unsur masyarakat kita sudah rusak. Rusak moral, rusak mental.

Ya, setiap unsur di masyarakat kita, setiap tingkatan kepemimpinan sudah sarat dengan sogok-menyogok. Orang yang punya banyak uang atau dimodali banyak uang bisa membeli suara, membeli loyalitas, membeli ketaatan.

Sekarang banyak pemimpin kita, banyak pejabat kita bukan taat kepada Undang-Undang Dasar, bukan taat kepada kepentingan bangsa, tetapi taat kepada yang memberi uang.

Ini semua karena demokrasi yang kita laksanakan, demokrasi liberal yang kita laksanakan sekarang ini, membutuhkan biaya yang sangat besar.

Peringatan Sukarno

"Semua 'negeri sopan' kini mempunyai parlemen, semua 'negeri sopan' kini bersistem 'demokrasi'. Tetapi, di semua negeri-negeri sopan itu kini rakyat jelata tertindas hidupnya.

Demokrasi mereka bukanlah demokrasi kerakyatan yang sejati, melainkan suatu demokrasi burjuis belaka – suatu burgerlijke democratie yang untuk kaum burjuis dan menguntungkan kaum burjuis belaka.

Benar rakyat 'boleh ikut memerintah', tetapi kaum burjuis lebih kaya dari rakyat jelata, mereka dengan harta kekayaannya, dengan surat-surat kabarnya, dengan buku-bukunya, dengan bioskop-bioskopnya, dengan segala alat-alat kekuasaannya bisa mempengaruhi semua akal pilihan kaum pemilih, mempengaruhi semua jalannya politik."

Ir. Sukarno, Maret 1933 *

* Naskah Mencapai Indonesia Merdeka, 1933

"Demokrasi mereka bukanlah demokrasi kerakyatan yang sejati, melainkan suatu demokrasi burjuis belaka - suatu burgerlijke democratie yang untuk kaum burjuis dan menguntungkan kaum burjuis belaka."



Uang Yang Maha Kuasa

Setelah 70 tahun lebih kita bernegara, setelah pendahulu-pendahulu kita dengan gagah berani menolak dijajah kembali oleh kekuatan asing, sekarang bangsa Indonesia tetap dalam ancaman akan dijajah kembali.

Tetapi, sekarang mereka menjajahnya lebih lihai, lebih bagus, lebih halus, lebih licik. Mereka tidak kirim tentara, mereka cukup 'membeli' dan menyogok pemimpin-pemimpin kita.

Kita sadar dan mengerti, demokrasi adalah sistem yang terbaik dari sistem-sistem pemerintahan yang ada. Namun, demokrasi kita sekarang terancam. Demokrasi kita mau disandera. Demokrasi kita sekarang mau diperkosa. Demokrasi kita sekarang mau dirusak dengan politik uang. Saat ini, uang yang mahakuasa.

Ya, dengan uang, bangsa kita hendak dijajah kembali. Pemimpin-pemimpin kita dibeli. Hakim-hakim, politisi-politisi, anggota-anggota DPR, ketua-ketua partai kita banyak yang lemah dan bisa dibeli. Hampir semua lembaga dirusak uang. Termasuk pemimpin-pemimpin agama kita, ada yang sudah mulai dirusak uang.

Demokrasi sekarang adalah demokrasi yang punya uang.

Ini membahayakan demokrasi Indonesia. Ini berarti, mereka yang punya atau kuasai uang, mereka yang menguasai kedaulatan politik Indonesia.

Sekarang ini, setiap menjelang pilkada, saat pemimpin partai-partai di Indonesia menjaring calon pemimpin, inilah yang ditanyakan kepada para calon yang mendaftar di partai-partai. Termasuk di partai saya, Partai GERINDRA. Yang ditanyakan bukan "kamu sekolahnya di mana?", bukan "ijazahmu apa?", bukan "pengabdianmu kepada negara bagaimana?".

Tetapi, yang ditanyakan adalah "kamu punya uang, tidak?"

Ada tokoh yang hebat, jujur, bersih, bijak, dan sudah mengabdikan sekian puluh tahun, sebagai guru atau pegawai negeri, atau sebagai tentara atau polisi. Namun dia tidak bisa mengabdikan lebih lanjut, karena pertanyaannya selalu, "kamu punya uang atau tidak?"

Akhirnya, bahayanya bagi bangsa Indonesia adalah nantinya semua akan ditentukan oleh mereka yang punya uang. Ya, kalau dia punya uang warga negara kita yang setia kepada Pancasila. Tetapi kalau uang itu berasal dari uang haram, kalau uang itu berasal dari luar negeri, berarti kita dijajah dengan uang.

Karena itu, saya sering mengatakan, kita adalah bangsa yang ramah. Kita ingin bersahabat. Saya selalu katakan kepada teman-teman saya dari negara lain, "*I want to be your friend. I want to be your partner, but I can not be your peon.*"

Saya ingin jadi sahabatmu. Saya ingin jadi mitramu. Tetapi kalau kamu ingin saya jadi kacungmu, saya katakan, tidak!

Prabowo tidak bisa jadi kacung kamu. Indonesia tidak mau jadi kacung kamu. Kita mau jadi sahabatmu. Kita mau jadi kawanmu. Kita mau jadi mitramu, tapi kita tidak mau jadi kacung siapa pun di dunia.

Saya tidak mau, ketika ada orang kaya melihat Indonesia di peta dunia, mereka melihat ada *price tag*, ada label harga yang menempel di peta negara kita karena sistem demokrasi liberal yang kita anut.

Ada Suara Ada Harga



Untuk Beli Pengaruh di Seluruh Indonesia:

Rp.11,8 Triliun?

Jabatan	Tingkatan	Jumlah Jabatan	Biaya Kampanye
Kades	Desa	81.000	Rp.300 juta
Bupati	Kabupaten/Kota	416	Rp.20 miliar
Walikota	Kabupaten/Kota	98	Rp.20 miliar
Gubernur	Provinsi	34	Rp.200 miliar
Presiden	Nasional	1	Rp.5 triliun

Andaikata ada pengusaha yang ingin beli pengaruh dengan memodali biaya kampanye seluruh gubernur dan presiden, ia cukup mengeluarkan Rp. 11,8 triliun 'saja'.

* Angka di atas adalah taksiaran penulis

Plesetan NPWP: Nomor Piro, Wani Piro

NPWP, atau 'nomor piro wani piro' marak utamanya karena tingkat kesejahteraan masyarakat yang rendah. Karena itu, saat ada kesempatan penulis selalu mengingatkan calon pemilih, 'ambil uangnya, jangan pilih orangnya'.

Pemilihan Kepala Desa: Sampai Rp. 1 miliar

Saya membaca, di tahun 2015 lalu, ada desa di Jawa Tengah, di desa itu calon kepala desanya keluar Rp. 1 miliar hanya untuk menjamu pemilih di rumahnya²⁵. Tingkat kepala desa, habis Rp. 1 miliar untuk kampanye. Minimal, di daerah yang sama, perlu Rp. 700 juta untuk modal kampanye.

Jika saudara turun ke desa, setelah pemilihan kepala desa, coba saudara tanya, "Bapak pilih siapa?". Sekarang banyak yang menjawab, "saya pilih yang kasih 400 ribu, pak." Namanya pun dia tidak hafal. Pokoknya yang kasih 400 ribu. Pemilihan kepala desa sekarang, satu suara 400 ribu. Bahkan saya dengar, di banyak tempat bisa lebih. Apalagi untuk Pilkada tingkat Provinsi, dan Pilkada tingkat Kabupaten/Kota.

Di Pemilu 2014 lalu, saya ingat, ada beberapa kader saya yang dengan semangatnya, "Pak, saya mau maju bupati. Saya mau maju gubernur." Saya tanya, "Anda ini punya kekuatan ekonomi, tidak?", dijawab, "Pak, saya mau gadaikan rumah saya."

Untuk politik, saya larang kader saya gadaikan milik mereka. Saya bilang, "Itu rumah urusan sama istri anakmu. Bisa saja kau kalah. Kalau kau kalah, rumah sudah tergadai, tanggung jawabmu kepada anak istrimu bagaimana?".

Saya ingat, waktu itu saya bilang, "Anda mau maju di politik? Anda harus tahu, politik liberal ini membutuhkan biaya." Basisnya Partai GERINDRA adalah petani, nelayan. Orang-orang di kecamatan, di desa. Karena itu GERINDRA cepat berkembang, karena jaringan HKTI, KTNA dan sebagainya. Pemimpin-pemimpin GERINDRA banyak adalah pemimpin koperasi, mantan kepala desa. Penghasilannya sebulan dua juta. Dengan penghasilan sebulan dua juta, kalau dia harus bayar ojek sekali keluar desa, bayar ojek saja berapa? Untuk keluar desa dia saja, keliling saja dia mungkin sudah tidak sanggup secara ekonomi.

²⁵ Riset Forum Komunikasi Mahasiswa dan Rakyat Demak (FKMRD), 2015

Ketika Ada Yang Tidak Bisa Dibeli: Divide Et Impera

Dalam sejarah politik di Indonesia, selalu ada politisi-politisi yang tidak arif. Politisi-politisi yang bisa dibeli, yang manut kepada pemodal, dan mengira politik adalah soal menang-menangan saja.

Namun ada juga, politisi-politisi yang memandang politik bukan sebagai ajang rebut-merebut demi memenangkan kepentingan golongan sendiri. Mereka memandang politik sebagai usaha bersama untuk memperbaiki kehidupan bangsa dan rakyat yang kita cintai.

Satu-dua tahun terakhir ini, kita sebagai bangsa dapat menyaksikan dengan mata kepala kita, ketika ada pejuang-pejuang politik yang seperti ini, kekuatan politik mereka diusrek-usrek. Organisasi mereka diganggu-ganggu, diobok-obok oleh pemodal besar dan para pionnya yang bermental kolonial, bermental imperialis.

Akhirnya, banyak dari mereka pun tumbang dan tersingkirkan dari gelanggang politik nasional.

Kita harus ingat, jangan kita lupa sejarah kalau dulu tokoh-tokoh bangsa kita sering selalu diadu domba. *Divide et impera*. Kalau dulu sultan lawan sultan, pangeran lawan pangeran, sekarang ketua umum partai lawan anak buah yang dibesarkan oleh dia sendiri.

Karena itu sekarang saya ingatkan, bagi setiap kader bangsa, di partai manapun yang nasionalis, yang cinta tanah air, agar selalu waspada. Jangan sampai tersingkir karena cara-cara licik seperti ini. Pastikan AD/ART organisasi aman dari upaya-upaya *hostile takeover*, pengambilalihan secara kasar karena uang.

Partai, Survei, Pemilih, dan Media Kadang Bisa Dibeli dan Dikuasai

Demokrasi kita dalam bahaya. Pertama, karena banyak pemimpin kita yang bisa dibeli. Kedua, karena banyak kelompok oligarki yang punya uang dan mampu membeli para pemimpin kita.

Ya, komprador-komprador dan kelompok oligarki yang ingin mengeruk keuntungan di Indonesia inilah yang mau, yang berkepentingan meng-*hijack* atau membajak proses demokrasi ini.

Jika saudara sudah lama jadi orang Indonesia, saudara tentu tahu ada uang ngarit, ada uang cendol, ada serangan fajar. Dengan kekuasaan dan uang mereka, mereka mau atur segalanya.

Kemudian yang lebih berbahaya, yang ingin saya ungkapkan adalah, manipulasi proses kotak suara yang adalah inti demokrasi kita. Ini yang bisa, dan sedang, dan pernah diselewengkan.

Kadang Survei Bisa Dipesan

Negara Indonesia sangat kaya. Kita bukan negara miskin. Kita punya semua sumber alam yang dibutuhkan untuk menjadi negara sejahtera.

Tetapi, masalahnya, sistem kita dirusak oleh suatu elite, suatu oligarki yang serakah. Oligarki yang serakah ini mau menguasai semua sumber ekonomi Indonesia, dan tega membiarkan sebagian besar rakyat Indonesia hidup dengan tidak layak. Mereka menguasai politik kita, pemerintahan kita, dengan banyak cara.

Sekarang yang banyak terjadi adalah manipulasi dan rekayasa. Hasil dari banyak polling, banyak survei yang bisa mempengaruhi pandangan masyarakat bisa dibeli. Saudara pun bisa pesan survei, "bikin saya nomor satu." Kita tahu itu semua.

Yang cilaka adalah, adalah ketika ada lembaga survei bekerja untuk tiga orang. Ke si A, dia dapat duit, dia kasih nilai bagus. Si B, dikasih nilai bagus. Si C, juga dikasih nilai bagus. Kerja sekali, dapat tiga pemasukan. Sekarang banyak kreativitas. Kita bangsa yang kreatif.

Alhamdulillah, sekarang dengan media sosial, keberpihakan pada konglomerat survei politik kepada calon-calon tertentu dapat terlihat. Di Pemilu 2014 lalu, ada pelaku-pelaku survei yang secara terang-terangan di media sosial berkampanye untuk calon pasangan yang berhadapan dengan saya.

Namun kesadaran masyarakat akan praktek-praktek seperti ini masih rendah. Belum semua masyarakat kita punya akses ke Internet. Adalah tugas kita bersama untuk menyadarkan masyarakat agar jangan mudah percaya survei. Di negara maju pun, survei bisa jadi alat penguasa. Misalkan, hampir semua lembaga survei di Amerika salah memprediksi siapa pemenang pemilu Presiden Amerika 2016. Menurut saya ini bukan kebetulan.

Oligarki Media



90% Informasi dari TV

Walaupun 50% dari populasi Indonesia sudah menggunakan Internet, TV masih menjadi media utama masyarakat dalam mengakses informasi. 18% masyarakat Indonesia membaca berita elektronik, 13% membaca media cetak dan 7% mendengarkan radio*.

* Badan Pusat Statistik, 2015

Nama Media	Milik	Media
RCTI, MNCTV, Global TV, iNews	MNC Group	TV
Trans TV, Trans7, CNN Indonesia	Trans Corp	TV
SCTV, Indosiar	Surya Citra Media	TV
TV One, ANTV	Viva Group	TV
Metro TV	Metro TV Group	TV
Koran Tempo, Wajalah Tempo	Tempo Group	Cetak
Jawa Pos	Jawa Pos Group	Cetak
Kompas, Jakarta Post	Gramedia Group	Cetak

Kadang Daftar Pemilih Bisa Dipesan

Wujud utama demokrasi kita adalah pemilihan, adalah kotak suara. Mereka yang dapat memberikan suara ke kotak suara adalah warga negara Indonesia yang sudah memiliki KTP. Setiap warga negara Indonesia memiliki satu suara di setiap pemilihan. Satu suara untuk Pemilu Legislatif tingkat Nasional. Satu suara untuk Pemilu Presiden. Satu suara untuk Pemilu Kepala Daerah.

Namun, di banyak pemilu, pengalaman Partai GERINDRA yang ikut Pemilu sejak 2009, kita menemukan daftar pemilih tidak jelas. Kita menemukan banyak 'hantu' dalam daftar pemilih itu. Ada nama-nama yang 30 kali disebut, di TPS yang berbeda-beda. Mereka bisa memilih beberapa kali, apalagi tinta yang digunakan untuk mencegah hal ini kadang bisa dihapus.

Ada juga nama-nama orang meninggal masih dalam DPT. Ini kita tahu semua. Di Pemilukada DKI 2012, jumlahnya belasan ribu. Di Pemilu 2014, jumlahnya jauh lebih besar. Bahkan ada lembaga riset yang mengatakan, potensinya sampai 20% jumlah pemilih²⁴.

Kadang Media Juga Bisa Dipesan

Kita lihat sekarang, banyak sendi-sendi kehidupan bangsa kita, lembaga-lembaga negara kita, institusi-institusi yang penting untuk demokrasi kita, satu per satu tergoyahkan.

Ada hal-hal yang sudah jelas di depan mata tidak benar dan tidak adil, tetapi sebagian elite kita pura-pura tidak tahu. Media kita sekarang banyak dikuasai pemodal besar, sehingga banyak masalah-masalah bangsa yang disebabkan oleh ulah mereka (pada pemodal besar) yang tidak diliput, atau diliput dengan narasi yang jauh berbeda dengan apa yang sesungguhnya terjadi.

Ini berbahaya karena banyak masyarakat kita berharap kepada media untuk mendapatkan pencerahan, mendapatkan

²⁴ Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), 2014

pengetahuan soal demokrasi kita. Masyarakat kita berharap media netral, tidak berpihak selain ke kepentingan bangsa, tidak menjadi propagandis kepentingan tertentu.

Saya angkat topi kepada media-media yang secara eksplisit menyatakan keberpihakan kepada partai politik, atau kandidat tertentu dalam sebuah pemilihan, atau isu politik tertentu. Apalagi jika pernyataan keberpihakannya diulang terus-menerus, sehingga masyarakat dapat mengetahui berita yang diterbitkan berat sebelah. Jangan seolah tidak berpihak, seolah tidak bisa dibeli, tetapi menjerumuskan.

Kita harus ingat, *knowledge is power*. Pengetahuan adalah kekuatan. Karena itu, media kerap kali dijadikan senjata. Sekarang kita sudah bisa buka dan baca, sebagian arsip rahasia negara-negara adidaya dari tahun 60an. Kita bisa baca sendiri, bagaimana mereka, dengan media yang mereka kuasai, pernah mempengaruhi pandangan masyarakat kita terhadap politik dalam negeri kita. Bukan tidak mungkin, apa yang pernah dilakukan di masa lalu, terus berlanjut hingga sekarang.

Kadang Ada Kotak Suara Ajaib

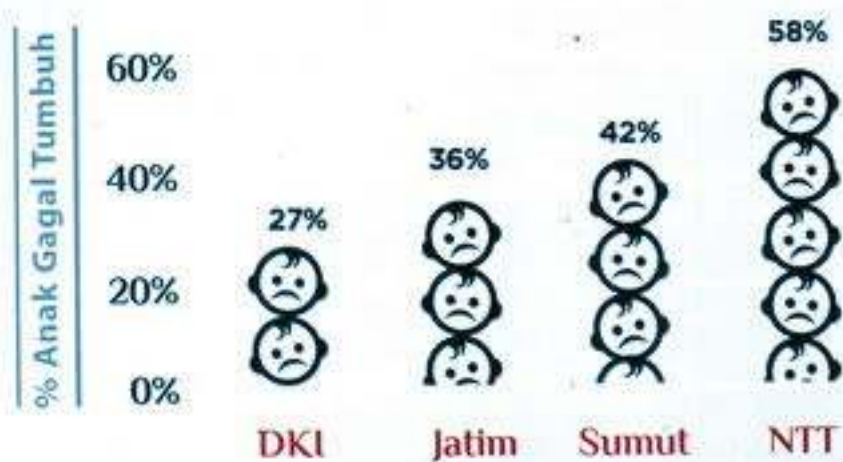
Saya tahu, Prabowo Subianto tidak disukai oleh banyak elite Indonesia, karena dia rodo rodo bonek yang sampaikan masalah ini. Namun, saya ingat, saya tidak tahu kapan akan dipanggil Tuhan. Karena itu, sekalian saja, saya merasa harus singkap kepada rakyat apa yang menjadi kegelisahan saya.

Saya rasa tidak perlu saya paparkan secara detail di sini. Saudara bisa cek sendiri, bagaimana di Pemilihan Umum lalu, di Pemilu 2014, ada pihak-pihak yang bisa membuka kotak suara tanpa mengikuti proses. Jika berlangsung lagi, ini sangat berbahaya bagi kelangsungan demokrasi kita.

Soal Perut & Gizi Indonesia



1 dari 3 Anak Gagal Tumbuh



1 dari 3 anak Indonesia mengalami gagal tumbuh (*stunting*) karena gizi buruk. Angka di NTT lebih parah: 2 dari 3 anak NTT mengalami *stunting*.

Alhasil, nilai Indonesia di Indeks Kelaparan Global (GHI) adalah 21,9 atau salah satu yang tertinggi di dunia, setara dengan Myanmar yang PDB per kapitanya 1/3 dari Indonesia.

* Bank Dunia, 2016

Konsumsi Buah Terendah di Asia

Konsumsi buah-buahan orang Indonesia hanya 35 kg per kapita per tahun. Angka ini sangat jauh di bawah standar kecukupan sehat sebesar 91 kg per kapita per tahun, dan adalah yang terendah di Asia.

* Fakultas Kedokteran UI, 2016



Strategi Kita

Mencegah Tragedi Indonesia

Paradoks Indonesia adalah suatu fenomena kegagalan yang terjadi di Indonesia. Negara yang kaya raya dengan sumber daya berlimpah-ruah, akan tetapi karena salah urus, mazhab ekonomi yang menyimpang, dan elite-elite yang berkhianat, terjadilah kekayaan nasional yang mengalir keluar (*net outflow of national wealth*).

Akibat dari kekayaan nasional yang terus-menerus mengalir keluar, negara menjadi tidak mempunyai uang yang cukup untuk membiayai pembangunan sehingga harus terus-menerus berhutang, dan banyak rakyat yang terjebak dalam kemiskinan karena situasi ekonomi yang sulit.

Agar Indonesia dapat tumbuh menjadi negara yang maju, fenomena Paradoks Indonesia ini harus dihapuskan. Jika fenomena ini tidak segera dihapuskan, sangat mungkin Indonesia akan menjadi Negara gagal (*failed state*).

Oleh karena itu, menjadi tugas kita bersama untuk menghapuskan fenomena Paradoks Indonesia dan mencegah tragedi yang akan terjadi dimana NKRI menjadi negara gagal dan mengalami disintegrasi sehingga menyebabkan NKRI punah.

Apakah keyakinan ini berlebihan? Tidak sama sekali, karena banyak buku-buku karya penulis-penulis ternama dari Barat yang meramalkan bahwa pada tahun 2030 tidak akan ada lagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kita jangan berpikir Republik Indonesia akan abadi, karena sejarah telah menunjukkan bahwa banyak negara yang bubar akibat masalah-masalah serupa yang tidak terpecahkan. Republik Sosialis Uni Soviet dan Republik Yugoslavia adalah contoh yang belum lekang dari ingatan kita.

Ini Potensi Negara Kita

Saya mengikuti proses politik, karena hanya melalui politik kita bisa mengubah keadaan. Politik bagi saya adalah keinginan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat. Itu arti yang baik dari politik. Keinginan memperbaiki kehidupan rakyat.

Walaupun kita menghadapi banyak kesulitan, saya melihat Indonesia masih ada harapan. Kekayaan alam kita begitu luar biasa. Dengan manajemen yang tepat, kita bisa cepat bangkit.

Potensi Kita: Pangan dan Agroindustri

Pangan ini adalah masalah hidup-mati suatu bangsa. Kita bisa hidup tanpa gedung-gedung pencakar langit. Kita bisa hidup tanpa mobil-mobil. Namun kita tidak bisa hidup tanpa pangan, tanpa beras, tanpa jagung, tanpa singkong, dan sebagainya.

Jadi, kita sebagai bangsa harus memandang pangan ini strategis. Siapa pun yang mau memimpin negara ini, harus memandang pangan ini sangat strategis. Dari dulu saya anjurkan ke pemerintah, ke penguasa, ke partai-partai yang sedang berkuasa, untuk fokus kembangkan sektor pertanian. Jangan kita impor pangan, supaya bangsa kita tidak tergantung pada siapa pun. Kalau kita tergantung impor, begitu mata uang kita melemah, akan sangat mahal beli barang impor dan rakyat bisa tidak makan.

Kita punya lahan cukup banyak, kita punya ekosistem dan *ecoclimate* yang sangat cocok untuk pertanian. Yang jelas kita ini negara tropis. Sepertiga dunia negara tropis. Dan, Indonesia menempati sepertiga dari zona tropis dunia. Kita negara yang

zona tropisnya paling panjang kedua setelah Brasil. Brasil lebih panjang dari kita sedikit.

Di zona tropis ini, kita bisa tiga kali panen setahun. Kalau negara-negara temperate, negara-negara yang non-tropis, hanya bisa satu kali. Karena ada enam bulan musim dingin, jadi hanya bisa satu kali panen. Kita tiga kali. Ini keunggulan kita.

Sebagai contoh, sebuah pohon yang tumbuh di negara temperate butuh 25 tahun untuk besar. Baru bisa ditebang setelah 25 tahun. Bahkan ada yang baru bisa ditebang setelah 27, 30 tahun. Di negara kita, 5 tahun bisa ditebang. Jadi, keunggulan kita, 5 kali negara di luar zona tropis.

Dari dulu, bangsa-bangsa lain datang ke kita, dan mengambil kekayaan kita. Apa yang diambil? Mereka ambil produk-produk pertanian. Rempah, karet, teh, kopi kita. Kan begitu?

Kita memiliki keunggulan yang tidak dimiliki bangsa-bangsa lain. Kita harus memanfaatkan keunggulan ini. Ketahanan dan kekuatan ekonomi kita berada di sektor pertanian dalam arti luas. Pertanian, perikanan, kehutanan, dan sebagainya. Inilah yang seharusnya kita kelola.

Dan, menurut saya, kelolanya ini harus dengan telaten, dengan teliti, dengan komprehensif. Tidak bisa kita serahkan semua ke pasar masalah yang strategis seperti pangan ini.

Situasi Pertanian Indonesia Saat Ini



1 dari 3
di Sektor
Agrikultur

1 dari 3 orang Indonesia bekerja di sektor agrikultur. 40% dari orang Indonesia yang miskin bekerja di sektor ini*

* Badan Pusat Statistik, 2016

Situasi **Sekarang** vs **Seharusnya**

Tahapan	Dikerjakan Oleh	Nilai Tambah Untuk	Dikerjakan Oleh	Nilai Tambah Untuk
Pertanian	Petani	Petani	Petani	
Pengolahan				
Pengepakan	Perusahaan Swasta	Pengusaha Bermodal Besar	Koperasi, BUMDES & BUMN	Petani & Rakyat Kecil
Pendistribusian				
Penjualan	Supermarket		"Gerai Tani"	

11 juta Hektar Menganggur

11 juta hektar lahan pertanian dibiarkan menganggur. 53% irigasi lahan pertanian kita dalam kondisi rusak. Ini menyebabkan rendahnya produktivitas lahan pertanian*

* Kementerian Pertanian, 2016

Potensi Kita: Pasar Domestik Yang Besar

Dengan populasi 250 juta orang, dan jumlah 'kelas konsumen' dan 'kelas konsumen berkembang' lebih dari 61,9% populasi atau sekitar 150 juta orang²⁵, Indonesia adalah pasar yang sangat besar dan menarik.

Dengan jumlah yang demikian besar, sebenarnya hampir semua industri bisa berkembang pesat walau hanya menjual produk dan jasanya untuk pasar Indonesia. Misalkan, setiap orang Indonesia butuh pakaian. Jika setiap orang membeli satu saja celana setiap tahun, dan jika harga celana Rp. 100.000 saja, ini sudah bisnis Rp. 25 triliun. Jika bisa untung 10%, ada keuntungan Rp. 2,5 triliun. Ini baru celana saja. Belum bicara pakaian lain.

Saking besarnya pasar domestik Indonesia, kita bisa melihat bagaimana saat ini banyak perusahaan asing berlomba-lomba untuk masuk dan jual produk mereka di pasar kita. Miliaran dollar mereka keluarkan untuk iklan di televisi dan jalan-jalan raya demi mempengaruhi selera kita, gaya hidup kita.

Saya ulangi, saya tidak anti asing. Mereka boleh menjual produk dan jasa di Indonesia. Tetapi kita harus bisa bersaing dengan mereka. Jika jual celana, Pemerintah harus pastikan orang Indonesia juga bersaing jual celana jangan sampai pasar dimonopoli oleh kekuatan ekonomi besar.

Saya percaya, kualitas produk-produk Indonesia tidak kalah jika dibandingkan dengan produk asing. Saat ini kita sudah punya sepeda buatan Indonesia. Kapal laut buatan Indonesia. Senjata buatan Indonesia. Bahkan senjata buatan Pindad Bandung kerap unggul di kompetisi internasional melawan merek-merek Eropa dan Amerika. Bahkan TNI mampu menjuarai kejuaraan menembak internasional antar angkatan bersenjata di Australia selama 9 tahun terakhir berturut-turut menggunakan senjata buatan Pindad²⁶. Ini bukti konkrit kemampuan industri kita.

²⁵ Bank Dunia, 2015

²⁶ Australian Army Skill at Arms Meeting, 2016

Mewujudkan Ekonomi Konstitusi

Jika saudara pernah belajar ilmu ekonomi, saudara tentu tahu kalau ada banyak mazhab ekonomi di dunia ini. Ada mazhab ekonomi yang disebut neoklasikal, pasar bebas, dan neoliberal. Ketiga ini sering dikelompokkan sebagai mazhab ekonomi Adam Smith. Kemudian ada mazhab sosialis, atau mazhab ekonomi Marx.

Dalam perjalanan sejarah, ada yang mengatakan, “Indonesia harus memilih A”. Ada juga yang bilang, “sebaiknya kita pakai B”. Pertentangan ini ada sampai sekarang.

Kalau saya berpendapat, “Lho, kenapa kita harus memilih?”. Kita mau ambil yang terbaik dari kapitalisme, dan yang terbaik dari sosialisme.

Gabungan yang terbaik dari keduanya inilah yang disebut oleh Bung Karno, Bung Hatta, Bung Syahrir, oleh bapak saya Prof. Sumitro, sebagai ekonomi kerakyatan, atau ekonomi Pancasila, yang bentuknya tertulis di Undang-undang Dasar '45, khususnya di pasal 33. Karena itu boleh juga kita sebut ‘ekonomi konstitusi’.

Setelah 1998, Kita Keliru

Saya ingin menggugah sekarang, bahwa setelah '98 saya kira kita keliru. Setelah '98, sebagai bangsa, kita melupakan jati diri kita. Kita tinggalkan pasal 33 Undang-undang Dasar '45, kita tinggalkan ekonomi Pancasila.

Di situlah perjuangan saya selama belasan tahun ini. Menggugah, membangkitkan lagi kesadaran, mengingatkan ajaran-ajaran Bung Karno: berdiri di atas kaki kita sendiri.

Ini yang saya kira fundamental, dan banyak kita lupakan. Kita percaya globalisasi, kita percaya katanya sekarang sudah tidak ada perbatasan, *borderless world*.

Coba Anda mau ke Amerika. Anda tidak bisa masuk tanpa visa. Kadang orang Indonesia tidak dikasih visa. Berarti ada border. Sekarang banyak orang mau ke Australia lewat laut kita, namun kapal-kapal perang Australia menahan. Jadi, walau sekarang kita banyak berdagang, border tetap ada. Karena itu kita harus punya kekuatan sendiri.

Ingatlah, nasionalisme bukan hal yang jelek. Nasionalisme adalah cinta bangsa sendiri. Kalau bukan kita yang mencintai bangsa kita, siapa? Apa kita harus minta dikasihani bangsa lain?

Nasionalisme juga bukan sesuatu yang hina. Semua bangsa membela kepentingan nasional bangsa mereka. Kenapa bangsa Indonesia tidak boleh membela kepentingan kita? Kenapa petani kita tidak boleh dibantu negara?

Contoh, dalam bidang pertanian, petani Amerika dibantu negaranya. Petani Australia dibantu negaranya. Petani Vietnam dibantu negaranya. Petani Thailand dibantu negaranya. Kalau kita bilang, "kita mau dong, kepentingan nasional kita harus dijaga." Kadang kita dibilang, "wah, kamu anti asing." Tidak. Saya katakan, kita tidak boleh anti asing. Dunia sudah semakin sempit, dan tradisi bangsa Indonesia adalah bangsa yang terbuka. Kita bersahabat, tetapi kita harus kuat dan bisa mandiri.

Resep Keliru

IMF

Tahun 1998



Serahkan Rupiah Ke Pasar

Nilai tukar rupiah harus seluruhnya diserahkan ke pergerakan pasar, BUMN harus dijual dan lajur perdagangan luar negeri harus

Tidak Boleh Punya Industri

Dukungan pemerintah kepada industri-industri strategis seperti industri agro, dan pengembangan industri penerbangan (IPTN) harus dihentikan.

Tujuan Kita: Ekonomi Konstitusi, Bukan Sosialisme

Sosialisme murni, walaupun bagus dalam tulisan, sebenarnya tidak bisa dijalankan. Karena, dalam sosialisme murni pun asas sama rasa sama rata tidak mungkin. Nanti orang tidak ada yang mau kerja keras.

Ya, dalam sosialisme murni, orang kerja keras dan tidak kerja keras bergaji sama. Orang pintar dan orang tidak pintar bergaji sama. Orang mau belajar dan tidak mau belajar bergaji sama. Bahkan dalam utopia sosialis, di ujungnya tidak ada uang. Tidak boleh ada uang. Bagaimana? Ini kan utopia. Impian. Susah dilaksanakan, dan terbukti negara-negara yang coba jalankan sistem sosialis murni gagal di mana-mana.

Artinya, bapak-bapak kita, Bung Karno, Bung Hatta, Bung Syahrir benar. Yang tepat adalah ekonomi campuran.

Bapak saya di meja makan selalu bercerita. Istilah Prof. Sumitro adalah ekonomi campuran, *mixed economy*. Yang terbaik dari kapitalis, dan yang terbaik dari sosialis, ini yang kita pakai.

Kalau kita baca sejarah Indonesia, dulu pernah ada keputusan untuk menggunakan sistem ekonomi Pancasila. Ekonomi kita harus berasaskan kekeluargaan. Intinya, yang kuat monggo, tetapi yang lemah harus ditarik. Nanti akan ada suatu *equilibrium*, ada keseimbangan.

Tidak benar, ekonomi yang berasaskan “yang kuat harus selalu menang, yang lemah, ya terserah”. Paham kapitalisme murni seperti itu. *Greed is good*, keserakahan bagus. Hasilnya, yang lemah akan mati.

Kalau dalam paham kapitalisme murni, nanti yang sejahtera, yang hidupnya bagus, mapan, dan aman, hanya 1% dari penduduk. Bahkan mungkin 1% dari yang 1%. Hanya beberapa keluarga saja yang benar-benar kaya. Ini yang terjadi sekarang di Indonesia, yang juga terjadi di Barat. Di Barat pun sudah banyak yang mempertanyakan. Dulu banyak yang percaya *trickle down effect*. Ekonomi menetes ke bawah.

Kenyataannya, adalah *trickle up effect*. Mereka yang kaya, semakin kaya – sementara mereka yang miskin semakin miskin saja.

Kalau kita, yang harus kita jalankan adalah mazhab ekonomi jalan tengah. Mazhab ekonomi campuran, atau kata mantan PM Inggris Tony Blair “ekonomi jalan ketiga”, “*the third way*”. Atau, istilah tahun '45, kembali ke Bung Karno, Bung Hatta, mazhab “ekonomi kerakyatan”.

Sekarang kalau kita ke Vietnam, ada papan di pinggir jalan bertuliskan “*economy for the people, not people for the economy*”. Ekonomi harus untuk rakyat, bukan rakyat untuk ekonomi. Orientasi kita harus seperti itu.

Kalau sekarang kita keliru, saya menilai bahwa kita harus berani banting haluan. Kita sekarang harus kembali ke cetak biru yang dibuat oleh Founding Fathers, para pendiri bangsa kita, yaitu Undang-undang Dasar '45.

Saya katakan demikian, karena di Undang-undang Dasar '45 pasal 33 yang asli sudah sangat gamblang. Bahwa ekonomi kita tidak menggunakan mazhab pasar bebas, tetapi berasaskan kekeluargaan. Kemudian, ayat 2 dari pasal 33 sangat gamblang lagi. Bahwa semua “cabang-cabang produksi yang penting harus dikuasai negara”. “Menguasai hajat hidup orang” dikuasai oleh negara. Selanjutnya, “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara, dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Inilah rancang bangun ekonomi kita. Inilah sistem yang seharusnya kita jalankan – ekonomi konstitusi. Kalau kita konsekuen menjalankan, saya kira, mengalirnya kekayaan alam kita ke luar, mengalirnya kekayaan nasional kita ke luar yang saat ini terjadi, akan bisa kita hentikan.



Banjir Harta Ke Luar Indonesia

Imperialism Tua vs Modern Kapitalisme

“Tatkala modern-kapitalisme ini sudah dewasa, maka modal kelebihanannya alias surplus kapitaal-nya lalu ingin masukkan di Indonesia - modern-imperialisme lalu menjelma di muka ini, ingin menggantikan imperialism tua yang juga sudah tua bangsa.

Cara pengambilan rezeki dengan jalan monopoli dan paksa makin lama makin diganti cara pengambilan rezeki dengan jalan persaingan merdeka dan buruh merdeka.

Cara pengambilan berubah, sistemnya berubah, wataknya berubah, tetapi banyakkah perubahan bagi rakyat Indonesia? Banjir harta yang keluar Indonesia bukan semakin surut, tetapi malahan makin besar, drainage Indonesia malahan makin makan.”

“Mencapai Indonesia Merdeka”

Ir. Sukarno, Maret 1933

Paham Ekonomi Konstitusi: Bebas Boleh, Tetapi Harus Waspada

Seperti tadi saya sampaikan, ekonomi kita harus ekonomi tengah, ekonomi campuran, ekonomi konstitusi. Jangan *full* kapitalis, jangan *full* sosialis.

Kita harus ambil yang terbaik dari kapitalisme. Kapitalisme mendorong inovasi. Kapitalisme mendorong *entrepreneurship* / kewirausahaan, dan mendorong investasi. Tetapi, kapitalisme harus diimbangi dengan pengamanan rakyat banyak. Kalau kapitalisme murni, yaitu melepaskan semua hal ke pasar, akibatnya adalah apa yang sekarang kita alami. Di ekonomi bebas, tidak ada perlindungan, tidak ada harapan untuk orang miskin.

Sosialisme menjamin adanya jaring pengamanan untuk orang paling miskin. Pemerintah, pada saat-saat yang kritis memang harus intervensi. Pemerintah negara mana pun yang ingin mengurangi kemiskinan harus menjadi pemerintah yang aktivis, yang berani turun membantu mereka yang di bawah garis kemiskinan, karena mereka tidak berdaya. Jika tidak ada keberpihakan, mereka akan terus tidak punya kemampuan, pendidikan, keterampilan, bahkan gizi saja kurang. Hal-hal baik daripada sosialisme itu juga harus kita ambil.

Namun, gaya-gaya populis, sosialis murni justru kontraproduktif untuk ekonomi kita. Kita tidak bisa membagi-bagi uang tanpa ada pendidikan, tanpa ada pelatihan, tanpa ada manajemen, tanpa ada pendampingan. Harus ada strategi. Inilah yang dimaksud *nation building*, pembangunan negara. Kalau kita masih di taraf *nation building*, pemerintah harus aktif mengarahkan rakyat.

Sejarah dunia, yang saya pelajari, sejarah antarbangsa, itu kejam. Pimpinan negara asing tidak ada urusan, dia hanya memikirkan kepentingan nasional negara dia. Dia tidak kasihan pada bangsa lain. Tidak ada negara yang akan mengutamakan kepentingan bangsa lain.

Ucapannya mungkin beda, tetapi dia pada akhirnya akan selalu mengutamakan kepentingan dia, kepentingan negaranya.

Karena itu, salah satunya saya selalu katakan bahaya kalau soal makan tergantung impor. Makan tidak boleh tergantung impor. Kita tidak boleh menganggap bahwa semua negara sayang pada Indonesia. Kita tidak bisa menggantungkan urusan perut bangsa kita ke bangsa lain.

“Oh, gampang, kalau kita kurang makan, nanti kita impor dari Vietnam, atau dari Thailand.” Beberapa tahun yang lalu Thailand sudah bikin kontrak dengan kita, untuk sekian juta ton beras. Namun, Thailand kena musibah banjir. Sawah-sawahnya banjir. Terpaksa tidak bisa memenuhi komitmen dia.

Semua negara bisa kena bencana alam, bisa perang. Thailand pernah banjir, 70% sawahnya banjir, puso. Rusia pernah kebakaran sampai ladang-ladang gandumnya terbakar, tidak bisa ekspor gandum. Harga gandum naik, harga jagung naik, harga beras naik. Dibandingkan dengan angka tahun 2000, indeks harga bahan makanan dunia di bulan Januari 2017 sudah naik 91%²⁷.

Bayangkan. Ini sudah fenomena, gejala yang sudah kita ingatkan berkali-kali. Perdagangan bebas boleh, tetapi harus dikendalikan Pemerintah, dan harus selalu waspada.

²⁷ Food Price Index, tahun 2001: 91,1. Januari 2017: 173,8. FAO, 2017

Mazhab Ekonomi Menetes ke Bawah?

“Beberapa orang masih saja membela teori ‘menetes ke bawah’. Mereka lugu dan tidak waspada. Seperti perintah “kita tidak boleh membunuh”, sekarang kita harus mengatakan “kita tidak boleh menjalankan” kebijakan ekonomi yang eksklusif dan tidak adil.”

Paus Francis, 23 November 2013

.....

“Sistem ekonomi ‘menetes ke bawah’ meningkatkan kesenjangan pendapatan, menciptakan ketidakadilan di hampir semua negara. Ketika yang kaya semakin kaya, kekayaan tidak menetes ke bawah.”

Direktur IMF Christine Lagarde, 23 Juni 2015

.....

“Kita (bangsa Amerika) tidak bisa lagi menjalankan kebijakan ekonomi yang gagal. Sudah waktunya teori ‘menetes ke bawah’ dikubur dalam-dalam.”

Hillary Clinton, 7 Juli 2015



Christine Lagarde

Hillary Clinton

Paus Francis

Paham Ekonomi Konstitusi: Pemerintah Harus Jadi Pelopor

Kalau pakai paham ekonomi konstitusi, maka soal pembangunan, soal pertanian, soal pembangunan prasarana, soal menciptakan lapangan kerja, dan soal mengurangi kemiskinan, pemerintah harus proaktif. Pemerintah harus jadi pelopor.

Dalam membangun ekonomi, menyelamatkan negara, membangun kemakmuran, dan mengurangi kemiskinan, pemerintah harus jadi pelopor. Pemerintah tidak boleh hanya menjadi wasit.

Ini bedanya paham neoliberal dan paham ekonomi konstitusi.

Paham neoliberal, paham neoklasikal, mungkin bagus untuk Barat sekarang. Tetapi, kita harus sadar, banyak negara Barat sudah 500 tahun di depan kita. Pendapatan per kapita di negara-negara Barat yang maju sudah di atas \$ 30.000, \$ 40.000, bahkan \$ 50.000. Kita baru di kisaran \$ 3.300.

Bagi para pengikut paham neoliberal, seperti Milton Friedman, Von Hayek, Thatcher, mereka berpendapat, "*the least government is the best government.*" Semakin sedikit peran pemerintah, semakin bagus. Pemerintah harus di belakang. Pemerintah wasit saja. Pemerintah tidak boleh ikut dalam proses ekonomi.

Kalau kita ikuti paham ini, siapa yang mau bikin waduk? Apakah swasta mau bikin waduk? Siapa mau bikin terminal, siapa mau bikin pelabuhan, terutama di tempat-tempat yang terisolasi?

Swasta tidak akan mau. Jangka waktu balik modal pembangunan infrastruktur terlalu lama untuk swasta. Karena itu sekarang lihat di Indonesia, sebagian besar pembangunan di sekitar Jakarta. Pabrik-pabrik besar adanya di sekitar Jakarta. Siapa swasta yang mau bangun pabrik di Halmahera atau di Seram? Karena dari itu, pemerintah harus jadi pelopor ekonomi.

Kita negara besar. Jika ada yang sudah kuat, silakan. Saya kira pemerintah tidak perlu terlibat dalam industri bioskop, umpamanya, atau industri ayam goreng, atau buka kedai kopi. Tapi pemerintah harus mendidik pemuda-pemuda Indonesia yang putus sekolah dan tidak memiliki pekerjaan. Untuk mereka, pemerintah harus intervensi dengan berani. Kalau perlu hulu sampai hilir. Anak-anak itu dilatih, diberi keterampilan, dan didampingi sampai mereka bisa produktif.

Ini bukan pekerjaan yang ringan. Untuk petani kita, kalau perlu pemerintah bantu dari benih. "Ini benihnya, ini caranya menanam, ini caranya mengairi, jumlah air segini, jangan terlalu banyak. Ini pupuknya. Nanti panennya begini. Nanti setelah kamu panen, saya beli dari kamu. Saya yang pasarkan, sampai masuk ke supermarket yang paling hebat kualitasnya."

Kalau pemerintah tidak bantu, mereka selamanya tidak bisa bersaing karena posisi mereka saat ini terlalu lemah. Ini argumen saya. Sebetulnya ini bukan argumen yang baru. Banyak negara sudah melaksanakan. Tiongkok, Malaysia, Thailand, Taiwan, dan India sudah melakukan ini.

Tidak ada cara lain untuk membuat rakyat yang lemah dapat bersaing dan punya harapan. Pemerintah harus membantu. Apalagi untuk pangan, karena pangan adalah *strategic commodity*. Pangan bukan sekadar *economic commodity*. Pangan adalah *strategic commodity*, komoditas strategis untuk kepentingan bangsa dan negara.

Nilai Rupiah Kita

Pelemahan vs Dollar AS 3.400.000%



Di tahun 1949, 1 Rupiah sama dengan 1 Gulden Belanda, yang harganya sama dengan 3,8 Dollar AS. Nilai tukar Rupiah sekarang, Rp. 13.000 per \$ 1 sama dengan 13.000.000 Rupiah lama (redenominasi 1965). Dari 3,8 ke 13.000.000 adalah pelemahan 3,4 juta persen

* Cato Institute, 2015



Mata uang itu cermin dari produktivitas suatu bangsa. Kalau produktivitas kita kuat, mata uang kita akan mapan. Selama kita tidak produktif, selama itu mata uang kita tidak akan kuat, dan selama itu ekonomi kita akan menjadi bancakan bangsa lain.

Tugas Kita: Hentikan Kebocoran dan Dorong Produksi Bangsa

Nasib bangsa kita harus kita raih sendiri. Kalau kita tidak berani memperbaiki keadaan kita, kondisi negara kita akan semakin parah. Karena itu, di buku ini saya sampaikan kepada saudara, apa-apa saja yang menjadi tugas kita bersama.

Pertama, kita harus menyelamatkan kekayaan negara. Kita harus hentikan mengalirnya kekayaan negara ke luar negeri supaya kita punya uang untuk membangun pabrik-pabrik dan mendorong produksi nasional. Kalau kita terus biarkan kekayaan kita mengalir ke luar, suatu saat kita akan kehilangan sumber daya untuk memperbaiki semuanya.

Kita perlu punya pabrik mobil buatan Indonesia. Orang Indonesia beli satu juta mobil tiap tahun. Masa satu pun tidak ada merek Indonesia? Kita juga perlu punya pabrik motor dengan merek Indonesia. Kita perlu punya pabrik pesawat terbang Indonesia. Kita pernah punya, dan kita harus punya kembali. Kita perlu perkuat pabrik kereta api buatan Indonesia. Kita perlu perkuat pabrik kapal-kapal buatan Indonesia.

Dengan mendorong produksi bangsa, anak-anak Indonesia akan punya pekerjaan yang baik, yang layak, yang terhormat. Kita tidak mau anak-anak kita jadi kuli-kuli seterusnya.

Inilah inti dari strategi ekonomi yang saya rumuskan: Mendorong produksi bangsa. Mendorong produktivitas bangsa. Produksi bangsa berarti barang untuk keperluan pasar Indonesia dihasilkan oleh rakyat Indonesia, di Indonesia, dengan bahan-bahan Indonesia.

Kalau pasar lain mau beli, Alhamdulillah. Saya juga ingin kita ekspor barang-barang produksi Indonesia ke luar negeri.

Kalau produksi kita kuat, kalau kita tidak banyak impor, kalau kita menghasilkan sesuatu yang bernilai ekonomis, terutama

pangan, pakaian, kebutuhan-kebutuhan pokok, energi, ini kan value? Berarti mata uang kita dengan sendirinya akan menguat. Orang akan mencari, orang akan membeli rupiah.

Mata uang itu cermin dari produktivitas suatu bangsa. Kalau produktivitas kita kuat, mata uang kita akan mapan.

Kemarin tahun 2003-2013, nilai tukar mata uang kita cukup stabil, selama sepuluh tahun. Kenapa? Karena ekspor kita kuat. Tapi, ekspor kita pada tahun-tahun itu mengandalkan bahan baku. Yang saya kecewa, sepuluh tahun kemarin ketika kita ada *profit*, ada keuntungan, tidak dimanfaatkan untuk banting setir memperkuat produksi. *Value add, processing*.

Tetapi, saya masih sangat optimistis. Kita punya kekuatan fundamental, kita punya kekuatan inheren. Hanya manajemennya harus cepat dan cerdas. Bangsa Indonesia sudah terlalu banyak menghambur-hamburkan kesempatan.

Dengan strategi nasional yang tepat, saya yakin Indonesia bisa punya kekuatan industri yang dihormati. Kita akan punya produk-produk industri yang dihormati.

Dan pada ujungnya, Rupiah kita bisa kuat.

Investasi Asing Ke Mana?

Sektor Ekonomi

Jumlah Investasi Luar Negeri (Miliar \$)

Keuangan dan Jasa Perusahaan	165
Industri Pengolahan	34
Pertambangan dan Penggalan	24
Listrik, Gas dan Air	23
Jasa-Jasa	18
Pengangkutan dan Komunikasi	13
Hotel dan Restoran	11

51% Uang Asing

Ke Sektor Keuangan

Lebih dari setengah investasi asing yang masuk ke Indonesia mengucur ke sektor keuangan. Jumlahnya \$ 165 miliar atau Rp. 2.145 triliun*

Usaha Yang Boleh 100% Asing



Bidang Usaha	Industri
Jalan Tol	Pekerjaan Umum
Pengelolaan Sampah	Pekerjaan Umum
Cold Storage	Perdagangan
Pialang Berjangka	Perdagangan
Restoran, Bar dan Kafe	Pariwisata & Ekra
Gelanggang Olahraga	Pariwisata & Ekra
Produksi dan Penedaran Film	Pariwisata & Ekra
Warung Telekomunikasi	Kominfo
Jual Beli Online	Kominfo
Bahan Baku Obat	Kesehatan
Praktek Dokter	Kesehatan
Dana Pensiun	Keuangan

* Menurut Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2016

Kita patut kaget dan menyayangkan, pemerintah kita sekarang tidak jera-jeranya melakukan liberalisasi ekonomi kita. Cabang-cabang ekonomi yang dulu tidak boleh diserahkan ke asing, sekarang kita buka ke asing dan dibuka 100%, padahal sebenarnya hal ini tidak boleh dilakukan.

Di negara-negara tetangga kita saja, tidak sembarang orang boleh masuk ke sektor-sektor ini, tetapi di negara kita dibuka seluas-luasnya.

Tugas Kita:

Jadikan BUMN Ujung Tombak Ekonomi

Menurut saya, untuk hal-hal yang strategis, pemerintah harus pakai BUMN sebagai ujung tombak. BUMN sebagai *implementer*. Banyak negara bisa. Singapura bisa. Tiongkok bisa. Kita juga harus bisa.

Untuk itulah, BUMN-BUMN kita perlu merekrut manajer-manajer, insinyur-insinyur, direksi-direksi yang kapabel. Tidak mungkin tidak ada orang-orang handal di Indonesia. Apakah kita tidak percaya kepada bangsa kita sendiri? Yang banyak orang-orang yang tidak diberikan kesempatan.

Saya kembali, pengalaman saya di tentara. Ada sebuah adagium, sebuah ajaran klasik, di semua tentara di seluruh dunia. Ajarannya adalah "*there are no bad soldiers, only bad commanders*".

Tidak ada prajurit yang jelek, yang ada hanya komandan-komandan yang jelek. Yang ada hanya pemimpin-pemimpin yang jelek. Kalau dipimpin dengan baik, saya yakin anak-anak muda, profesional-profesional kita bisa. Saya yakin, dan saya sudah buktikan berkali-kali.

Sebagai contoh, bangsa Indonesia bukan bangsa yang punya salju. Ada salju di puncak Gunung Jayawijaya, tapi rakyat kita rata-rata belum pernah bertemu salju. Tapi, waktu saya bikin tim untuk masuk ke Himalaya, anak-anak kita yakin bisa sampai ke puncak, dan mereka tidak kalah dari bangsa-bangsa yang sudah punya salju dan punya gunung seperti di Eropa. Kita berlatih hanya tiga bulan. Banyak pendaki negara lain yang berlatih tiga, empat tahun tetapi gagal mencapai puncak Everest. Tiga bulan berlatih, putera-putera Indonesia bisa sampai di puncak dunia, dan jadikan Indonesia bangsa Asia Tenggara pertama yang berhasil.

Inilah 9 BUMN Paling Untung



Nama BUMN	Laba Bersih (Rp.)	Status
Bank Rakyat Indonesia	24 triliun	Terbuka
Telkom	21 triliun	Terbuka
Bank Mandiri	20 triliun	Terbuka
Pertamina	18 triliun	100% Negara
PLN	11 triliun	100% Negara
Bank Negara Indonesia	10 triliun	Terbuka
Perusahaan Gas Negara	8 triliun	Terbuka
Semen Indonesia	5 triliun	Terbuka
Pupuk Indonesia	4 triliun	Terbuka

Hanya 2 BUMN di Fortune 500

Dari ratusan BUMN di Indonesia, hanya Pertamina dan PLN yang terdaftar di ranking Fortune 500. Ini tidak mencerminkan posisi Indonesia sebagai negara dengan perekonomian ke 16 terbesar di dunia.

* Majalah Fortune, 2016

Tugas Kita: Kekayaan Alam Indonesia Harus Diolah di Indonesia

Kekayaan alam Indonesia harus diolah di Indonesia. Kenapa? Karena kita bisa tambah pendapatan negara dari mengolah kekayaan alam kita yang sekarang banyak kita jual mentah. Karena mentah, karena belum diolah, kita jual murah. Kita kehilangan kesempatan untuk mendapatkan nilai tambah dari bahan alam kita.

Bahkan, saya mendapat laporan, jika dihitung selama 30 tahun terakhir, kehilangan nilai tambah karena ekspor konsentrat tembaga mencapai \$ 108 miliar. Untuk gas alam, karena jual mentah selama 30 tahun, kita kehilangan kesempatan nilai tambah \$ 225 miliar. Dua komoditas ini saja, sudah \$ 333 miliar atau Rp. 4.329 triliun yang tidak kita olah²⁸.

Sebagai contoh, konsentrat tembaga. Tahun 2015 lalu kita ekspor konsentrat sekitar 3 juta ton dengan harga \$ 1.499 per ton²⁹. Dari ekspor ini kita dapat \$ 4,5 miliar. Padahal jika kita olah di dalam negeri jadi tembaga, emas, perak, asal sulfat dan slag, kita bisa dapat \$ 8,1 miliar³⁰. Kita hilang kesempatan dapat nilai tambah \$ 3,6 miliar, sekitar Rp. 46,8 triliun setiap tahun.

Contoh, gas alam. Pada tahun 2015 lalu, kita ekspor gas alam sejumlah 3.100 MMSCD atau 20 juta ton. Kita jual sekarang \$ 7 per MMBtu³¹. Total kita dapat \$ 7,2 miliar. Padahal kalau kita olah terlebih dahulu jadi methanol, olefin dan ammonia, kita bisa dapat \$ 14,7 miliar. Lebih dari dua ratus persen pendapatan kita naik, jika kita lakukan pengolahan.

Ini masalah besar, tapi juga kesempatan besar. Sudah kita biarkan keuntungan ekspor kita hilang, kita juga tidak mau olah sumber daya alam kita. Kalau kita olah di dalam negeri, kita bisa menjadi negara sangat kaya. Kita akan menjadi negara mungkin keenam terkaya di dunia.

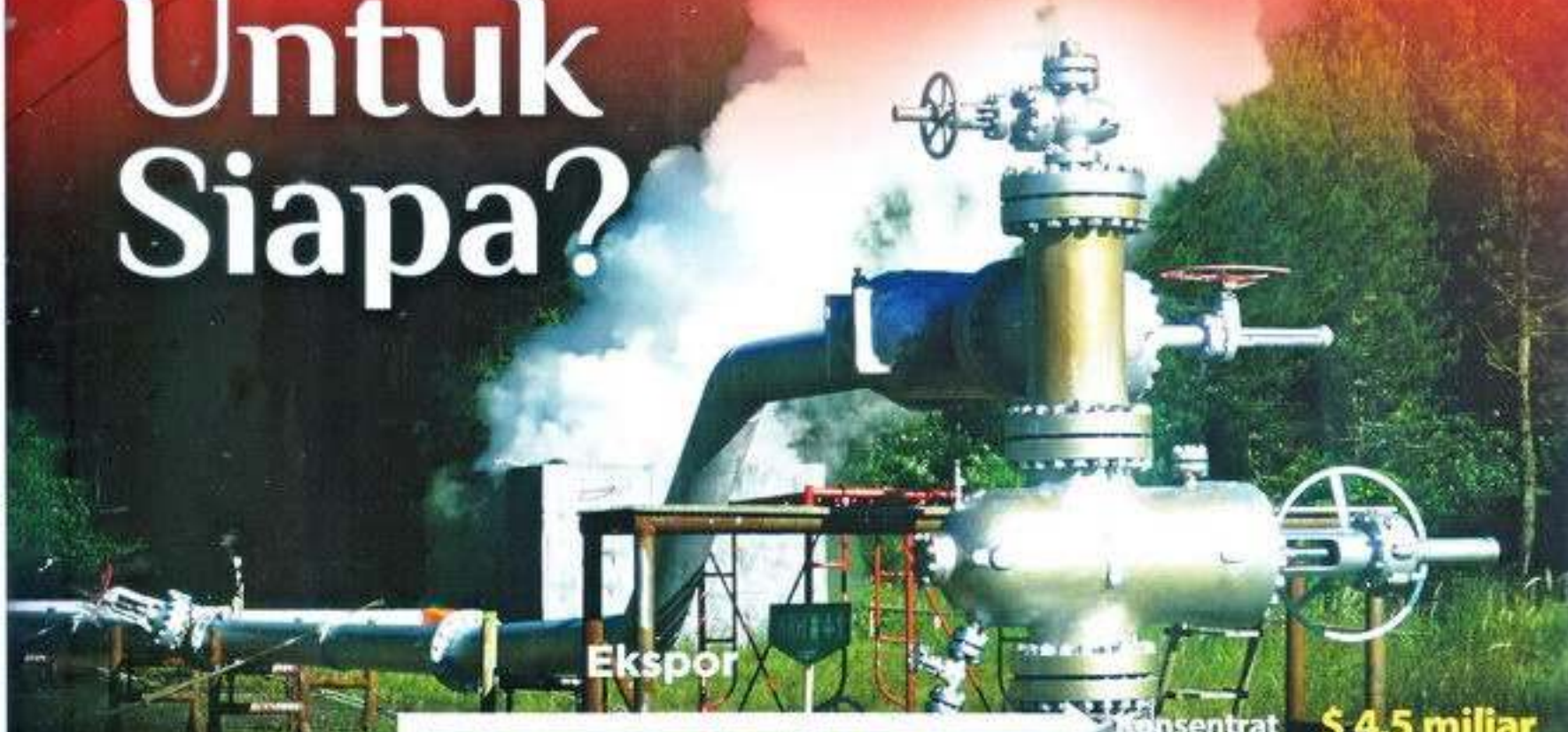
²⁸ Dewan Pakar Partai Gerindra – Rauf Purnama, 2017

²⁹ Kementerian Perdagangan, 2016

³⁰ Dewan Pakar Partai Gerindra – Rauf Purnama, 2016

³¹ MMBtu = one million British Thermal Units, satuan yang umum digunakan untuk menghitung kuantitas gas alam.

Nilai Tambah SDA Untuk Siapa?



Dari Tembaga:
Rp. 46 Triliun
 Untuk Orang Lain per Tahun

Jika diolah jadi berbagai produk, 3 juta ton konsentrat tembaga yang kita ekspor tiap tahun dapat berikan pendapatan Rp. 105,3 triliun. Tapi, karena kita jual tanpa diolah, kita hanya dapat Rp. 57,2 triliun. Artinya kita berikan lebih dari Rp. 46 triliun nilai tambah untuk orang lain*. Tambahan Rp. 97,5 triliun juga kita bisa dapatkan dari penjualan 20 juta ton gas alam kita, jika kita olah dulu jadi methanol, olefin dan ammonia sebelum kita jual ke luar negeri.

* Kajian Dewan Pakar Partai Gerindra, Rauf Purnama 2017

Koperasi Terbesar Kita



Nama Koperasi	Aset (Rp.)	Anggota
Kopim Jasa Pekalongan	4,8 triliun	8.070
Kopdit CU Lantang Tupo Sanggau	2,2 triliun	166.183
Kopdit Oancur Kasih	1,6 triliun	127.927
KSP Sejahtera Bersama Bogor	1,6 triliun	71.789
Healthcare Mandiri	1,6 triliun	27.129
KUS BMT UGT Sidogiri	1,5 triliun	11.602
KWSG Gresik	1,1 triliun	6.094
Kisel Jakarta	1 triliun	4.014
Kopdit Keling Kumang	1 triliun	153.282

200 Ribu

Koperasi Skala Kecil

Saat ini Indonesia memiliki lebih dari 200.000 koperasi*, namun hampir seluruhnya skala kecil dan hanya 1 koperasi yang masuk ke daftar 300 koperasi terbaik International Cooperative Alliance.

*Data: 100 Koperasi Besar, 2015

Tugas Kita: Jadikan Koperasi Alat Pemerataan & Motor Swasembada

Koperasi adalah alat pemerataan. Koperasi adalah alat untuk memperkuat yang lemah. Karena itu, peran koperasi dalam ekonomi kita harus kita digalakkan lagi.

Namun, ini tidak berarti koperasi kita besarkan dan swasta kita lemahkan. Tidak. Paham ekonomi konstitusi adalah, swasta silakan. Go, swasta, BUMN, koperasi, berlomba kamu, maju! Namun, pihak yang lemah dibantu atau diberdayakan melalui koperasi. Inilah sebetulnya mazhab itu. Jadi, bukan saling bertentangan. Malah kita harus bergerak sejajar.

Ibarat kalau ada kerbau atau sapi menarik bajak, kan tidak bertentangan kalau ada dua sapi? Mereka saling menarik.

Jadi, swasta, BUMN, koperasi, bisa menarik ekonomi bangsa ke depan. Masing-masing dengan kekuatannya. Sebetulnya itu yang kita lihat dilaksanakan di Korea, dilaksanakan di Thailand, Malaysia, Vietnam, dan Tiongkok. Indonesia pernah kok. Koperasi kita pernah jadi sorotan kekaguman bagi bangsa-bangsa lain. Mereka belajar ke kita, belajar tentang BIMAS, belajar tentang BULOG, belajar tentang swasembada dari kita.

Kalau dipimpin dengan baik, saya percaya, saya optimistis koperasi di Indonesia bisa benar-benar besar dan bisa menjadi alat pemerataan.

Benar, akan ada tantangan, dan akan ada kegagalan.

Sebagai contoh, saya mau bicara soal produksi dan distribusi pupuk. Pupuk kan dibuat oleh pabrik pupuk milik negara, milik rakyat? Yang bikin pabrik pupuk itu uang rakyat. Modal kerjanya uang rakyat. Tapi, begitu pupuk dihasilkan, dan didistribusi, distributornya perusahaan swasta. Kalau zaman Pak Harto, zaman Orde Baru, tidak. Yang distribusi pupuk adalah koperasi, koperasi unit desa (KUD).

Karena koperasi dianggap tidak sesuai dengan asas pasar bebas oleh beberapa orang, diganti jadi swasta. Dengan swasta, PT-PT yang dikasih, akhirnya, ya kita tahulah di Indonesia, kan? Nepotisme. Yang ditunjuk sebagai distributor rata-rata keluarga pejabat. Keluarganya direktur perusahaan, atau keluarganya direktur BUMN, atau keluarganya gubernur, bupati, atau keluarganya pemimpin partai yang berkuasa, atau yang berpengaruh.

Jadi, kita harus kembali ke fundamental, ke asas-asas yang benar. Ini barang rakyat, pabrik rakyat, dibangun dengan uang rakyat, modal kerja dari APBN, uang rakyat, distribusinya harus juga oleh rakyat. Yaitu, melalui koperasi, dan melalui pemerintah kalau perlu.

Selain jadi alat pemerataan, koperasi juga bisa jadi motor swasembada kita. Namun untuk itu harus ada pengerahan tenaga, pikiran, usaha yang sangat sungguh-sungguh. Kita tidak bisa anggap ini adalah pekerjaan biasa. Ini bukan pekerjaan biasa. Kita harus anggap ini sebagai suatu usaha nasional.

Di zaman Pak Harto, kita sudah pernah swasembada. Satu, perlu kita bina para petani kita. Harus ada penyuluh-penyuluh yang benar-benar mampu dan hadir di tiap desa. Kita perlu koperasi-koperasi unit desa dihidupkan. Perlu ada perbaikan sarana-sarana pertanian, pengairan, irigasi. Kita perlu distribusi pupuk, teknologi tepat guna dan kebutuhan-kebutuhan lain. Banyak sekali yang bisa kita lakukan, dan harus kita lakukan, tetapi tidak kita lakukan

8 Korporasi Terbesar di Indonesia

Pendapatan:
**13,2 Miliar \$ /
Rp. 170 Triliun**

Astra International

Milik:
Jardine Matheson
(Inggris)

Pendapatan:
**11,5 Miliar \$ /
Rp. 150 Triliun**

Salim Group

Milik:
First Pacific
(Hong Kong)

Pendapatan:
**8,5 Miliar \$ /
Rp. 110 Triliun**

Sinar Mas Group

Milik:
Eja Tjipta Widjaja

Pendapatan:
**8,1 Miliar \$ /
Rp. 105 Triliun**

Djarum Group

Milik:
Robert Hartono
& Michael Hartono

Royal Golden Eagle Group

Milik: Sukanto Tanoto

Pendapatan:
**4,7 Miliar \$ /
Rp. 61 Triliun**

Gudang Garam Group

Milik:
Susilo Wonowidjojo

Pendapatan:
**4,8 Miliar \$ /
Rp. 62 Triliun**

Lippo Group

Milik:
Mochtar Riady

Pendapatan:
**6,1 Miliar \$ /
Rp. 79 Triliun**

Phillip Morris

Milik:
Altria Group
(Amerika)

Pendapatan:
**6,7 Miliar \$ /
Rp. 87 Triliun**

Tugas Kita: Kembalikan Konstitusi Negara Ke Naskah UUD 1945 Asli

Saya orang yang berpendapat bahwa masalah ekonomi negara tidak terlalu jauh berbeda dengan mengatur diri sendiri, mengatur rumah tangga, dan mengatur perusahaan. Bagaimana kalau kita bekerja, tapi tidak jelas tabungan kita di mana? Kan kita jadinya tidak bisa apa-apa? Anda bekerja, umpamanya, tiap bulan. Anda digaji, tapi sebagian dari gaji Anda tidak boleh Anda gunakan, tidak boleh untuk menabung. Maka Anda tidak tidak bisa berbuat banyak.

Pasal 33 Undang-undang Dasar '45 dirumuskan oleh para pendiri bangsa kita untuk memastikan negara kita punya tabungan yang cukup untuk membangun.

Selama pasal 33 Undang-undang Dasar '45 tidak kita patuhi, selama itu kekayaan kita akan terus mengalir ke luar negeri. Selama itu mata uang kita tidak akan kuat, dan selama itu ekonomi kita akan menjadi bancakan bangsa lain.

Ini yang harus kita ubah. Ini yang harus kita perbaiki. "Bumi, air dan semua kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara, dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat". Itu adalah perintah Undang-undang Dasar '45.

Namun, itu yang banyak elite Indonesia pura-pura tidak baca. Ada juga orang-orang pintar di Indonesia pura-pura tidak tahu tentang Undang-undang Dasar '45. Mereka mengatakan pasal 33 ini kuno, sudah kedaluwarsa, tidak penting. Sebagian juga mengatakan, "sekarang yang penting adalah persaingan bebas, pasar bebas, globalisasi". Semua serahkan ke pasar. Nanti, yang kaya sedikit, tapi dia akan meneteskan ke bawah kekayaannya. *Trickle down effect*. Netes, netes, netes.

Benar ada yang menetes, tapi mohon maaf, mungkin kita semua sudah mati baru sampai.

Selain itu, kalau saya bicara UUD 1945 Pasal 33, seringkali saya diledek. Bahkan ada yang mengatakan, "Prabowo bahaya. Prabowo nanti akan nasionalisasi. Semua milik orang kaya akan diambil."

Anggapan tersebut tidak benar. Yang saya mau adalah, kita besarkan ekonomi kita, tapi ekonomi dibagi lebih rata. Jangan 1% yang kuat menguasai semua. Jangan asing menguasai semua. Yang kuat, monggo, maju kamu. Negara angkat yang kurang kuat.

Prinsip saya adalah *live and let live*. Hidup dan jadikan orang lain hidup. Jangan *live for yourself*. Jangan *zero sum game*. Jangan *I win, you lose*.

Prinsip saya, saya menang, kamu juga menang. Kita menang. *Win-win*, itu yang saya mau, dan itu prinsip yang terkandung di UUD 1945 Pasal 33, Ayat 1 hingga Ayat 3.

Pasal 33 sangat jelas. Ayat 1. "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan". Jadi, ini dasar. Kita tidak boleh punya pendapat yang kuat tambah kuat, yang tidak kuat terserah. Pendapat seperti itu bukan Pancasila, bukan cita-cita pendiri bangsa kita.

Sesuai Ayat 1, yang ekonominya kuat harus tarik yang lemah. Pemerintah harus jadi pelopor, bukan wasit. Pemerintah harus di depan untuk menjaga kekayaan negara. Kalau rakyat masih miskin, pemerintah harus ikut bertanggung jawab untuk memperbaiki keadaan. Ini adalah perintah Undang-Undang Dasar '45.

Ayat 2, "Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara". Ini perintah konstitusi Republik Indonesia.

Ayat 3, "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat." Ini bukan maunya Prabowo, ini perintah Undang-undang Dasar kita.

Saat ini, elite Indonesia banyak meninggalkan nilai-nilai Undang-undang Dasar '45. Meninggalkan nilai-nilai Pancasila.

Pancasila dipakai di mulut, tetapi tidak dijalankan. Ini dimungkinkan oleh amandemen UUD 1945 yang telah menambahkan Ayat 4 dan Ayat 5 di Pasal 33. Ayat 4, "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi", sesungguhnya bertabrakan dengan Ayat 1 hingga Ayat 3 karena menjadikan ekonomi Indonesia menjadi ekonomi bermazhab pasar bebas.

Karena itulah, saya percaya, kalau kita benar-benar ingin berjuang menuju negara sejahtera, kita harus lihat sumber penyakit kita apa, dan kita harus perbaiki sumber penyakit itu. *Root cause*, akar permasalahan kita ada di Pasal 33 yang telah diganti dan tidak dijalankan sepenuh hati.

Untuk memperbaikinya, kita harus kembalikan konstitusi kita ke naskah aslinya, versi 18 Agustus 1945. Dengan demikian ekonomi Indonesia akan dikuasai oleh rakyat Indonesia, dan negara akan punya tabungan untuk membangun. Dengan demikian, para pimpinan, para tokoh politik yang sekarang hadir di tengah rakyat, bisa berhenti jadi pemimpi. Bisa berhenti jadi 'pejuang akan'. Akan ini, akan itu, tapi tidak bisa berbuat banyak karena uangnya tidak ada. Kalau uangnya ada, akan ada banyak yang mereka bisa perbuat untuk Indonesia.

UNDANG-UNDANG DASAR 1945 PASAL 33

Teks Awal, 18 Agustus 1945

Ayat 1:

Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan.

Ayat 2:

Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.

Ayat 3:

Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Tambahan 2 Ayat Saat Amandemen 11 Agustus 2002

Ayat 4:

Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Ayat 5:

-Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Mewujudkan Demokrasi Rakyat

Celakalah kita jika kita tidak belajar dari sejarah. Sejarah dunia telah mengajarkan kepada kita, bahwa demokrasi hanya dapat dipertahankan jika pemimpin-pemimpin penganut demokrasi dapat membuktikan bahwa mereka memberikan pemerintahan yang sebaik-baiknya, pemerintahan yang sesuai dengan kehendak rakyat.

Kita Butuh Pendekar-Pendekar Penyelamat Demokrasi

Para pendahulu kita, para pemimpin kemerdekaan Indonesia menyetujui demokrasi sebagai dasar negara kita. Demokrasi artinya susunan pemerintah, dan kebijaksanaan pemerintah ditentukan oleh rakyat Indonesia sendiri.

Namun, saudara-saudara, demokrasi kita sekarang terancam. Demokrasi kita mau, atau bahkan sudah disandera. Demokrasi kita sekarang mau diperkosa. Demokrasi kita sekarang mau dan sudah dirusak dengan politik uang.

Kita tidak usah berpura-pura. Kita tanya saja kepada mereka yang sudah punya pengalaman maju dalam suatu pemilihan. Kalau mau maju jadi bupati, berapa puluh miliar? Kalau mau maju jadi wali kota, berapa puluh miliar? Kalau mau jadi gubernur, berapa ratus miliar yang harus dihabiskan? Politik uang membahayakan demokrasi Indonesia. Ini berarti, mereka yang kuasai uang, mereka menguasai kedaulatan politik Indonesia.

Demokrasi kita inginkan. Demokrasi adalah sistem orang beradab. Tapi, demokrasi kalau diselewengkan, kalau dicurangi, kalau dipermainkan, ya, berarti tidak perlu lagi kita terlalu sopan. Tidak perlu lagi kita terlalu nrimo.

Kita harus yakin bahwa rakyat membutuhkan suatu gerakan yang berani, gerakan yang bersih, yang jujur, yang hatinya mulia untuk memperbaiki demokrasi kita. Untuk mewujudkan demokrasi rakyat. Gerakan yang cinta tanah air, yang ingin membuat bangsa Indonesia bangsa yang terhormat! Kita harus yakin itu harapan rakyat kita.

Namun sebagian besar rakyat kita tidak mampu bersuara. Saudara-saudara yang sekarang membaca buku ini, bersama-sama kita harus jadi suara mereka.

Kita harus jadi hati mereka. Kita harus jadi pemimpin-pemimpin mereka. Kita harus jadi pelindung-pelindung mereka. Kita tidak boleh capai, tidak boleh lelah, tidak boleh surut hati kita, tidak boleh takut, tidak boleh gentar.

Kita harus percaya, apapun kesulitan yang kita hadapi, yang benar akan menang walau harus menunggu dan bersabar. Yang zalim akan selalu kalah. Itu pelajaran sejarah. Yang jahat selalu akan kalah pada ujungnya.

Kita harus yakin, dan Insya Allah kalau kita setia, kalau kita jujur, kalau kita bersih, kalau kita tetap berpegang kepada cita-cita negara kita, Insya Allah kita nanti bisa menjadi penyelamat masa depan bangsa Indonesia.

Berikut saya sampaikan, beberapa hal, dua tugas besar yang menurut saya wajib kita lakukan untuk mewujudkan demokrasi yang kita dambakan.

Pertama, kita harus pastikan supremasi hukum.

Kedua, kita harus kejar dan tangkap koruptor.

A portrait of Bung Hatta, an Indonesian politician and diplomat, wearing glasses and a suit. The background is a dark, textured blue with a large, semi-transparent, stylized portrait of him in the upper left corner.

Bung Hatta Soal Demokrasi Indonesia

Demokrasi barat tidak sesuai dengan cita-cita perjuangan Indonesia. Demokrasi politik saja tidak dapat melaksanakan persamaan dan persaudaraan. Di sebelah demokrasi politik harus pula berlaku demokrasi ekonomi. Kalau tidak, manusia belum merdeka, persamaan dan persaudaraan belum ada.

Kedaulatan rakyat yang kita ciptakan sebagai sendi negara mengandung di dalamnya cita-cita demokrasi politik dan demokrasi ekonomi. Yang penting untuk diperhatikan di sini ialah cara menjalankan kedaulatan rakyat. Menurut UUD kita, Pasal 1 Ayat 2, 'Kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. MPR menetapkan undang-undang dasar dan garis-garis besar daripada haluan negara.'

Mohammad Hatta, 'Demokrasi Kita'

Tugas Kita: Pastikan Supremasi Hukum

Kita tidak boleh menyerahkan demokrasi kita kepada preman-preman bayaran. Kita ingin kesejukan, untuk itu kita tidak boleh tinggal diam jika ada yang robek-robek hukum yang kita dambakan.

Kita harus sampaikan kepada mereka-mereka yang merasa di atas hukum: "Kalau Anda robek-robek hukum, Anda harus menghadapi risiko yang Anda lakukan. Siapa yang menabur angin, dialah yang akan menuai badai, saudara-saudara sekalian."

Menyikapi ini, saya pernah tanya kader-kader GERINDRA, Kamu takut atau tidak dengan preman-preman itu? Kalau ada kawan dalam berdemokrasi yang terancam, seluruh Indonesia terancam. Kalau ada sekutu dalam berdemokrasi yang tersentuh, seluruh GERINDRA tersentuh.

Kita selalu ingin sejuk, kita selalu ingin damai, karena kita butuh keutuhan dan persatuan menghadapi keadaan yang tidak gampang. Tetapi, kita juga tidak boleh menjadi penakut. Kita tidak boleh menjadi kambing yang bisa disuruh-suruh, apalagi ditipu-tipu dan diperdaya.

Kita harus pada saatnya berani menegakkan kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Jangan kita biarkan jika ada orang yang menambahkan hantu di daftar pemilih. Jangan kita tinggal diam saat melihat kotak suara dibuka di luar proses yang telah kita sepakati bersama. Kita harus bersuara saat melihat ketidakadilan.

Apalagi sekarang sudah ada Internet, sudah ada Facebook, Twitter, media sosial. Kalau kita lihat ada pejuang yang tidak salah, tapi dikriminalisasi, kita juga harus bersuara, harus bela, walaupun media tidak meliput karena mungkin sudah dibeli semua oleh penguasa.

Tugas Kita: Kejar dan Tangkap Koruptor

Korupsi di Indonesia sudah kelewatan. Kalau yang bocor 5%, kita ini orang Indonesia. Maksudnya, kalau 5% bocor, "Biasa deh. Cingcay lah." Sepuluh persen bocor, "Sudah deh. Sama kawan 10% boleh." Lima belas persen bocor, "Ya sudah, deh." Dua puluh persen bocor, mungkin kadang masih bisa kita mengerti.

Sekarang ini, saya mencatat semakin banyak kasus yang bocornya 80%. Kalau ada proyek buat jembatan, seringkali tidak ada gempa, roboh sendiri³². Kalau buat gedung, ada yang belum diresmikan jatuh sendiri³³.

Sejarah manusia, sejarah peradaban manusia mengajarkan kepada kita, setiap negara yang tidak mampu mengatasi korupsi di pemerintahannya, negara itu akan bubar.

Mohon saudara garisbawahi pernyataan saya ini. Catat apa yang saya tuliskan.

Kalau bangsa Indonesia tidak mampu mengurangi korupsi yang sudah merajalela, pasti bangsa ini akan gagal. Ini ajaran sejarah. Tidak usah kita ragukan lagi.

Dengan korupsi, semua aparat pemerintah akan rapuh. Dengan korupsi, tidak ada uang cukup untuk menyelenggarakan jasa-jasa kepada rakyat. Dengan korupsi, negara ini tidak punya cukup uang untuk membeli dan memproduksi pesawat terbang untuk angkatan udaranya. Tidak cukup anggaran untuk mengadakan kapal patroli untuk angkatan lautnya. Tidak bisa sediakan peluru untuk angkatan daratnya. Tidak mampu memberikan alat-alat yang diperlukan polisi-polisinya.

³² Kasus robohnya jembatan Kutai Kartanegara, 2011

³³ Kasus ambruknya gedung Pemerintah Daerah Kota Depok, 2017

Darurat Korupsi



17

Gubernur & 25 Menteri di Dalam Penjara

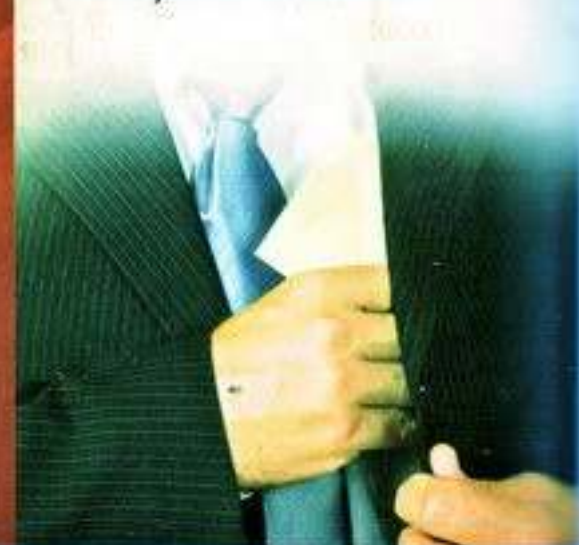
Ada 17 gubernur, 51 bupati/walikota, 25 menteri yang merayakan pergantian tahun 2016 ke 2017 di penjara karena korupsi. Angka ini semakin memprihatinkan karena ada 14 hakim dipenjara karena korupsi*.

* Sekretariat Kabinet, 2016



Pemda Minim Pengawasan

Minimnya pengawasan media dan masyarakat pada pemerintah daerah, memungkinkan korupsi berjamaah dan oligarki menjamur di daerah.



Kalau tentara, angkatan udara, angkatan laut, angkatan darat, dan polisi lemah, kalau jaksa-jaksanya lemah dan maling, kalau hakim-hakimnya tidak kuat, negara ini akan gagal. Kita sudah rasakan semua. Kita sudah rasakan semua apa yang kita hadapi sekarang.

Sekarang pertumbuhan benar ada. Konsumsi kita, benar naik. Tetapi, semua ini rapuh. Saya bicara dengan beberapa ahli, kondisi bangsa kita sekarang sangat rentan.

Karena kekuatan kaum koruptor sangat kuat bercokol, perjuangan kita tidak ringan. Perjuangan kita berat. Semakin kita menguat di rakyat, semakin kita akan dihalangi, dan akan diterpa oleh mereka.

Kita tidak boleh mengizinkan kekayaan bangsa Indonesia dicuri terus-menerus. Dan, kita tidak boleh mengizinkan koruptor-koruptor untuk melanglang buana, untuk bergentayangan bebas.

Tidak! Kita harus dorong para penegak hukum kita untuk kejar mereka sampai ujung dunia.

Untuk memberantas korupsi di bumi Indonesia, kita juga harus memberi contoh. Harus ing ngarso sung tulodo, di depan memberi contoh. Bukan ing ngarso entek-enteke. Kita harus menyumbang sesuatu yang baik. Kita harus menyumbang politik yang bersih, politik yang menegakkan kebenaran dan keadilan. Jika orang lain belum bisa, kita harus bisa.

Kita harus sabdo pandito ratu. Ucapan kita harus bisa dipegang. Jangan jam dua tahu, jam empat tempe. Jangan bilang "iya", kalau maksudmu "tidak". Jangan memberi janji yang tidak bisa kamu penuhi, karena itu juga sesungguhnya termasuk korupsi.

Penutup:

Menjawab Tantangan Sejarah

Menjawab Tantangan Sejarah

Saudara-saudara,

Yang ingin saya lakukan adalah mendorong perubahan besar pada bangsa Indonesia. Saya ingin menyelamatkan masa depan bangsa Indonesia. Saya ingin membangun sistem politik dan sistem ekonomi yang kuat dan yang bersih, yang membela rakyat, dan yang membangun bangsa ini.

Saya ingin mencegah bangsa ini menjadi bangsa korupsi. Saya tidak ingin Republik kita menjadi republik maling. Saya tidak ingin Republik kita hancur karena uang rakyat dirampok oleh sekelompok pemimpin-pemimpinnya yang tamak.

Tujuh puluh tahun kita merdeka, kita bangun bangsa, tapi hari ini kita seperti jadi tamu di rumah kita sendiri. Tujuh puluh tahun kita merdeka, rakyat kita tidak punya apa-apa. Tujuh puluh tahun kita merdeka, negara kita tiap tahun harus pinjam uang. Negara kita seolah begitu miskin.

Saya percaya, kita sebagai bangsa mampu. Kita mampu dan kita harus, dan kita wajib menghapus kemiskinan di Indonesia. Kita wajib memastikan "mimpi Indonesia" ada dan nyata. Anak para petani harus bisa jadi profesor. Anak buruh harus bisa jadi jenderal. Anak nelayan harus bisa jadi orang kaya. Anak pedagang kaki lima harus jadi pemilik restoran. Itu cita-cita Republik Indonesia!

Anak orang miskin tidak boleh miskin terus-menerus. Untuk apa kita merdeka kalau kita membiarkan orang hidup miskin di Republik ini?

Mungkin analisis di dalam buku ini, mungkin pendapat saya ini ada keliru. Saya siap disanggah. Saya siap dikoreksi.

Inti argumen saya, apakah salah rakyat Indonesia ingin berdiri di atas kaki sendiri? Apakah salah kita ingin punya mobil buatan sendiri? Apakah salah kita ingin rakyat naik motor buatan Indonesia sendiri? Apakah salah?

Apakah bangsa kita tidak boleh punya harga diri? Salahkah kita kalau kita ingin rakyat Indonesia makan yang cukup, supaya anaknya tidak lapar? Haruskah kita lihat anak-anak di ibu kota kita sendiri tidak bisa tidur karena lapar? Haruskah kita lihat rakyat kita, untuk cari makan tiap hari setengah mati? Dan, saat kita lihat kekayaan kita mengalir ke luar, kita disuruh diam, dan kita disuruh baik?

Saudara-saudara sekalian, saya kira saya ambil kesimpulan bahwa kita merasakan semua kejanggalan. Kita tidak menyalahkan siapa-siapa. Kita menyalahkan diri kita sendiri. Ini adalah tanggung jawab kita semua.

Karena itu, sekarang tantangannya adalah, beranikah kita mengoreksi diri kita sendiri? Dan, karena itu juga, harus ada keberanian untuk mendidik rakyat kita bahwa perlu ada perubahan di negara kita. Perlu ada perubahan, karena kalau tidak, kalau kita tidak bisa mengatasi dua masalah besar yang ada di buku ini, saya kira ujungnya adalah sesuatu yang tidak kita inginkan.

Pilihan dan Perjuangan Kita Sulit

Bagi saya, masuk ke politik ini adalah pengorbanan. Pengorbanan tenaga, waktu, dan perasaan. Tetapi jika tidak masuk ke politik, tidak mungkin saya bisa memperbaiki kehidupan rakyat saya.

Ya, saya percaya tidak mungkin kita bisa wujudkan perbaikan kehidupan rakyat secara besar-besaran hanya dengan mengomel dan mengkritik. Tidak mungkin kita bisa memperbaiki bangsa hanya dengan menjadi pengamat. Tidak mungkin hanya dengan menghardik kita bisa melakukan perbaikan.

Sebagian dari saudara yang membaca buku ini mungkin sudah masuk ke politik. Sebagian juga mungkin belum. Jika belum, saya ingin saudara renungkan hal berikut.

Ada kalanya dalam hidup kita harus memilih pilihan yang sulit. Apakah kita membela kebenaran, atau merestui ketidakbenaran? Apakah kita berdiri tegak untuk membela keutuhan bangsa, kemandirian bangsa, dan nilai-nilai yang kita junjung tinggi? Atau, kita menyerah kepada uang, kita menjual nilai-nilai kita, kita menjual diri kita, kita menjual kepribadian kita, kita menjual harga diri kita?

Pilihan-pilihan semacam ini sangat sulit.

Pada tahun '45 pemimpin-pemimpin kita dihadapkan dengan pilihan semacam ini. Apakah menyatakan kemerdekaan, atau menunggu diberikan kemerdekaan oleh penjajah?

Mereka yang menghendaki menyatakan kemerdekaan, agar kemerdekaan kita bukan hadiah dari penjajah, memang mempertaruhkan nyawanya dalam risiko.

Pada 10 November 1945, rakyat Surabaya dan pemimpin-pemimpin di Surabaya juga dihadapkan pada pilihan yang

Saya seorang mantan prajurit yang mengerti perang. Saya pernah melihat perang. Saya pernah melihat korban-korban perang. Komandan yang sangat hormat gugur di tangan saya. Anak buah-anak buah saya yang terbaik gugur di sekitar

bahwa saya selalu mengutamakan jalan damai.

Padahal, saya telah membuktikan setelah sekian belas tahun,

kekerasan, yang kejam, dan sebagainya.

saya digambarkan sebagai seorang yang suka menggunakan seorang yang haus kekuasaan, yang nafsu untuk berkuasa. Dan, selalu hendak mendiskreditkan saya. Saya digambarkan sebagai dalam buku ini. Dalam perjalanan saya, banyak lawan saya yang pesan yang kurang lebih sama dengan apa yang terkandung di Dalam perjalanan politik saya 10 tahun terakhir, saya membawa

demokrasi?

Demikian juga pada tahun '98. Pada era Reformasi, banyak pemimpin kita juga yang dihadapkan pada pilihan susah. Membela sistem yang kurang demokratis, atau berani membawa reformasi dan

yaitu komunisme?

Juga dalam krisis-krisis besar bangsa kita tahun '65, apakah pemimpin membela Pancasila, atau menyerah kepada ideologi yang tidak sesuai dengan bangsa kita,

harga diri kita sekarang?

Kita bayangkan, bagaimana harga diri bangsa kita kalau waktu itu pemimpin-pemimpin di Surabaya dan rakyat di Surabaya menyerah. Kalau Gubernur Suryo, Bung Tomo, dan semua pemimpin Jawa Timur dan Surabaya, tunduk kepada ultimum asing, bagaimana

saat itu.

susah. Menyerah pada ultimum Inggris untuk angkat tangan dan menyerahkan senjata paling lambat tanggal 9 November, atau menghadapi serbuan dan serangan negara adidaya pada

saya. Saya yang harus ke keluarga mereka, ke ibu-ibu mereka, ke istri mereka, ke orang tua mereka, untuk memberi tahu putranya gugur di bawah kepemimpinan saya. Karena itu, saya selalu ingin jalan damai.

Fitnah-fitnah yang mereka lontarkan sungguh sangat keji. Saya dituduh ingin menutup semua gereja di Republik Indonesia, padahal keluarga saya sebagian Kristen. Bahkan di sekitar saya, pengawal-pengawal saya, ajudan-ajudan saya, sekretaris saya, ada orang Nasrani.

Saya seorang mantan prajurit TNI. Sumpah saya membela seluruh rakyat Indonesia tanpa memandang suku, agama, ras. Saya telah mempertaruhkan nyawa saya, dan banyak anak buah saya dari berbagai suku dan agama telah gugur di bawah komando saya.

Bagaimana bisa saya melanggar sumpah saya, dan melupakan pengorbanan anak buah saya?

Saya juga telah difitnah, seolah bahwa saya adalah anti etnis Tionghoa. Padahal saya selalu membela semua kelompok minoritas. Fitnah-fitnah itu adalah bagian yang keji dari politik.

Untuk itu, saya minta kepada para sahabat saya untuk sabar dan tenang. Jangan menjadi marah. Kita harus semakin arif, semakin sabar. Bukan kita menerima fitnah itu, tetapi kita perhitungkan dengan sebaik-baiknya.

Jangan kita balas kedengkian dengan kedengkian. Jangan kita balas kejahatan dengan kejahatan. Jangan kita balas fitnah dengan fitnah.

Dalam situasi seperti ini saya minta saudara-saudara terus, walaupun sabar, kita juga harus siap. Siap mental kita, siap tenaga kita, siap napas kita.

Saya minta saudara-saudara yang membaca buku ini, dalam keheningan malam nanti, renungkanlah pendapatmu, renungkanlah sikapmu, renungkanlah jawabanmu.

Saya bertanya, apakah kita akan bersama-sama membela kebenaran, atau kita menyerah kepada ketidakbenaran, kepada kecurangan, kepada kezaliman?

Dan, dalam hari-hari yang akan datang, setelah saudara merenung, saya mengajak saudara untuk mengambil langkah-langkah untuk menghadapi hari-hari yang akan datang.

Saya telah memilih berjuang di atas landasan konstitusional. Saya sangat sulit menyerah kepada keadaan yang tidak benar dan tidak adil. Saya menilai keadaan ini adalah sarat dengan campur tangan asing. Ada negara-negara tertentu yang ingin Indonesia lemah, yang ingin Indonesia hancur, yang ingin Indonesia miskin.

Saya telah mendapat bukti-bukti yang cukup kuat tentang keterlibatan mereka. Sebagian bukti sejarah sudah saya paparkan di buku ini. Tetapi kita tetap harus tenang. Kita harus sabar, dan kita harus tidak melupakan kekuatan kita sendiri.

Tiga Kelompok Manusia



Yang Manakah Kamu?

1 THE LEADERS

Mereka yang membuat hal-hal terjadi

2 THE FOLLOWERS

Mereka yang melihat hal-hal terjadi

3 THE APATHETIC

Mereka yang menanyakan bagaimana hal-hal bisa terjadi

Kita Memimpin Dengan Dawuh Fatwa

Di Padepokan Garudayaksa, setiap saya bertemu dengan siswa-siswi baru, saya mendapat semangat baru. Saya mendapat harapan baru. Saya menilai harapan rakyat akan masa depan yang lebih baik terletak di pundak mereka yang berjuang untuk bisa berada di Hambalang untuk belajar dan berbagi dengan saya.

Harapan rakyat akan masa depan yang lebih baik juga terletak di pundak saudara yang telah membaca buku ini dengan seksama. Yang telah mempelajari data-data, angka-angka yang disajikan. Yang memahami pentingnya menyebarkan informasi yang terkandung di buku ini ke sanak saudara, kerabat dan rakyat luas.

Jika dalam membaca buku saudara mendapatkan pelajaran-pelajaran yang berharga, ingatlah filosofi pendekar. Jangan gunakan ilmu yang saudara miliki untuk yang tidak benar. Ilmu harus dipakai untuk membela yang lemah, membela yang tidak bisa membela dirinya sendiri.

Saudara harus turun gunung, harus turun dari menara gading. Harus berani memimpin rakyat. Memimpin dengan ilmu. Memimpin dengan dawuh fatwa. Karena, sesungguhnya saudara termasuk *the best and the brightest brains of the country*.

Carilah orang-orang yang hatinya merah putih. Hatinya Pancasila. Hatinya Indonesia terhormat, Indonesia berdiri di atas kaki kita sendiri. Bangunkan jawara-jawara yang membela orang miskin, membela orang lemah.

Kita Tidak Boleh Tinggal Diam

Saudaraku, apa yang saya katakan di sini memang pahit. Namun adalah kenyataan, kita tidak bisa terlalu banyak berharap pada elite kita. Mereka pintar bicara.

Saking pintarnya, mereka jadi pintar bohong semua.

Saya masuk politik karena terpaksa. Minta ampun politik ini! Dari 15 orang yang saya temui di politik, 14 orang bohong semua. Makanya saya semangat melihat saudara-saudara yang semangat mengetahui situasi dan kondisi bangsa kita yang sebenarnya.

Karena itu yang kita butuhkan sekarang adalah kebersamaan. Bekerja dengan bersatu. Bekerja dengan akal yang baik, akal yang sehat.

Untuk sukseskan demokrasi kita, orang-orang baik, para Pandawa, mereka-mereka yang ingin melakukan, membuat, dan membangun suatu *legacy*, suatu warisan yang baik bagi anak cucunya, harus berkumpul menjadi satu untuk menawarkan kepada rakyat, suatu alternatif pilihan.

Saudara yang membaca buku ini adalah bagian dari kaum intelektual. Kaum intelektual bangsa Indonesia harus menjadi kekuatan yang menentukan. Kekuatan yang damai, kekuatan yang memberi kesejukan, dan juga kekuatan yang tidak akan membiarkan ketidakadilan terus-menerus berjalan di Republik Indonesia.

Sekarang, kuncinya kembali kepada apa yang Edmund Burke pernah katakan. *"If everybody keeps quiet,"* kalau semua orang diam, yang akan memimpin dan berkuasa adalah orang-orang yang tidak baik.



Inilah Cara Kita Merdeka

Negara kita saat ini ada pada kondisi yang kita tidak boleh seenaknya. Kita harus waspada. Kita harus saling mengingatkan. Kita harus saling mendukung.

Katakanlah yang benar, benar. Dan, katakanlah yang salah, salah. Apakah benar kekayaan kita keluar tiap tahun dan kita harus menerima? Apakah benar rakyat kita hanya menjadi kacung, rakyat kita hanya menjadi pelayan? Rakyat kita hanya boleh menjadi pasar? Rakyat kita hanya boleh mendapat upah murah?

Kalau saudara-saudara menilai ini tidak benar, dan mampu kita ubah, dan mampu kita amankan kekayaan kita, maka tidak ada jalan lain, saudara-saudara harus turun gunung. Harus memimpin rakyat. Memimpin dengan ilmu, memimpin dengan hati, memimpin dengan anjuran, memimpin dengan pendidikan, memimpin dengan keberpihakan kepada bangsa sendiri.

Kita harus percaya bahwa kekuatan kita besar. Namun kekuatan ini harus kita susun dan selalu kita rawat. Ya, dari orang ke orang, susunlah kekuatan. Lima orang demi lima orang, nanti sepuluh orang demi sepuluh orang. Adakan diskusi. Bahas isi buku ini di rumah masing-masing. Sekaranglah saatnya saudara menjadi guru di tengah rakyat. Bangkitkanlah kesadaran rakyat bahwa Allah SWT tidak akan mengubah nasib suatu kaum, manakala kaum itu tidak mau mengubah nasibnya sendiri.

Satyagraha, Landasan Perjuangan Kita

Saya butuh dukungan saudara-saudara, dan kita butuh dukungan secara riil, secara konkret.

Mereka, para pemodal besar yang ingin menjajah tanah air, mengatakan: Bangsa Indonesia gampang, rakyat Indonesia bisa dibeli, semua pemimpin Indonesia bisa disogok.

Negara kita saat ini ada pada kondisi yang kita tidak boleh seenaknya. Kita harus waspada. Kita harus saling mengingatkan. Kita harus saling mendukung. Sebagai bangsa yang besar, kita harus saling menjaga.

Untuk itu marilah kita bersatu. Kita harus bersatu.

Kita buktikan bahwa rakyat Indonesia masih punya cita-cita yang luhur, rakyat Indonesia masih punya harga diri, rakyat Indonesia tidak mau dibeli begitu saja. Rakyat Indonesia tidak mau jadi kacung, rakyat Indonesia tidak mau menjadi budak. Rakyat Indonesia ingin menjadi rakyat yang terhormat.

Saudara-saudara sekalian yang membaca buku ini.

Katakanlah yang benar, benar. Dan, katakanlah yang salah, salah. Apakah benar kekayaan kita keluar tiap tahun dan kita harus menerima? Apakah benar rakyat kita hanya menjadi kacung, rakyat kita hanya menjadi pelayan? Rakyat kita hanya boleh menjadi pasar? Rakyat kita hanya boleh mendapat upah murah?

Kalau saudara-saudara menilai kondisi ini benar, kita mau bilang apa? Tapi, kalau saudara-saudara menilai ini tidak benar, dan mampu kita ubah, dan mampu kita amankan kekayaan kita, maka tidak ada jalan lain, saudara-saudara harus turun gunung. Harus memimpin rakyat.

Memimpin dengan ilmu, memimpin dengan hati, memimpin dengan anjuran, memimpin dengan pendidikan, memimpin dengan keberpihakan kepada bangsa sendiri.

Mari kita laksanakan perjuangan kita di atas landasan "satyagraha" yang telah diberi contoh di India oleh Mahatma Gandhi, dan di Amerika oleh Martin Luther King, dan di Afrika Selatan oleh Nelson Mandela. Satyagraha artinya adalah perjuangan tanpa kekerasan, perjuangan tanpa henti yang berlandaskan pada kebenaran.

Percayalah kebenaran akan menang, kebenaran tidak bisa dikalahkan. Yang penting, kita harus berani, kita harus tegar, kita harus mau berkorban.

Bung Karno, Bung Hatta, Bung Syahrir, Pak Dirman, Gubernur Suryo, dan I Gusti Ngurah Rai, dan semua pahlawan pendiri bangsa kita, telah mengajarkan bahwa kalau kita tidak menyerah, kalau kita berani, kalau kita tegar, kebenaran akan unggul. Kebenaran akan menang pada saatnya.

Kita harus siap menghadapi kesulitan. Kita harus siap menghadapi penderitaan. Tapi, pilihannya apa? Kita menyerah seperti budak yang disuruh duduk, duduk? Disuruh berdiri, berdiri? Disuruh tunduk, tunduk? Disuruh diam, diam? Disuruh ambil air, ambil air? Atau, kita jadi bangsa yang terhormat, bangsa yang mengerti, membela haknya, membela hak-hak rakyat?

Saudara-saudara sekalian, kita harus percaya bahwa kekuatan kita besar. Namun kekuatan ini harus kita susun dan selalu kita rawat. Ya, dari orang ke orang, susunlah kekuatan. Lima orang demi lima orang, nanti sepuluh orang demi sepuluh orang. Adakan diskusi. Bahas isi buku ini di rumah masing-masing. Atur, dan pada saatnya saya akan umumkan bagaimana perjuangan kita.

Yang jelas, pilihannya hanya dua. Berdiri menghormati sebagai bangsa kesatria, atau tunduk selamanya sebagai bangsa kacung, bangsa budak, bangsa yang lemah, bangsa yang bisa dibeli, bangsa yang bisa disogok. Pilihannya ada di hati kita masing-masing.

Saya percaya setiap individu dari kalian punya saudara, punya kerabat, punya anak buah, punya orang tua, punya mertua, sehingga kalau semua lingkungan saudara diyakinkan bahwa Pemilu adalah kesempatan untuk Indonesia bangkit.

Saya percaya, kita bisa, kita harus bisa melaksanakan suatu perombakan besar untuk bangsa kita.

Kita buktikan bahwa rakyat Indonesia masih ada yang punya cita-cita. Masih ada yang cinta tanah air. masih ada yang ingin Indonesia berdiri dengan terhormat, dengan pemimpin-pemimpin yang terhormat, yang berdiri diatas kaki kita sendiri. Bermartabat, kuat, adil, makmur. Itu cita-cita kita bersama.

Sadarkan dan kerahkan dukungan dari sekitarmu. Temui dan sadarkan keluargamu, kerabatmu, tetanggamu. Sadarkan dan yakinkan mereka. Jelaskan asas-asas dan fakta-fakta yang terkandung di dalam buku ini. Himbau mereka, gugah mereka untuk berpartisipasi aktif dalam demokrasi kita.

Beri tahu kepada rakyat bahwa bangsa kita tidak miskin. Beri tahu kepada rakyat, ada jawaban kepada masalah bangsa. Beri tahu kepada mereka, di buku ini ada keyakinan, ada pemahaman bagaimana mengatur ekonomi.

Dalam perjuanganmu, jangan pernah menghardik, jangan mencela orang lain, tapi percaya kepada diri kita sendiri, dan selalu bimbing rakyat. Beri tahu kepada mereka, yang benar itu benar, dan yang benar pada akhirnya akan menang.

Ingatlah, semakin kita berisi, semakin kita kuat, semakin kita tunduk, semakin kita merendahkan hati kita. Bukan rendah diri, tapi rendah hati. Semakin dihina, semakin sopan. Semakin difitnah, semakin kita tegak.

Tidak perlu kita balas kebencian dengan kebencian. Tidak boleh ada waktu untuk kebencian. Biarlah mereka yang jahat kita

yakini akan dihukum oleh kekuatan yang lebih besar dari kita semua, kekuatan yang di atas.

Marilah kita percaya, kekuatan yang di bawah, kekuatan rakyat Indonesia, akan selalu akan mendukung yang benar.

Saudara-saudaraku, rakyat kita tidak bodoh. Rakyat kita berpikir dengan hati mereka.

Mereka akan senantiasa mendukung kita, asal kita selalu membenahi diri, selalu memperkuat akar kita ke rakyat, selalu menjadi sumber kebenaran, selalu menjadi pembela kebenaran, selalu memberi pemecahan masalah-masalah rakyat, dan jangan sekali-sekali menjadi sumber kerusakan.

Jangan juga kita tinggal diam mana kala kita melihat ketidakbenaran dan ketidakadilan. Dan, kalau kita lihat penindasan terhadap rakyat kecil, kita tidak boleh tinggal diam. Kita tidak boleh takut membela kaum yang lemah dan kaum yang tertinggal.

Kita juga tidak boleh berjuang hanya untuk mencari kursi jabatan. Namun jangan juga kita tidak berpartisipasi dalam demokrasi elektoral yang sudah dibangun. Kursi kekuasaan harus direbut dengan baik, dengan terhormat, dengan halal, dengan konstitusional, dengan demokratis, oleh orang-orang yang hatinya merah putih.

Kekuasaan harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat seluruhnya.

Inilah Inti Perjuangan GERINDRA

Mempertahankan dan mengamalkan Pancasila serta menegakkan Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945, secara murni dan konsekuen.

AD ART Partai Gerindra, Pasal II Ayat 1

.....

Mewujudkan kesejahteraan sosial melalui ekonomi kerakyatan dengan bertumpu pada kekuatan bangsa, yang mengarah pada kedaulatan bangsa yang berdikari.

AD ART Partai Gerindra, Pasal II Ayat 5

.....

Menghimpun dan membangun kekuatan politik rakyat untuk mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang maju, modern, sejahtera, kuat dan berdaulat.

AD ART Partai Gerindra, Pasal II Ayat 6

.....

Di GERINDRA Atau Tidak, Kita Tetap Bergerak Berjuang Bersama

Saudaraku, apa yang saya sampaikan di buku memang pahit. Karena itu, saya sekarang fokus membangun suatu partai politik yang adalah partai massa, tapi dipimpin oleh kader-kader yang punya ideologi.

Ideologi apa? Ideologi GERINDRA adalah 17 Agustus 1945, Undang-undang Dasar '45, dan Pancasila sebagai jaminan kerukunan, persatuan bangsa.

GERINDRA berdiri untuk memberi harapan kepada rakyat kita. GERINDRA berdiri untuk melarang usaha-usaha untuk membuat bangsa Indonesia terus miskin.

GERINDRA memang didirikan begitu di luar akal, begitu cepat, dalam hanya beberapa minggu saja, tetapi kita bisa dapat harapan rakyat. Ini karena kita memang ingin memberi suatu pilihan lain pada bangsa kita.

Jangan sampai bangsa dan negara, dan masyarakat yang kita cintai dibuat agar kita menjadi bangsa miskin. Bangsa pelayan, bangsa tukang sapu, bangsa kacung, bangsa pinjam-pinjam, bangsa minta-minta. Bangsa yang tidak punya tabungan, bangsa yang tidak bisa sekolahkan anaknya, bangsa yang anak-anak mudanya tidak punya harapan.

Sarjana-sarjana juga tidak bisa dapat pekerjaan yang baik. Guru-guru harus jadi tukang ojek. Ibu-ibu tidak mengerti, dari mana dia bisa memberi susu dan makan pada anaknya.

GERINDRA didirikan untuk jadikan Indonesia kembali milik rakyat Indonesia.

GERINDRA menolak anggapan bahwa bangsa Indonesia bangsa yang miskin. Bangsa Indonesia bukan bangsa miskin. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang kekayaannya dicuri, dicuri dan dicuri terus.

Saya percaya, kalau di Pemilihan Umum rakyat memberikan kesempatan kepada GERINDRA untuk memimpin negeri ini, Indonesia akan kaya. Indonesia akan makmur.

Saya menulis buku ini, dan saya banyak berdiri di atas panggung untuk memberi pencerahan bukan untuk memberi janji palsu. Saya berdiri di atas panggung, karena saya percaya kita harus kembali ke Pancasila, kembali ke Undang-undang Dasar '45. Seperti yang sudah saya jelaskan di buku ini, saya percaya di dalam Undang-undang Dasar '45 itu sebetulnya letak daripada rumus kebangkitan bangsa Indonesia.

Benar yang dikatakan Bung Karno. Bangsa kita harus punya keberanian. Hanya rakyat yang berani mempertahankan hartanya sendiri, kekayaannya sendiri, hanya rakyat itulah yang akan mendapat kemakmuran.

Jika saudara sudah menjadi anggota dari partai lain, tidak apa. Mari kita bekerja keras saling bahu-membahu, saling isi-mengisi, saling membangun komunikasi. Saya percaya dan selalu katakan, GERINDRA harus bersahabat dengan semua kekuatan merah putih di seluruh Indonesia. Saya percaya di semua partai banyak orang baik, orang baik yang masih patriot dan cinta tanah air.

Kita harus galang komunikasi, bangun persahabatan, dan kita pada saatnya harus wujudkan suatu bukti yang nyata untuk rakyat kita.

Perjuangan kita tidak semata-mata cari kursi pemilihan. Kursi di dewan, kursi di kabupaten, kursi gubernur, kursi wali kota, itu semua penting, karena dengan kita mendapat kepercayaan di pemerintahan, baru kita bisa wujudkan cita-cita kita. Tapi, jangan fokus dan berpikiran hanya ke situ. Harus lebih dari itu.

Bersama atau tidak bersama GERINDRA, kita yang hatinya merah putih harus menjadi kekuatan ekonomi dan kekuatan sosial. Kita harus hadir di kehidupan rakyat. Hadir di sawah-

sawah. Hadir di lembah-lembah. Hadir di desa-desa. Hadir di daerah-daerah kumuh. Hadir bela para nelayan.

Kita harus bela orang-orang yang sedang susah. Kalau tidak bisa bantu banyak orang, bantu sedikit dulu. Kalau sedikit pun tidak bisa bantu, bantu satu orang.

Kalau satu orang pun kau tidak bisa bantu, minimal kau mendidik rakyat sekitarmu, sadarkan mereka bahwa bangsa Indonesia harus kembali berdiri di atas kaki kita sendiri. Jangan mau kita jadi bangsa pesuruh. Jangan mau terus-menerus kita dipermalukan di mana-mana.

Sekaranglah saatnya saudara menjadi guru di tengah rakyat. Bangkitkanlah kesadaran rakyat bahwa Allah SWT tidak akan mengubah nasib suatu kaum, manakala kaum itu tidak mau mengubah nasibnya sendiri.

Saya minta, bagi saudara-saudara yang benar-benar ingin bersama saya dalam memperjuangkan dan membela nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai membela Indonesia, nilai-nilai membangun Indonesia yang benar, yang baik, untuk anak dan cucu kita. Bagi saudara-saudara yang ada di golongan ini, marilah terus kita berjuang dalam kekompakan dan kebersamaan. Marilah kita menilai, dari hari ke hari, apa pun yang kita lakukan harus selalu di atas landasan konstitusi kita, tidak boleh menggunakan kekerasan.

Saya tidak tahu, dari semua yang membaca buku ini, berapa dari antara saudara yang terus bersama saya. Saya mohon, tolonglah jawab kepada saya, hubungi saya melalui media sosial, sehingga saya tahu siapa yang akan berjuang terus bersama saya sampai titik darah yang penghabisan. Atau, bagi saudara yang hanya mau melihat dari pinggir, saya pun tidak masalah.

Terima kasih, saudara telah meluangkan waktu untuk membaca pikiran-pikiran saya. Jika setelah membaca buku ini saudara

memutuskan untuk bergabung dengan perjuangan saya, saya ucapkan terima kasih atas bergabungnya saudara.

Percayalah, selama saudara memandang saya kawan, saya akan menjadi kawanmu. Saya akan berjuang bersamamu. Saya akan setia kepada saudara, karena saya yakin, saudara setia kepada rakyat Indonesia. Saudara setia kepada bangsa Indonesia.

Semoga Tuhan Maha Besar senantiasa merestui perjuangan kita, dan semoga kita selalu kuat, iman kita kuat, keyakinan kita kuat, keberanian kita kuat untuk cinta dan bela tanah air kita.

Jangan sekali-sekali kita lupa sejarah kita. Bahwa kita berasal dari bangsa yang berani. Bangsa yang tidak takluk dengan siapa pun. Bangsa yang punya kehormatan. Bangsa yang punya cita-cita. Bangsa yang ingin hidup seperti bangsa-bangsa lain.

Itu adalah perjuangan, impian dan tekad saya dan GERINDRA. Dan, itu hanya bisa datang kalau kita berantas korupsi sampai ke akar-akarnya. Kita harus berani mengamankan dan menyelamatkan harta dan kekayaan bangsa Indonesia. Kalau kita tidak berani dan tidak mampu menghentikan mengalirnya kekayaan kita ke luar negeri, maka Indonesia tidak mungkin menjadi negara yang sejahtera.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera. Shalom. Om santi, santi, santi om.
Namo buddhaya.

Merdeka!

Prabowo Subianto

PRABOWO SUBIANTO lahir di Jakarta, 17 Oktober 1951. Ia adalah seorang pejuang politik, pengusaha, dan mantan prajurit TNI.

Dalam 28 tahun pengabdianya di TNI, putera pertama dari Prof. Sumitro Djojohadikusumo ini telah berhasil menorehkan banyak prestasi. Diantaranya, ia adalah perwira Tentara Nasional Indonesia (TNI) di masanya yang paling banyak memimpin operasi militer di Indonesia, terutama di Timor Timur dan Papua. Pada tahun 1996, ia memimpin sendiri operasi pembebasan sandera di Mapenduma, Papua, yang berhasil membebaskan 26 orang sandera, diantaranya ada 8 orang warga negara asing. Ia juga menjadikan Indonesia negara Asia Tenggara pertama yang mengibarkan bendera di puncak gunung Everest. Selain itu, ia pernah memimpin batalyon terbaik, yaitu Batalyon Infantri 328 (sekarang Batalyon Infantri Para Raider 328).

Karena pemahamannya atas berbagai tantangan yang dihadapi oleh bangsa dan negara, di tahun 2008 Prabowo dan kawan-kawan membentuk Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA), yaitu suatu partai nasionalis yang orientasi ekonominya adalah ekonomi kerakyatan, yaitu ekonomi berdasarkan pasal 33 UUD 1945.

Di tahun 2014, Prabowo maju sebagai Calon Presiden Republik Indonesia, dan mendapat kepercayaan dari 62 juta lebih rakyat Indonesia.





Jika saudara warga negara Indonesia, dan karena kesibukan atau hal lain saudara hanya bisa membaca satu buku tahun ini, bacalah dan pahami isi buku ini. Sebagai WNI, saudara perlu mengetahui kondisi negara Republik Indonesia, negara saudara sendiri.

Negara kita kaya akan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Kita sebenarnya bisa menjadi negara kelas atas yang disegani dan dihormati. Seluruh rakyat Indonesia bisa hidup sejahtera. Sesungguhnya, inilah tujuan kita bernegara.

Namun, jika negara kita benar kaya, kenapa sampai saat ini masih banyak rakyat Indonesia yang hidup miskin dan lapar? Kenapa cari pekerjaan yang layak begitu susah? Kenapa kita masih membaca, negara kita harus berutang untuk sekedar bayar bunga utang? Kenapa kekayaan kita terus mengalir ke, dan berdiam di luar negeri? Kenapa politisi-politisi kita seakan tidak mampu berbuat banyak?

Ditulis oleh Prabowo Subianto dengan bahasa yang sederhana dan dilengkapi dengan infografi-infografi menarik, buku ini mengungkap kondisi negara kita saat ini, dan menjelaskan dua tantangan besar yang harus kita hadapi dan atasi sebagai bangsa Indonesia: Kekayaan kita yang terus mengalir ke luar, dan demokrasi kita yang dikuasai pemodal besar. Buku ini menjelaskan bagaimana bangsa Indonesia sekarang hidup dalam sebuah kondisi yang disebut oleh Prabowo sebagai 'Paradoks Indonesia', dan bagaimana kita sebagai bangsa dapat mengatasinya.

ISBN 978-602-61076-0-2

KGJN KOPERASI
GARUDAYAKSA
NUSANTARA

